



# LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Pelaihari Telp : (0512) – 218363

Fax (0512) 21009 Website : <http://dprd.tanahlautkab.go.id>

**2024**

## KATA PENGANTAR

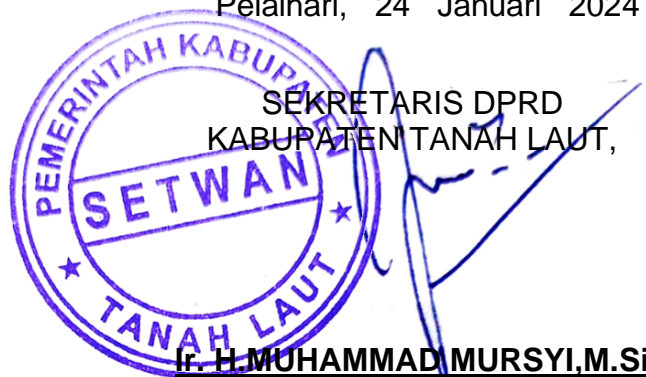
Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai perwujudan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pelaihari, 24 Januari 2024



SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANAH LAUT,

**Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si**

Pembina TK. I (IV/b)

NIP.196803041998031009

## IKHTISAR EKSEKUTIF



Ir. H. Muhammad Mursyi, M. Si

Sekretaris DPRD Kab. Tanah Laut

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan Wujud Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini tahun ke-5 RPJMD 2018-2023. Selain Media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, laporan kinerja juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus menggambarkan keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 1 (satu) sasaran yang diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja utama dan 4 sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 11 (sebelas) indikator, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan /Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis diatas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Baik**. Hal ini berdasarkan pada hasil pengukuran target pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan Tahun 2023 terhadap realisasi pencapaian target Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap 1 (satu) sasaran 1 (satu) indikator kinerja utama dengan tingkat capaian kinerja **sangat memuaskan**. Indikator kinerja Program yang terdiri dari 4 Sasaran dan 11 indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 143,85 % dengan rincian 3 (tiga) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori **sangat memuaskan** dan 1 capaian kinerja dengan katagori **memuaskan**.

Pencapaian Kinerja pada tahun 2023 belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun sangat diharapkan kedepannya akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 sangat diharapkan dapat mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut selaku instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 24 Januari 2024

  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANAH LAUT,  
**I. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si**  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP.196803041998031009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Dasar Hukum .....	2
D. Cascading Kinerja .....	5
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
F. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	9
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran .....	11
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya .....	16
I. Sistematika Penyajian .....	17
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	19
A. Visi RPJMD .....	19
B. Misi RPJMD .....	20
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	24
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	27
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	29
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	29
1. Sasaran RPJMD .....	30
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut .....	32
3. Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat .....	48
1. Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian .....	71
4. Kepala Bagian Keuangan .....	87
1. Kasubbag Perencanaan dan Anggaran .....	97
5. Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD .....	102
B. Akuntabilitas Keuangan .....	117

1.	Anggaran dan Realisasi APBD 2023 .....	117
2.	Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program .....	118
3.	Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023 .....	121
4.	Perbandingan Rata-Rata Realisasi Kinerja dengan Rata-Rata Realisasi Keuangan.....	122
<b>BAB IV.</b>	<b>PENUTUP</b> .....	126
A.	Kesimpulan .....	126
B.	Strategi Peningkatan Kinerja .....	126
	<b>LAMPIRAN</b> .....	128

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Tugas, Pokok dan Fungsi serta Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut .....	9
2 Nama Jabatan, Eselon, Status dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	11
3 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2023 .....	12
4 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Tahun 2023 .....	13
5 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	14
6 Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 .....	15
7 Matriks Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....	16
8 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 .....	22
9 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	25
10 Pengelompokan Capaian Kinerja.....	29
11 Misi 3, Sasaran /IKU dan Target RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut .....	31
12 Indikator Kinerja utama (IKU) Esselon II Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	32
13 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	32
14 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Esselon II pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	33
15 Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon II Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022-2023 .....	34
16 Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon II sd. Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut (2018-2023) .....	35
17 Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 Dengan Capaian Target 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%) .....	36
18 Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	38
19 Jumlah Nilai Unsur, Jumlah NRR per unsur dan Jumlah NRR tertimbang Hasil pengolahan Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2023.....	40
20 Analisis Program yang menunjang capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	43
21 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Pencapaian Target Esselon II pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.....	45
22 Tingkat Efektivitas Keuangan.....	46

23	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	52
24	Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	55
25	Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode Renstra Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	57
26	Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 Dengan Capaian Target 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%).....	58
27	Alokasi Persasaran Pembangunan Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	64
28	Analisis Program (Sumberdaya) yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	66
29	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Pencapaian Target Di Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	67
30	Rasio Efisiensi Belanja Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD TA. 2023.....	69
31	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon IV Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	71
32	Perbandingan Realisasi Kinerja Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	73
33	Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode Renstra Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	75
34	Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Subbag Tatausaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 Dengan Capaian Target 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%).....	76
35	Alokasi Persasaran Pembangunan Esselon IV Subbag Tatausaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	79
36	Analisis Program (Sumberdaya) yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Subbagian Tatausaha dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	81
37	Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian target di Subbagian Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	82
38	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Esselon IV subbagian tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan sasaran dan indikator kinerja .....	84
39	Rasio Efisiensi Belanja Sub bagian Tatausaha dan Kepegawaian DPRD Sekretariat DPRD TA. 2023 .....	85

40	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon III (Bagian Keuangan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	86
41	Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	87
42	Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III Kabag Keuangan Tahun 2023 dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan beberapa Kabupaten.....	88
43	Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III (Bagian Keuangan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan target akhir Renstra.....	89
44	Alokasi Persasaran Pembangunan Esselon III (Bagian Keuangan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	92
45	Analisis Program (Sumberdaya) yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Bagian Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	93
46	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Pencapaian Target Di Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	94
47	Rasio Efisiensi Belanja Bagian Keuangan Sekretariat DPRD TA. 2023 ....	95
48	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon IV Sub bagian Perencanaan dan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	96
49	Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon IV Kasubbag Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	97
50	perbandingan capaian indikator kinerja Esselon IV Kasubbag Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023.....	97
51	Alokasi Persasaran Pembangunan Esselon IV Subbag Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	99
52	Analisis Program (Sumberdaya) yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Subbagian Perencanaan dan Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	99
53	Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian target di Subbagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	100
54	Rasio Efisiensi Belanja Subbagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD TA. 2023.....	100
55	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon III (Bagian fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	104
56	Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	105
57	Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III Bagian Fasilitasi dan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	106
58	Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode Renstra Esselon III Fasilitasi dan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	107

59	Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi dan Tugas DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 Dengan Capaian Target 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%).....	109
60	Alokasi Persasaran Pembangunan Esselon III (Bagian fasilitasi tugas dan fungsi DPRD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	112
61	Analisis Program (Sumberdaya) Yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Bagian Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	114
62	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Pencapaian Target Di Bagian Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 persasaran indicator.....	115
63	Rasio Efisiensi Belanja bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD TA. 2023.....	116
64	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.....	117
65	Anggaran dan realisasi menurut tujuan/sasaran dan program kegiatan penunjang SEkretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	120
66	Perbandingan Capaian Kinerja Dan Capaian Keuangan Dan Efisiensi Sumberdaya Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023.....	122
67	Perbandingan Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan 2023.....	123

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.....	5
2 Hubungan mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut .....	8
3 Sistem Integrasi Perencanaan, monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.....	27
4 Sistem Evaluasi SAKIP Mandiri OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.....	28

---

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja (Lkj) secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bahan dan media penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. meningkatkan akuntabilitas publik dengan menyediakan informasi yang jelas dan terukur tentang kinerja instansi pemerintah;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik;
3. sebagai media pertanggungjawaban dan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan.

## **C. Dasar Hukum**

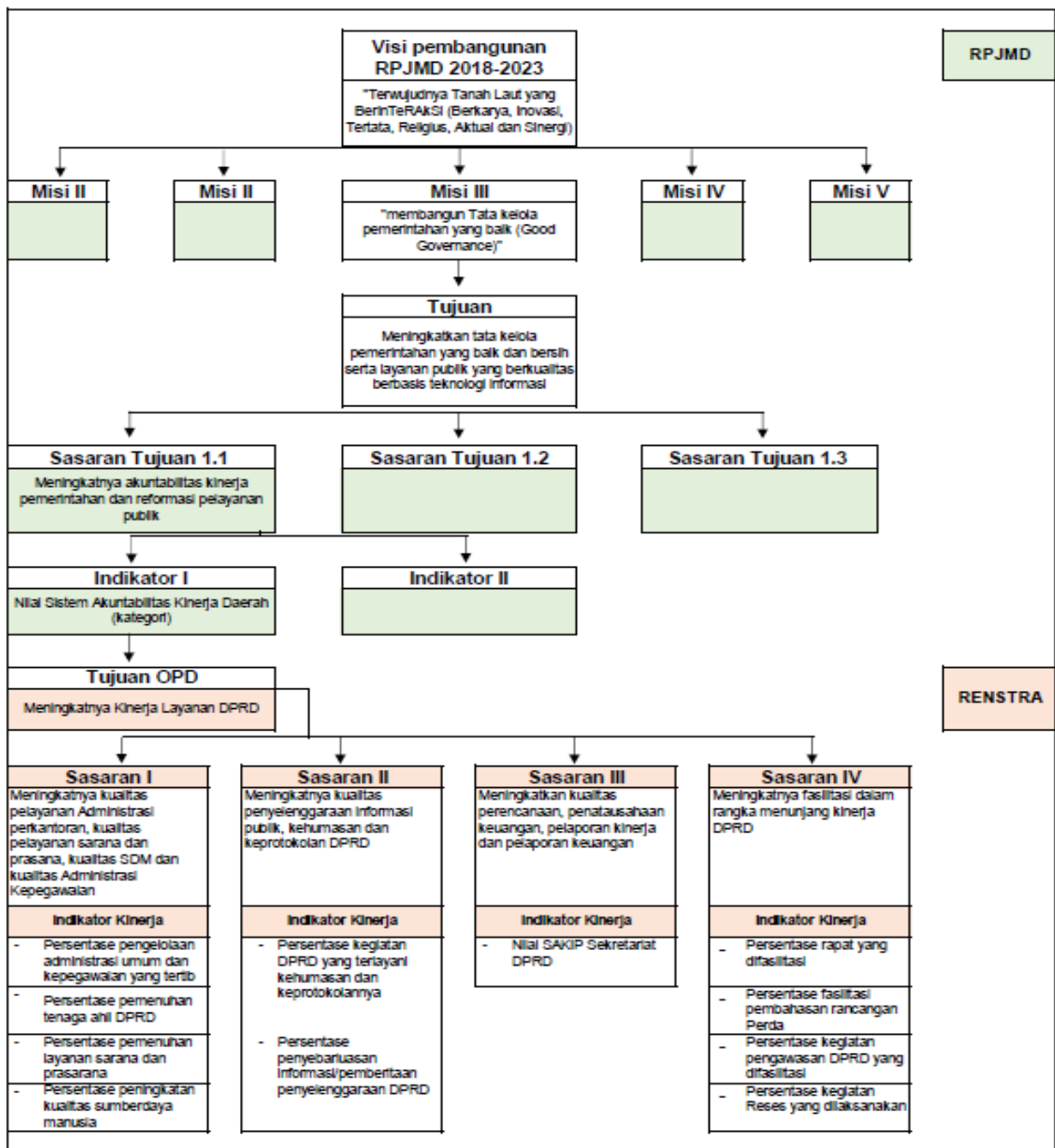
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 50 tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten tanah Laut;
14. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 54 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati tanah Laut Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomr 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Bupati tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman penilaian Kinerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
19. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/866-KUM/2023 tentang Penetapan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

**D. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memiliki cascading kinerja dengan skema sebagai berikut:



**Gambar 1. Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut**

---

**E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD
2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian
3. Bagian Keuangan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
4. Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
5. Kelompok Jabatan Fungsional

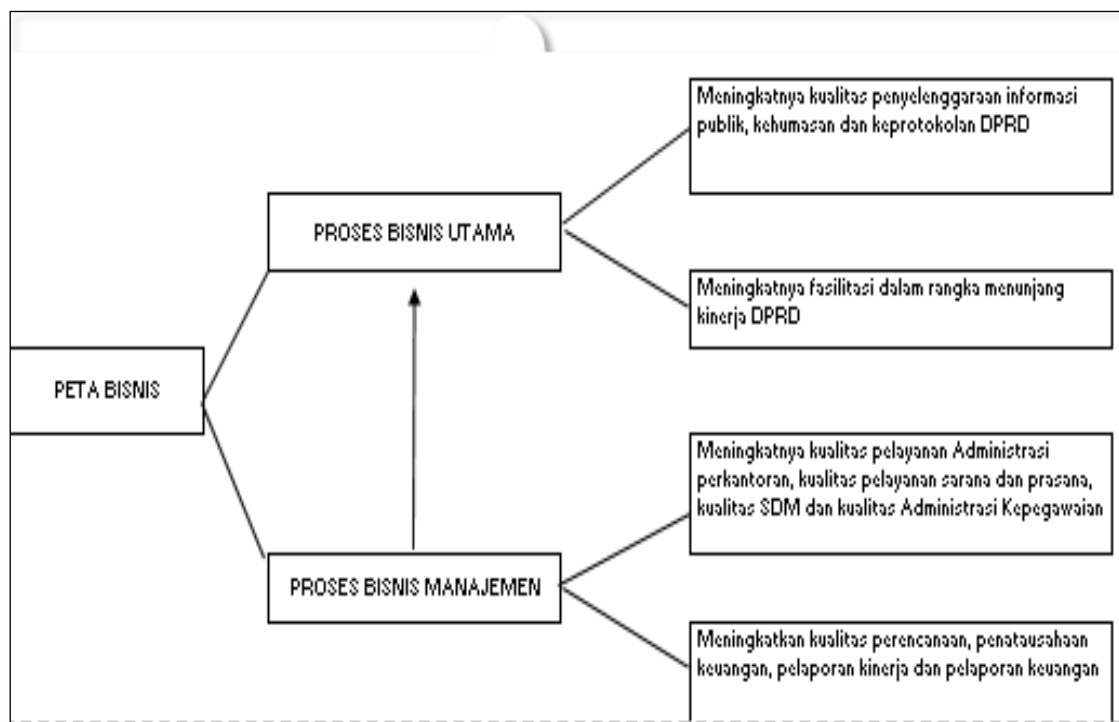
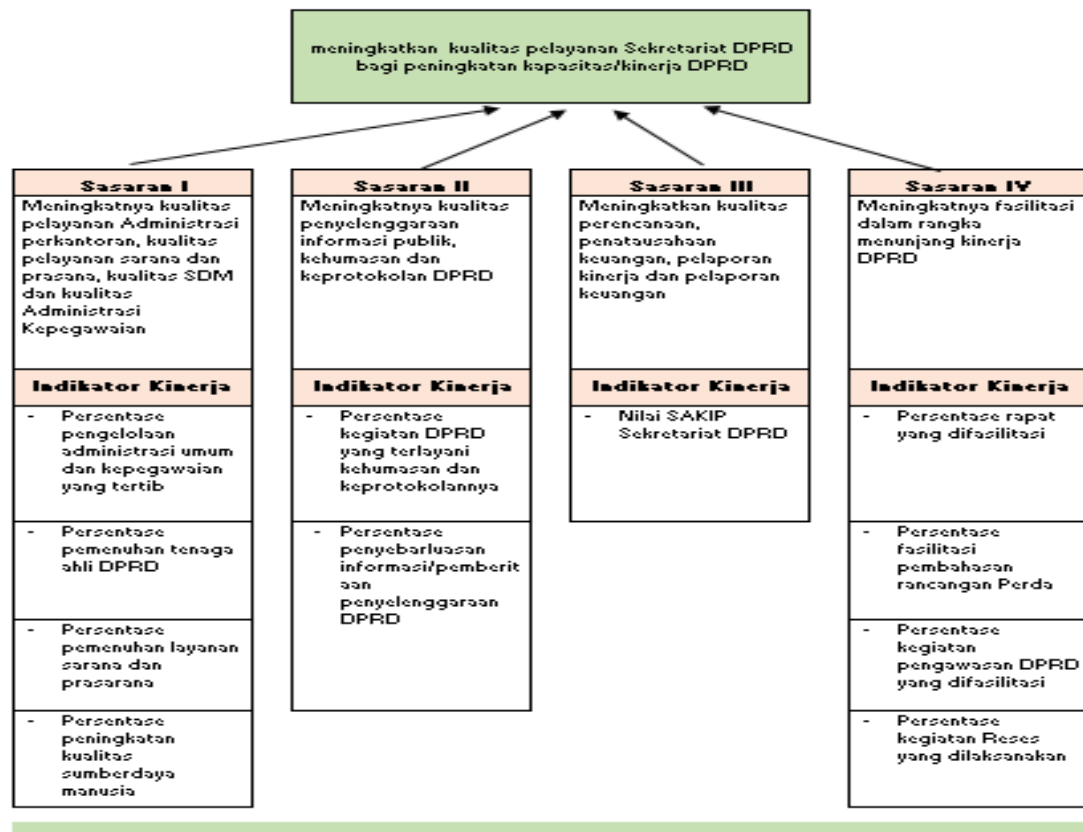
Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

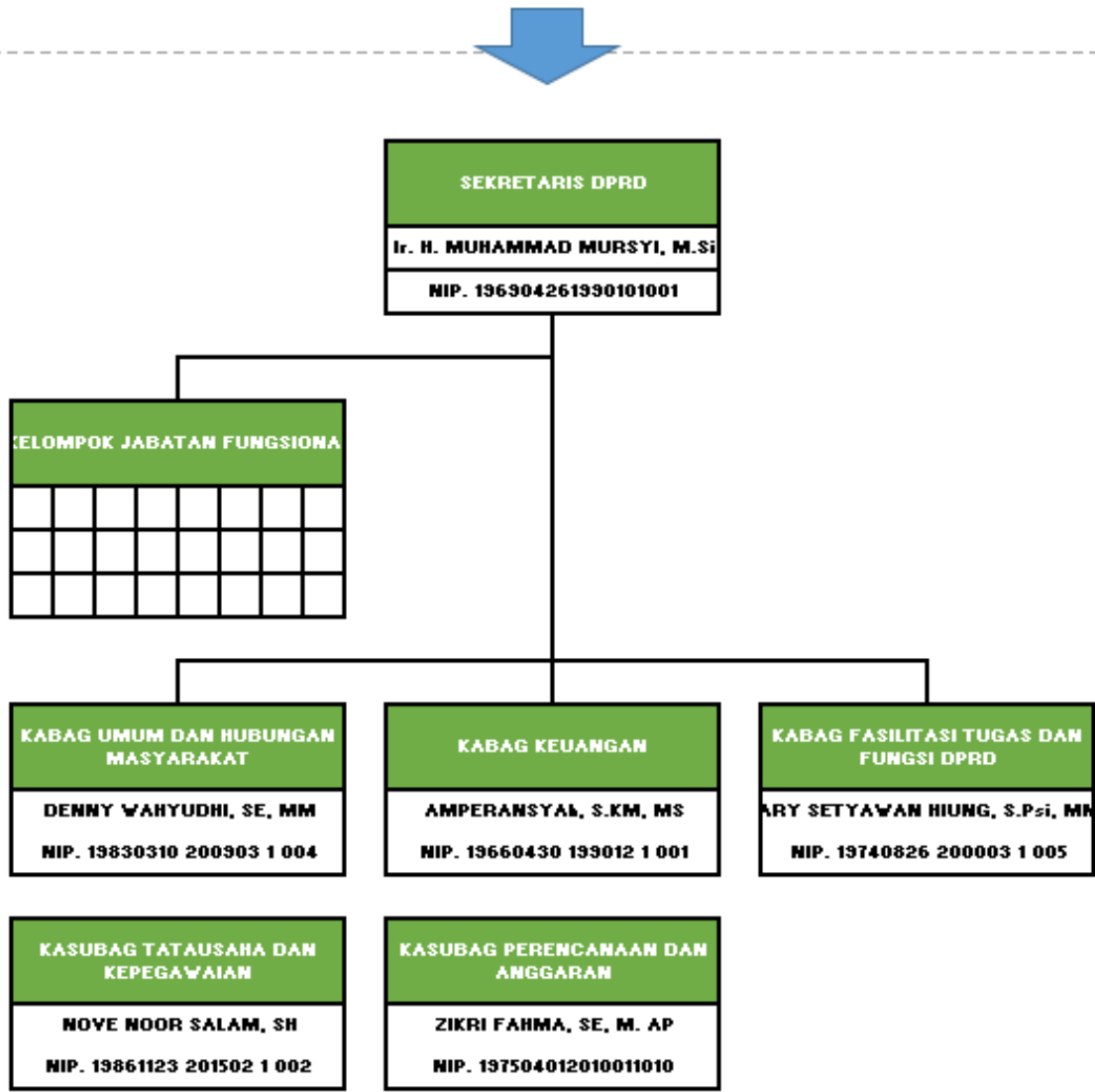
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan antara mandate kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Gambar 2. Hubungan Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Desain Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

## F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut berkaitan erat dengan isu strategis organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi nilai, tingkat dan kombinasi pelaksanaan tugas, biaya organisasi ataupun manajemen organisasi. Permasalahan strategis muncul karena berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sehingga perlu untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merumuskan permasalahan strategis yang dihadapi berkaitan dengan tugas dan fungsinya pada tabel berikut :

**Tabel 1. Tugas, Pokok dan Fungsi serta Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut**

Tugas Pokok dan Fungsi		Isu Strategis
<b>Tugas Pokok</b>	Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan Administrasi Keuangan, mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku	1. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban.
		2. Belum adanya perubahan pola pikir ( <i>mindset</i> ) terhadap tugas, pokok dan fungsi akibat adanya tingkat pendidikan aparatur yang berbeda sehingga terdapat ketidak sesuaian antara kemampuan aparatur dengan tugas, pokok dan fungsi yang dilaksanakan.
		3. Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur dalam mengikuti diklat sehingga kualitas yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan.
		4. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana.
		5. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terdapat ketidak serasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian dalam Sekretariat DPRD.
		6. Distribusi pekerjaan yang kurang merata sehingga terdapat penumpukan volume pada satu Bagian.
<b>Fungsi</b>	a. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;	7. Kurang berfungsinya elemen-elemen penting pada Sekretariat DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kurang efektif dan efisien
	b. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;	

c.	pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;	mengingat nuansa politis yang cukup kental dilingkungan kerja ( <i>task environment</i> ) Sekretariat DPRD.
d.	penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;	
e.	pengelolaan urusan kesekretariatan DPRD.	

Ditinjau dari tugas, pokok dan fungsi SKPD yang mempengaruhi permasalahan serta tinjauan terhadap RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan analisis faktor internal dan eksternal maka isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.**

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD ini berkaitan dengan produk hukum seperti pembahasan Raperda, Keputusan DPRD dan Raperda inisiatif. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat Dewan, kegiatan reses, hearing, kunjungan kerja dalam dan luar daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

**2. Sarana dan prasarana persidangan perlu ditingkatkan.**

Kondisi sarana dan prasarana persidangan perlu ditingkatkan dengan mengadakan peralatan yang canggih agar agenda persidangan dan pemaparan materi dapat dilaksanakan lebih cepat dan akurat.

**3. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan.**

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi isu yang harus ditindak lanjuti dengan upaya peningkatan kemampuan administrasi umum maupun kemampuan teknis. Program diklat dan bimtek bidang manajemen pemerintahan, sistem informasi dan teknis pengadaan barang dan jasa masih sangat perlu ditingkatkan.

**4. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah masih belum optimal.**

Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi pada

peningkatan penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan sistem perencanaan daerah yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota DPRD tentang pemerintahan daerah.

## G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

### 1. Dukungan SDM

Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan administrasi dan kepegawaian Sekretariat DPRD di dukung dengan jumlah pegawai 87 orang yaitu terdiri dari 36 orang ASN, 36 orang PTT, 7 orang Tenaga Ahli AKD dan 7 orang Tenaga Ahli Fraksi. Adapun nama jabatan, eselon dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 Nama Jabatan, Eselon, Status dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1	Sekretaris	II b	1	-	1
2	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	III a	1	-	1
	Kepala Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian	IV a	1	-	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)	-	10	-	10
	- Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	-	22	22
3	Kepala Bagian Keuangan	III a	1	-	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	IV a	1	-	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)	-	6	-	6
	- Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	-	7	7
4	Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	III a	1	-	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)	-	8	-	8
	- Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	-	8	8
5	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	-	6	-	6
6	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	-	-	7	7
7	Tenaga Ahli Fraksi	-	-	7	7
<b>JUMLAH</b>			<b>36</b>	<b>51</b>	<b>87</b>

*Sumber: Data kepegawaian Sekretariat DPRD*

Pegawai ASN lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 sebanyak 32 orang . Pegawai yang memiliki pangkat golongan 4 sebanyak 3 orang, golongan 3 sebanyak 24 orang, golongan 2 sebanyak 8 orang dan golongan 1 sebanyak 1 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2023**

No.	Jenis Pangkat	Golongan / Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	0
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0
3	Pembina Utama Muda	IV/c	0
4	Pembina Tk. I	IV/b	2
5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tk.I	III/d	5
7	Penata	III/c	3
8	Penata Muda Tk.I	III/b	7
9	Penata Muda	III/a	9
10	Pengatur Tk.I	II/d	4
11	Pengatur	II/c	3
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	0
13	Pengatur Muda Tk.I	II/a	1
14	Juru Tk I	I/d	1
15	Juru Tk I	I/c	0
16	Juru Muda Tk.I	I/b	0
17	Juru Muda	I/a	0
<b>JUMLAH</b>			<b>36</b>

*Sumber: Data kepegawaian Sekretariat DPRD*

Pendidikan terakhir pegawai sekretariat DPRD tahun 2023 dari 87 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sebanyak SLTP sebanyak 2 orang, SLTA/SMK sebanyak 27 orang, D3 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 34 orang dan master/pasca sarjana sebanyak 13 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Tahun 2023**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		PNS	Non PNS / PTT	Jumlah
1	Sekolah Dasar	-	-	0
2	SLTP	1	1	2
3	SLTA / SMK	11	16	27
4	D.1	-	-	0
5	D.2	-	-	0
6	D.3	5	6	11
7	D.4	-	-	0
8	Sarjana (S.1)	12	22	34
9	Master / Pasca Sarjana	7	6	13
10	Dokter / S3	-	-	0
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>51</b>	<b>87</b>

*Sumber: Data kepegawaian Sekretariat DPRD*

## 2. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD dalam operasional kegiatannya didukung oleh sarana prasarana berupa Aset tetap yang terdiri dari Tanah 12.480 M<sup>2</sup>, peralatan dan mesin 2.674 buah, gedung dan bangunan 28 buah, jalan jaringan dan irigasi 2 buah, dan asset tetap lainnya 20 buah serta akumulasi penyusutan Rp. -12.459.456.683,01 dengan demikian Nilai Aset Tetap sebesar Rp. 17.955.169.271.

Selain sarana prasarana berupa Aset Tetap, juga ada asset lainnya berupa asset tidak berwujud 3 buah, dan asset rusak berat/usang senilai Rp. 111.819.006 ditambah akumulasi penyusutan asset lainnya senilai Rp.-111.204.751, dengan demikian jumlah nilai asset lainnya sebesar Rp.165.614.255.

Total jumlah asset yang mendukung kegiatan operasional di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 sebesar Rp. 18.120.783.526. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

KLASIFIKASI	JUMLAH BARANG	NILAI ASET (Rp)	KET.
<b>ASET TETAP</b>		<b>17.955.169.271,00</b>	
Tanah	12.480 M <sup>2</sup>	1.261.400.000,00	
Peralatan dan Mesin	2.674 buah	13.216.232.476,01	
Gedung dan Bangunan	28 buah	15.840.748.478,00	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2 buah	89.245.000,00	
Aset Tetap Lainnya	20 buah	7.000.000,00	
Akumulasi Penyusutan		-12.459.456.683,01	
<b>ASET LAINNYA</b>		<b>165.614.255,00</b>	
Aset Tidak Berwujud	3 buah	165.000.000,00	
Aset Lain-lain		111.819.006,00	aset rusak berat/usang
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-111.204.751,00	
<b>JUMLAH ASET TETAP DAN ASET LAINNYA</b>		<b>18.120.783.526,00</b>	

Sumber: data dari Neraca Sekretariat DPRD 2023

### 3. Dukungan Anggaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.51.257.055.256. Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran anggaran belanja sebesar Rp.60.812.728.170. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari realisasi belanja sebesar Rp 53.328.644.345.- (87,69%). Adapun secara rinci dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 6. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>60.812.728.170</b>	<b>53.328.644.345</b>	<b>87,69</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.830.376.472</b>	<b>52.412.994.345</b>	<b>87,6</b>
Belanja Pegawai	27.920.158.254	25.134.733.483	90,02
Belanja Barang dan Jasa	31.910.218.218	27.278.260.862	85,48
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>982.351.698</b>	<b>915.650.000</b>	<b>93,21</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	815.851.698	750.650.000	92,01
Belanja Modal Aset Lainnya	166.500.000	165.000.000	99,1

*Sumber: Data LRA Sekretariat DPRD TA. 2023*

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

**Tabel 7. Matriks Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022**

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Perencanaan Kinerja	Agar dilakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan yang telah selaras sehingga kualitas perencanaan kinerja dapat dipertahankan dan perbaikan pencapaian kinerja tahun selanjutnya	meningkatkan kualitas perencanaan dengan tetap melakukan perbaikan/penyempurnaan dalam mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik	Melaksanakan reuiu Renja tahun 2023 sebagai progress penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 untuk perbaikan capaian Kinerja. Adapun bukti dukung berupa Dokumen Renja Perubahan 2023 dan Bukti dokumentasi rapat terkait
2.	Pengukuran Kinerja	agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan agar dibuat analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan pencapaian kinerja	mempertahankan kegiatan monitoring dan evaluasi berkala atas hasil pencapaian target kinerja secara berjenjang	Melakukan monev berkala atas hasil pencapaian target kinerja dengan bukti dukung berupa laporan kemajuan kegiatan triwulan I-IV dan bukti dokumentasi rapat
3.	Pelaporan Kinerja	agar dalam pelaporan kinerja menginfokan penggunaan sumberdaya pada setiap pencapaian target kinerja	Dokumen laporan kinerja akan memuat penggunaan sumberdaya pada setiap pencapaian target kinerja	Dokumen LKj 2023 menginfokan penggunaan sumberdaya pd setiap pencapaian target kinerja.
		agar dilakukan reuiu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas dan mejadi perhatian dan kepedulian seluruh pegawai	reuiu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun secara berkala	Dokumen LKj 2023 yang disusun telah menyajikan reuiu berjenjang yaitu menyajikan laporan kinerja Esselon II,III &IV dan telah direuiu oleh organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
		agar dalam pelaporan kinerja menyajikan efisiensi penggunaan anggaran dikaitkan dengan pencapaian target kinerja	Dokumen laporan kinerja akan menyajikan efisiensi penggunaan anggaran dikaitkan dengan pencapaian target kinerja	Dokumen LKj 2023 menyajikan efisiensi penggunaan anggaran dikaitkan dengan pencapaian target kinerja. Bukti dukung BAB III LKj 2023 dan dokumentasi rapat monev
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	agar sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut secara terus menerus meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan meningkatkan Kualitas SDM yang Memadai	meningkatkan kualitas SDM dalam rangka menunjang Akuntabilitas Kinerja Internal lingkup Sekretariat DPRD dengan menyertakan Tim penyusun mengikuti Bimbingan Teknis penyusunan LAKIP	Mengikuti Bimbingan Teknis peningkatan Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (Banjarmasin, 21-22 November 2023)

## **I. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/886-KUM/2023 tentang penetapan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

**BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - 1. Sasaran RPJMD
  - 2. Eselon II
  - 3. Eselon III
  - 4. Eselon IV
- B. Akuntabilitas Keuangan
  - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
  - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2022 dan 2023

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

## **BAB II.**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **A. Visi RPJMD**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 2018-2023 adalah “ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) yang berarti adalah :

- Berkarya : Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- Inovasi : Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- Tertata : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- Religius : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
- Aktual : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Senergi : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah

### B. Misi RPJMD

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari 5 (lima) misi tersebut diatas, Sekretariat DPRD termasuk pada Misi ke-3 yaitu "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*)".

### C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi ke 3 (tiga) yaitu : "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)" dengan tujuan RPJMD "Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik" dan sasaran "Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD".

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Menetapkan tujuan "**Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD**". Sekretariat DPRD dengan tujuan

tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Meningkatnya kinerja layanan DPRD.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana, Kualitas SDM dan Kualitas Administrasi Kepegawaian.
3. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan informasi Publik, Kehumasan dan Keprotokolan DPRD.
4. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan Administrasi keuangan Sekretariat DPRD
5. Meningkatnya Fasilitasi dalam rangka menunjang Kinerja DPRD

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target 5 tahunan sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap layanan Sekretariat DPRD.	Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,07 (Baik)	77,08 (Baik)	77,09 (Baik)	77,1 (Baik)	77,11 (Baik)
			1 Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

				Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	
			3	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	BB	BB	BB
			4	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah 2023

### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja tahun 2023 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi ke depan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2023 telah disepakati baik oleh Sekretaris, pejabat eselon III, pejabat eselon IV sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

**Tabel 9. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	<b>Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut</b>			
	1. Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	baik	77,11
2.	<b>Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat</b>			
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	<b>1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	dokumen	2568
		<b>2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		Jumlah tenaga ahli yang disediakan	org	5
		<b>3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	jenis	36
		Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	unit	7
		<b>4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	org	15
		Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	org	175
	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	org	35	
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	<b>1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	459

## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi	kali	255
		<b>2. Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose	kali	50
<b>3.</b>	<b>Kepala Bagian Keuangan</b>			
	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	<b>1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD</b>	<b>BB (sangat Baik)</b>	<b>BB</b>
		Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	dokumen	6
		Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	dokumen	1930
		Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	dokumen	60
		Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	Laporan	7
		Jumlah Dokumen Akutansi yang dilaksanakan	dokumen	1.930
<b>4.</b>	<b>Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD</b>			
	1. Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	<b>1. Persentase rapat yang difasilitasi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		Jumlah Rapat yang difasilitasi	rapat	255
		Jumlah hering/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	kali	4
		Jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan	kali	1.456
		<b>2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi	raoerda	15
		Jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	dokumen	3

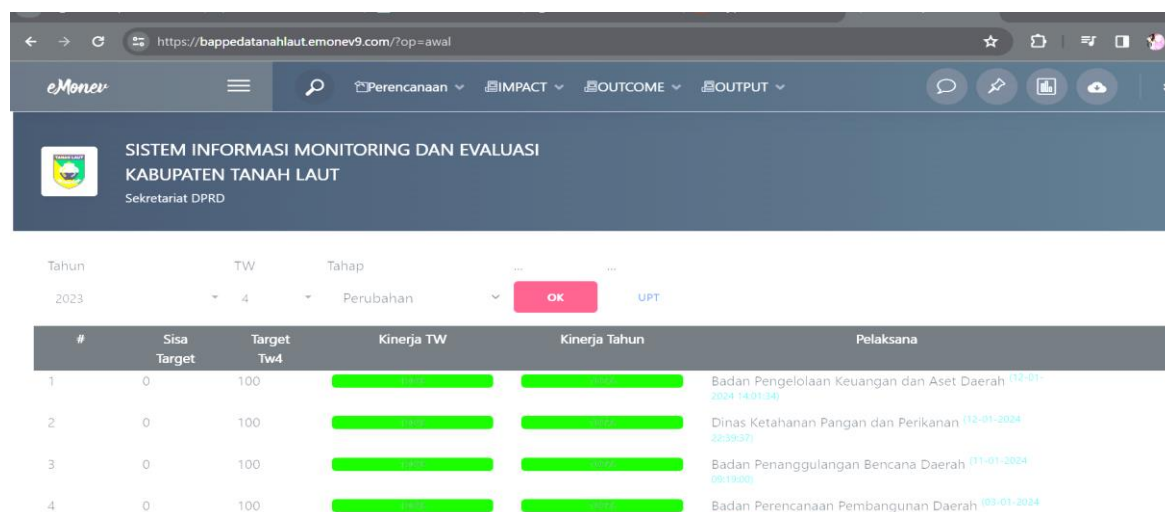
## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		<b>3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	dokumen	6
		<b>4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>
		Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan	kali	3

### E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

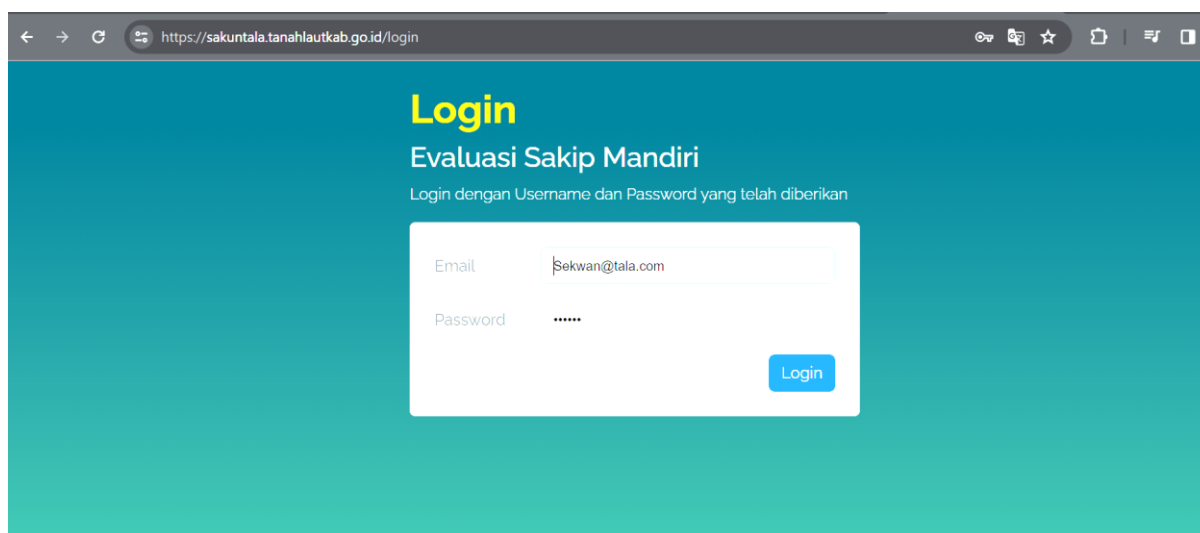
Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Aplikasi E-Monev (<https://bappedatanahlaut.emonev9.com/>) yang mengintegrasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja tri wulan dan tahunan OPD.

Selain itu untuk evaluasi SAKIP Mandiri dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut menggunakan Aplikasi Sakuntala (<https://sakuntala.tanahlautkab.go.id>) meliputi komponen penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



Tahun	TW	Tahap	Sisa Target	Target Tw4	Kinerja TW	Kinerja Tahun	Pelaksana
2023	4	Perubahan	0	100	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (12-01-2024 14:01:34)
			0	100	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (12-01-2024 10:20:58)
			0	100	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (11-01-2024 09:19:00)
			0	100	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (09-01-2024)

**Gambar 3. Sistem Integrasi Perencanaan, monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.**



**Gambar 4. Sistem Evaluasi SAKIP Mandiri OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.**

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan pengukuran kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Bapak Bupati Tanah Laut Tahun 2023. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

**Tabel 10. Pengelompokan Capaian Kinerja**

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Di atas 80% sampai dengan 90	Memuaskan
III	Di atas 70 sampai dengan 80	Sangat Baik
IV	Di atas 60 sampai dengan 70	Baik
V	Di atas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Di atas 30% sampai dengan 50%	Kurang
VII	Kurang dari 30%	Sangat Kurang

**Sumber MenpanRB nomor 88 Tahun 2021**

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik. Rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### 1. Sasaran RPJMD

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai **Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)** Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 adalah **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”** dimana **untuk pencapaian visi** tersebut telah **ditetapkan 5 misi** pembangunan.

Pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam periode 2018-2023 akan berfokus pada pembinaan desa dan penataan kota (**desa dibina kota ditata**) dengan **bekerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas**. Dalam rangka pembinaan desa, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke depan akan menjalankan berbagai program pembangunan di setiap urusan kewenangan yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan desa. Untuk penataan kota, program pembangunan yang dijalankan akan berfokus pada upaya mendorong kota menjadi kota yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Pembinaan desa dan penataan kota akan dijalankan secara sinergis antar perangkat daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Untuk mewujudkan visi, misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, sesuai tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memiliki Peran dalam pencapaian **misi ke 3 (tiga)** yaitu : **“Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance )”** sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dengan tujuan Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan Publik yang berkualitas berbasis teknologi Informasi dengan sasaran meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi pelayanan Publik, Meningkatkan Transparansi penyelenggaraan Pelayanan Publik, Meningkatkan penggunaan Sistem Informasi daerah dan Kompetensi Aparatur, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 11. Misi 3, Sasaran /IKU dan Target RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut**

No	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
<b>Misi Ke-3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>					
<b>Sasaran 1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik</b>					
1	Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,11 (Baik)	80,16	103,96

## 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Eselon II sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 12. Indikator Kinerja utama (IKU) Esselon II Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Survey indeks kepuasan (IKM)	Sekretaris DPRD

Adapun untuk mengetahui katagori mutu pelayanan berdasarkan nilai interval, nilai interval konversi dan kinerja unit pelayanan pada hasil capaian indeks kepuasan hasil survey yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 13. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPS I	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Realisasi capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan hasil Survey tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dengan Indeks Kepuasan sebesar 80,16 atau 103,95 % dari target tahun 2023 sebesar 77,11.

Berdasarkan Tabel tersebut diatas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 memiliki mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan katagori **Baik**.

Adapun analisis capaian kinerja persasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Realisasi capaian kinerja hingga tahun 2023 secara umum telah tercapai dan melampaui target tahun 2023. Skor Indeks kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD sejumlah 80,16 telah diselesaikan tahun 2023 dengan target sebesar 77,11, tercapai 103,95% dengan demikian tingkat kinerja sebesar 103,95% telah melampaui target tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 14. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Esselon II pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,11	80,16	103,95%	77,11

**Sumber : data diolah 2023**

### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja Eselon II Tahun 2023 dengan Tahun 2022 telah menjadi peningkatan realisasi. Pada Tahun 2022 nilai Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD 78,26 dan tahun 2023 sebesar 80,16. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 1,9 point. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon II Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022-2023**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	target	Realisasi	
			Th.2022 (n-1)	Th.2023 (n)
Meningkatnya layanan sekretariat DPRD untuk menunjang urusan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	(Baik) 77,11	78,26	80,16

*Sumber : data diolah 2023*

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Akhir Periode Renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja eselon II di Tahun 2023 sebesar 80,16 dengan Target Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut (2018-2023) sebesar 77,11 telah tercapai dan melampaui dengan tingkat kemajuan 3,05 point dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon II sd. Akhir Periode Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut (2018-2023)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Akhir RENSTRA	
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	C
Meningkatnya layanan sekretariat DPRD untuk menunjang urusan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Nilai	77,09	77,7	100,79	77,1	78,26	101,50	77,11	80,16	103,96	77,11	103,96

**Sumber : data diolah 2023**

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun perbandingan realisasi target kinerja tujuan/sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 dengan Capaian target 2023 terhadap target akhir renstra (%) sebagaimana di jelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 17. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 Dengan Capaian Target 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Capaian target 2023 terhadap target akhir renstra (%)
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap layanan Sekretariat DPRD.	Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,07 (Baik)	77,08 (Baik)	77,09 (Baik)	77,1 (Baik)	77,11 (Baik)	77,07 (Baik)	77,3 (Baik)	77,7 (Baik)	78,26 (Baik)	80,16 (Baik)	103,96
			1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,70%	94,04%	100,23%	105,06%	105,06
			2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolannya	Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	320%	320%	320%	320
				Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	114,28%	251,92%	176,59%	176,59
				Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	89,00%	80,00%	66,29%	67,37%	65,21%	65,21
				Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,25%	127,19%	176%	102,48%	102,48

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Capaian target 2023 terhadap target akhir renstra (%)
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
				Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	166%	107,70%	126%	126
			3. Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	BB	BB	BB	B (67,54)	BB (76,08)	BB (77,89)	BB (79,5)	BB 79,3	BB 79,3
			4. Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97,25%	131,76%	106,67%	111,96	111,96
				Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	127%	100%	71,05%	66,67%	83,33	83,33
				Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%	67%	66,67	66,67
				Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100

Sumber: Data diolah 2023

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Untuk membandingkan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan standar nasional tidak ada, namun dapat dibandingkan dengan nilai Indeks kepuasan terhadap layanan Sekretariat DPRD lain, misalnya Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Selatan. Pencapaian Kinerja terhadap Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut sebesar 80,16 dengan katagori Baik dibandingkan dengan nilai Indeks kepuasan Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan terhadap layanan Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Selatan 93,46 (Sangat Baik) berdasarkan data yang bersumber dari laporan IKM sekretariat DPRD propinsi Kalimantan Selatan terhadap kepuasan anggota DPRD pada tahun 2023. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut masih dibawah Sekretariat DPRD propinsi Kalimantan Selatan dengan selisih 13,3 point.

Hal ini menandakan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut harus lebih berbenah dan meningkatkan kinerja agar dapat meningkatkan layanan terhadap Anggota DPRD ditahun selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Selatan	Ket.
Meningkatnya layanan sekretariat DPRD untuk menunjang urusan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	80,16	93,46	IKM Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

**Sumber : data diolah 2023**

## 5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Keberhasilan Sekretariat DPRD untuk kinerja 2023 ditunjukkan dengan tercapainya Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebesar 80,16 yang mana nilai indeks tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022.

Pada Kegiatan Survey kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dalam mengevaluasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut. Adapun Jenis pelayanan yang disurvei adalah:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Kemudahan prosedur pelayanan
3. Kecepatan pelayanan
4. Kepuasan dalam pelayanan kegiatan
5. Kesesuaian antara hasil produk layanan yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan/standar pelayanan.
6. Kompetensi/kemampuan petugas atau aparatur dalam memberikan pelayanan
7. Sikap dan perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam memberikan pelayanan
9. Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Jumlah nilai unsur tertinggi ada pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai unsur terendah ada pada unsur kecepatan pelayanan. Walaupun demikian, nilai unsur kecepatan pelayanan (8,56) meningkat 0,16 point dibandingkan tahun 2022 di nilai 8,40. Secara keseluruhan, nilai IKM Unsur meningkat semua di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah berbenah dan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan terhadap anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Hasil nilai unsur pelayanan berdasarkan jumlah nilai per unsur, jumlah nilai rata-rata per unsur, dan jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur, IKM per unsur dan IKM Unit Pelayanan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 19. Jumlah Nilai Unsur, Jumlah NRR per unsur dan Jumlah NRR tertimbang Hasil pengolahan Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2023**

Uraian	Nilai Unsur Pelayanan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
∑ Nilai Per Unsur	111	115	108	109	109	110	112	110	127
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisisioner yg Terisi	3,17	3,29	3,09	3,11	3,11	3,14	3,20	3,14	3,63
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0, 111	0,35	0,36	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,40
IKM Per unsur	8,80	9,12	8,56	8,64	8,64	8,72	8,88	8,72	10,07
<b>IKM Unit Pelayanan</b>	<b>80,16</b>								

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menghasilkan mutu pelayanan dengan kinerja **baik** dalam rangka memberikan pelayanan oleh sekretariat DPRD terhadap pengguna layanan yang dalam hal ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Namun perlu disadari bahwa bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada “pelanggan” yang dalam hal ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut masih mempunyai kekurangan-kekurangan, sebagaimana pendapat responden yang masih merasakan hal-hal kekurangan tersebut. Mutu pelayanan dengan kinerja baik tersebut adalah capaian yang harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang. Unsur penilaian yang perlu mendapat perhatian, terutama unsur yang masih masuk dalam katagori C.

Kekurangan-keurangan diatas harus segera diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan dimasa mendatang antara lain:

- a) Perbaiki sistem dan tata kerja untuk meningkatkan kemudahan dalam pelayanan dan memberikan kecepatan dalam memberikan pelayanan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pengguna layanan.
- b) Peningkatan sarana dan prasarana fisik pendukung dalam rangka memfasilitasi seluruh kegiatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c) Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap para pegawai Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan.
- d) Melakukan *reward* dan *punishment* dalam organisasi Sekretariat DPRD yang akan dapat membawa pengaruh positif terhadap organisasi. dimana :
  - 1) Mekanisme dan sistem kerja akan menjadi lebih baik, karena adanya tolak ukur kinerja yang jelas,
  - 2) Kinerja individu dalam organisasi semakin meningkat, karena adanya sistem pengawasan yang obyektif dan tepat sasaran,
  - 3) Adanya kepastian indikator kinerja yang menjadi ukuran kuantitatif maupun kualitatif tingkat pencapaian kinerja para individu organisasi.

## 6. Analisis program Penunjang

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang tercakup dalam 2 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Seluruh program kegiatan dan sub kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 11 (sebelas) indikator sebagaimana tercantum dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja kesebelas indikator tersebut sebesar Rp. 60.812.728.170.

Berdasarkan data tahun anggaran 2023 pada program kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja tersebut terdapat efisiensi anggaran. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa factor baik internal maupun eksternal yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan tersebut diatas, masih terdapat kekurangan didalam pencapaian kinerja organisasi sehingga masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah tidak terealisasinya kegiatan yang sudah terjadwalkan mengingat tingkat kesibukan anggota dewan yang intensitasnya meningkat ditahun terakhir RPJMD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 memiliki alokasi anggaran

sebesar Rp. 60.812.728.170, yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran Rp.26.837.458.043 dengan persentase anggaran 44,13% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran Rp.33.975.270.127 dengan persentase anggaran 55,87%.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, sebagaimana dijelaskan diatas capaian kinerja sebesar 80,16 dari target 77,11 atau dengan kata lain capaian kinerja sebesar 103,95%. Nilai capaian kinerja diperoleh dari Realisasi kinerja dibagi Target dikali 100. Dalam mencapai capaian kinerja didukung sasaran program dengan alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.60.812.728.170.- dengan realisasi keuangan Rp. 53.328.644.345 dengan capaian persentase keuangan 87,69%. Nilai persentase keuangan diperoleh dari Realisasi anggaran dibagi Alokasi Anggaran dikali 100.

Berikut tabel analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja untuk tahun anggaran 2023 di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

**Tabel 20. Analisis Program yang menunjang capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No	sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			capaian (%)	nama Program	Keuangan		
			satuan	target	realisasi			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja Layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Nilai	77,11 (Baik)	80,16 (Baik)	103,96	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	60.812.728.170	53.328.644.345	87,69%

Sumber: data diolah 2023

## 7. Analisis pemanfaatan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya oleh Esselon II pada tahun anggaran 2023 diperoleh nilai persentase tingkat efisiensi sebesar 16,26%. Nilai persentase tingkat efisiensi diperoleh dari persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran. Adapun rumus dan formula perhitungan persentase tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ tingkat efisiensi} = \% \text{ capaian Kinerja} - \% \text{ penyerapan anggaran}$$

$$\% \text{ tingkat efisiensi} = 103,95\% - 87,69\%$$

$$\% \text{ tingkat efisiensi} = 16,26\%$$

Dengan persentase tingkat efisiensi sebesar 16,26%, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut telah melakukan efisiensi sumberdaya sebesar 16,26% dalam mencapai persentase capaian kinerja sebesar 103,95% dengan serapan anggaran sebesar 87,69%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 21. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Pencapaian Target Esselon II pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023**

No.	Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Meningkatnya layanan sekretariat DPRD untuk menunjang urusan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	103,95%	87,69%	16,26%

Sumber : data diolah 2023

Rasio efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rasio efisiensi Belanja	=	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{anggaran Belanja}}$	x 100%
Rasio efisiensi Belanja	=	$\frac{\text{Rp.53.328.644.345}}{\text{Rp. 60.812.728.170}}$	x 100%
Rasio efisiensi Belanja	=	87,69%	

Menurut tingkat efektivitas keuangan berdasarkan Permendagri No. 690.900-327 tahun1996, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 22. Tingkat Efektivitas Keuangan**

NO	EFEKTIVITAS (%)	KE EFEKTIVAN KEUANGAN
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup Efektif
4	60%-79%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

*Sumber : Permendagri No. 690.900-327 tahun 1996*

Maka rasio efisiensi belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 87,69%. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dikatakan **Cukup Efektif**.

Dalam pencapaian kinerja, Sekretariat DPRD juga didukung Sumberdaya manusia (SDM). Jumlah pegawai keseluruhan 87 orang yang terdiri dari 36 orang ASN, 36 orang PTT, 8 orang Tenaga ahli AKD dan 8 orang Tenaga ahli fraksi. Selain 87 orang tersebut, ada 4 orang tim kreator yang mendukung/menunjang kegiatan di bagian. Secara keseluruhan, keperluan ASN sesuai dengan peta jabatan masih kurang, namun dapat terpenuhi dengan adanya pegawai tidak tetap. Usulan formasi jabatan sudah disampaikan melalui BKPSDM.

### 3. Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat adalah Jabatan Esselon III yang mengampu 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja. Adapun Sasaran dan indikator kinerja dimaksud sebagai berikut:

#### **Sasaran 1**

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi.

#### **Indikator Kinerja :**

1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib;
2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD;
3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana; dan
4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

#### **Sasaran II**

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolanan DPRD

#### **Indikator Kinerja:**

1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya
2. Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD

Adapun analisis capaian kinerja persasaran strategis Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Perbandingan Realisasi Dengan Target**

Sasaran Strategis I yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dengan capaian indikator kinerja sebagaimana penjelasan berikut:

Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib pada tahun 2023 mencapai capaian kinerja 105,06%. Sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini :

$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani}}{\text{Target}} \times 100\%$
$\% \text{ Capaian} = \frac{2.698 \text{ dokumen}}{2.568 \text{ dokumen}} \times 100\%$
$\% \text{ Capaian} = 105,06$

Adapun persentase capaian kinerja diperoleh dari pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian berupa 2.698 dokumen dibagi target 2.568 dokumen dikali 100% sehingga diperoleh nilai 105,06%.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD mencapai capaian kinerja 320%. Indikator kinerja Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD adalah jumlah tenaga ahli DPRD 16 orang dengan bagi target 5 orang dengan persentase capaian kinerja 320%. Sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini :

$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah tenaga ahli yang disediakan}}{\text{Target}} \times 100\%$
$\% \text{ Capaian} = \frac{16 \text{ orang}}{5 \text{ orang}} \times 100\%$
$\% \text{ Capaian} = 320$

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana mencapai capaian kinerja 176,59%. Indikator kinerja persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana terdiri dari jumlah rata-rata dari persentase capaian indikator Jumlah pengadaan sarana dan prasarana (38,89%) dan pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan (314,29%) dibagi 2 diperoleh nilai 176,59%. Adapun persentase capaian pemenuhan Sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini :

$$\% \text{Capaian} = \frac{(\text{Jumlah pengadaan sarana dan prasarana/Target}) + (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara/target})}{2} \times 100$$

$$\% \text{Capaian} = \frac{[(14/36) + (22/7)] \times 100}{2}$$

$$\% \text{Capaian} = 176,59$$

Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia mencapai capaian kinerja 65,21%. Indikator kinerja Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia terdiri dari jumlah Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi (23 orang) dibagi target 15 orang ditambah Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi (74 orang) dibagi 175 orang dan ditambah Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya (0 orang) dibagi 35 orang kemudian hasil penjumlahan di bagi 3 dikali 100, sehingga diperoleh nilai capaian 65,21%. Sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini:

$$\% \text{Capaian} = \frac{(\text{Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi/target}) + (\text{Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi/target}) + (\text{Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya/target})}{3} \times 100$$

$$\% \text{Capaian} = \frac{[(23/15) + (74/175) + (0/35)]}{3} \times 100$$

$$\% \text{Capaian} = 65,21$$

Sasaran Strategis II yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD dengan capaian indikator kinerja sebagaimana penjelasan berikut.

Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya dengan capaian kinerja 102,48%. Indikator kinerja Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya terdiri dari Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 417 kali dibagi target 459 kali ditambah Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi 291 kali dibagi target 255 kali kemudian hasil penjumlahan dibagi 2 dan dikali 100 sehingga memperoleh nilai 102,48%. Sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini:

$$\% \text{Capaian} = \frac{(\text{Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/target}) + (\text{Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi/target})}{2} \times 100$$

$$\% \text{Capaian} = \frac{[(417/459) + (291/255)]}{2} \times 100$$

$$\% \text{Capaian} = 102,48$$

Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD dengan capaian kinerja 126% . Indikator kinerja Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD adalah Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose (63 kali) dibagi target (50 kali) dikali 100 dengan sehingga memperoleh nilai 126%, Sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini:

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \% \text{ Capaian} &= \frac{63}{50} \times 100 \\ \% \text{ Capaian} &= 126 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator kinerja di bagian Umum dan Hubungan masyarakat dengan rerata capaian dari 2 sasaran strategis sebesar 149,22% maka secara keseluruhan capaian kinerja terpenuhi dan melampaui target 100%. Untuk lebih jelasnya, keseluruhan capaian indikator kinerja Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 23. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	105,06%	105,06%
		2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	320%	320%
		3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100%	176,59%	176,59%
		4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	100%	65,21%	65,21%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolannya DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%	102,48%	102,48%
		2. Persentase penyebaran informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%	126%	126%
<b>Rerata Capaian Kinerja</b>				<b>149,22%</b>	<b>149,22%</b>

**Sumber : data diolah 2023**

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja

Capaian Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 dari 2 (dua) capaian indikator kinerja tahun 2023 menurun, dan 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya meningkat dan 1 (satu) indikator yang kinerjanya tetap/sama.

Sedangkan Capaian Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 ada 1 (satu) indikator kinerja menurun dan 1 (satu) indikator kinerja meningkat.

Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib pada tahun 2023 mencapai 105,06%, naik 4,83% dari tahun 2022 (100,23%). Hal ini terjadi karena Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani pada tahun 2023 bertambah dibandingkan jumlah di tahun 2022.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana mencapai 176,59% , turun 76,33% dibandingkan tahun 2022 (252,92%). Walaupun menurun dibandingkan tahun 2022, namun jumlah pengadaan dan jumlah pemeliharaan sarana prasarana telah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Dokumen pelaksanaan anggaranPerubahan (DPA-P) OPD tahun anggaran 2023. Perlu koreksi kedepannya dalam menetapkan Target indikator kinerja agar bersesuaian dengan program dan kegiatan.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD tahun 2022 dan tahun 2023 memiliki realisasi yang sama yaitu 320% dimana di target 5 orang dengan realisasi 16 orang tenaga ahli.

Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia hanya mencapai 65,21% menurun 2,16% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 67,37%. Penurunan capaian disebabkan karena Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya nihil, sehingga menyebabkan capaian rendah.

Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya mencapai 102,48%, menurun 73,52% dari capaian tahun 2022 sebesar 176%. Hal ini disebabkan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan menurun dibandingkan tahun 2022.

Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD mencapai 126%, meningkat 18,3% dibandingkan tahun 2022 sebesar 107,70%. Peningkatan nilai persentase disebabkan Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose meningkat dibandingkan tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya, perbandingan capaian indikator kinerja Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Akhir RENSTRA	
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	C
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	Persen	100	94,04	94,04	100	100,23	100,23	100	105,06	105,06	100	105,06
	2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	Persen	100	320	320,00	100	320	320,00	100	320	320,00	100	320,00
	3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	Persen	100	114,28	114,28	100	251,92	251,92	100	176,59	176,59	100	176,59
	4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Persen	100	66,29	66,29	100	67,37	67,37	100	65,21	65,21	100	65,21
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolanan DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	Persen	100	127,19	127,19	100	176	176,00	100	102,48	102,48	100	102,48
	2. Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	Persen	100	166	166,00	100	107,7	107,70	100	126	126,00	100	126,00

Sumber : data diolah 2023

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Akhir Periode Renstra

Capaian Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dibandingkan dengan Target Akhir Renstra yaitu dari 4 (empat) capaian indikator kinerja tahun 2023, 1 (satu) indikator dengan tingkat kemajuan bernilai minus, dan 3 (tiga) indikator yang tingkat kemajuannya bernilai plus.

Sedangkan Capaian Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD dibandingkan dengan Target Akhir Renstra, indikator kinerja dengan tingkat kemajuan bernilai plus.

Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib pada tahun 2023 mencapai 105,06%, dengan tingkat kemajuan 5,06 % dibandingkan dengan target Akhir Renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja memenuhi dan melampaui target akhir renstra.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana mencapai 176,59% , dengan tingkat kemajuan 76,59% dibandingkan dengan target Akhir Renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja memenuhi dan melampaui target akhir renstra.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD dengan capaian kinerja 320% dengan tingkat kemajuan 220% dibandingkan dengan target Akhir Renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja telah memenuhi dan melampaui target akhir renstra.

Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan capaian 65,21% dengan tingkat kemajuan -34,79% dibandingkan dengan target akhir renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja belum memenuhi target akhir renstra.

Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya mencapai 102,48%, dengan tingkat kemajuan 2,48% dibandingkan dengan target akhir renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja memenuhi dan melampaui target akhir renstra.

Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD mencapai 126%, dengan tingkat kemajuan 26% dibandingkan dengan target akhir renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja telah memenuhi dan melampaui target akhir renstra.

Untuk lebih jelasnya, perbandingan capaian indikator kinerja Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode Renstra Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	105,06%	5,06%
	2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	320,00%	220%
	3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100%	176,59%	76,59%
	4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	100%	65,21%	-34,79%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%	102,48%	2,48%
	2. Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%	126,00%	26%

**Sumber : data diolah 2023**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun perbandingan realisasi target kinerja tujuan/sasaran kinerja bagian umum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 dengan Capaian target 2023 terhadap target akhir renstra (%) sebagaimana di jelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 26. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 Dengan Capaian Target 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)**

Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Capaian target 2023 terhadap target akhir renstra (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,70%	94,04%	100,23%	105,06	105,06
	Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	320%	320%	320	320
	Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	114,28%	251,92%	176,59	176,59
	Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	89,00%	80,00%	66,29%	67,37%	65,21	65,21
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolanan DPRD	Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,25%	127,19%	176%	102,48	102,48
	Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	166%	107,70%	126	126

**Sumber: Data diolah 2023**

#### 4) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Keberhasilan Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat untuk kinerja 2023 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan.

Sasaran I yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dengan 4 (empat) indikator kinerja yang jelas dan terukur. Adapun penjelasan hasil analisis sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan terjadi karena jumlah dokumen administrasi dan kepegawaian yang terlayani meningkat.
2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD sama dengan tahun 2022. Pada tahun 2023 telah tersedia 8 (delapan) orang Tenaga ahli Alat kelengkapan dewan (AKD) dan 8 (delapan) orang Tenaga ahli fraksi.
3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana menurun ditahun 2023. Hal ini terjadi bukan karena turunnya pelayanan melainkan jumlah pengadaan yang tercantum di DPA TA.2023 untuk belanja modal lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Walaupun demikian pemenuhan layanan sarana prasarana sudah dapat dikatakan baik, karena telah melampaui target 2023
4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada tahun 2023 masih rendah dan bahkan turun dibandingkan tahun 2022. Hal ini terjadi karena kegiatan medical chek up untuk anggota DPRD tidak dapat terlaksana. Hal ini menjadi perhatian untuk bagian Umum dan Hubungan masyarakat agar lebih memperhatikan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan agar bisa berkesesuaian dengan kegiatan dan jadwal anggota DPRD.

Sasaran II yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dengan didukung 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya dan Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD.

Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya pada tahun 2023 dan Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD menurun dibandingkan tahun 2022, walaupun demikian melampaui target 2023. Pelayanan kehumasan dan keprotokolannya kegiatan DPRD meliputi penyiapan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi dibidang informasi dan pemberitaan, pengelolaan pengaduan, protokol dan dokumentasi.

Kegiatan penyebarluasan informasi /pemberitaan DPRD dilakukan diberbagai media cetak, media elektronik dan media online. Selain itu juga melakukan pemasangan spanduk, distribusi tabloid dan bulletin keberbagai pihak. Penambahan personil dibagian Humas pada tahun 2023 sebanyak 3 orang yaitu 2 orang PTT dan 1 orang PNS cukup berdampak pada peningkatan realisasi publikasi informasi dan pemberitaan DPRD.

## 5) Analisis Program Penunjang

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan dari 2 program dengan total anggaran Rp.7.632.896.121. Adapun program dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan/Material
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
  - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
1. Peningkatan Kapasitas DPRD
- Pendalaman Tugas DPRD
  - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Seluruh program/kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas ditujukan untuk mencapai 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator sebagaimana tercantum dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja indikator tersebut sebesar Rp.7.632.896.121.

Berdasarkan data tahun 2023 pada program kegiatan dan sub kegiatan di bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja tersebut terdapat efisiensi anggaran. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan dan kesesuaian dengan rencana kegiatan
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan di lingkup bagian Umum dan Hubungan Masyarakat dengan tetap mengacu pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Selain dari factor pendorong keberhasilan tersebut diatas, masih terdapat kekurangan didalam pencapaian kinerja organisasi karena masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target.

Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 (Rp. 60.812.728.170.-). Sebagaimana sesuai dengan rumusan dan formulasi perhitungan pada alokasi sasaran pembangunan dibawah ini:

$$\% \text{ Anggaran} = \frac{\text{Anggaran Indikator Kinerja}}{\text{Anggaran Total OPD}} \times 100\%$$

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 7.632.896.121 atau dengan kata lain alokasi anggaran sebesar 12,55% dari total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 untuk membiayai 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.

Lebih jelasnya alokasi persasaran pembangunan untuk eselon III (bagian umum dan hubungan masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada tabel berikut.

**Tabel 27 . Alokasi Persasaran Pembangunan Esselon III (Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	2.510.599.601	4,13%
		2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	660.000.000	1,09%
		3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	1.704.671.874	2,80%
		4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	2.214.996.000	3,64%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	542.628.646	0,89%
		2. Persentase penyebaran informasi/ pemberitaan penyelenggaraan DPRD		
<b>JUMLAH</b>			<b>7.632.896.121</b>	<b>12,55%</b>

*Sumber: data diolah 2023*

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran indikator kinerja dan persentase alokasi anggaran dari anggaran total masing-masing sebagai berikut:

1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib Rp. 2.510.599.601 dengan persentase anggaran total 4,13% mendukung capaian kinerja dengan realisasi 105,06% dan dapat dikatakan efisien dalam pencapaian kinerja.
2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD Rp. 660.000.000 dengan persentase anggaran total 1,09%, mendukung capaian kinerja dengan realisasi 320% dan dapat dikatakan sangat efisien dalam pencapaian kinerja.

3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana Rp.1.704.671.874, dengan persentase anggaran total 2,80%, mendukung capaian kinerja dengan realisasi 176,59% dan dapat dikatakan efisien dalam pencapaian kinerja.
4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia Rp.2.214.996.000, dengan persentase anggaran total 3,64%, mendukung capaian kinerja dengan realisasi 65,21% dan belum dapat dikatakan efisien dalam pencapaian kinerja.

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD dengan alokasi anggaran indikator kinerja dan persentase alokasi anggaran Rp.542.628.646 dengan persentase dari anggaran total 0.89% mendukung capaian kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya mendukung capaian kinerja 102,48% dan dapat dikatakan efisien dalam pencapaian kinerja
2. Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan tentang penyelenggaraan DPRD mendukung capaian kinerja 126% dan dapat dikatakan efisien dalam pencapaian kinerja.

Berikut tabel analisis penggunaan program/kegiatan atau sumberdaya yang menunjang pencapaian kinerja untuk tahun anggaran 2023 di bagian umum dan hubungan masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Tabel 28. Analisis Program (Sumberdaya) yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				nama Program	Keuangan		
		satuan	target	realisasi	capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	%	100%	105,06	105,06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	2.510.599.601	2.315.633.758	92,23%
	Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	%	100%	320	320	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	660.000.000	591.500.000	89,62%
	Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	%	100%	176,587302	176,59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	1.704.671.874	1.589.128.664	93,22%
	Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	%	100%	65,2063492	65,21	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	2.214.996.000	1.357.403.034	61,28%
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolannya DPRD	Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	%	100%	102,48366	102,48	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	542.628.646	452.575.760	83,40%
	Persentasi penyebaran informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	%	100%	126	126				

Sumber: Data diolah 2023

## 6. Analisis Pemanfaatan Sumberdaya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk tahun anggaran 2023 terhadap pencapaian target pada tabel berikut:

**Tabel 29. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Pencapaian Target Di Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	105,06%	92,23%	12,83%
	2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	320,00%	89,62%	230,38%
	3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	176,59%	93,22%	83,37%
	4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	65,21%	61,28%	3,93%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolannya DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	102,48%	83,40%	19,08%
	2. Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	126,00%	83,40%	42,60%

**Sumber: data diolah 2023**

Keterangan:

Capaian Kinerja : Realisasi indikator/target x 100%

Penyerapan anggaran: Realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator/pagu anggaran x 100%

Tingkat efisiensi : capaian kinerja-penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi yaitu Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD, Persentase

pemenuhan layanan sarana dan prasarana dan Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD.

Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terdapat satu indikator yang menunjukkan kurang efisiensi (efisiensi terendah) yaitu Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Indikator ini capaian kinerjanya tidak mencapai target, demikian juga dari sisi anggaran. Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran dianggap kurang optimal.

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya untuk tahun anggaran 2023 terhadap pencapaian target Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dengan persentase capaian kinerja 105,06%, persentase penyerapan anggaran 92,23% dengan persentase tingkat efisiensi 12,83% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.
- b) Indikator kinerja Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD dengan persentase capaian kinerja 320%, persentase penyerapan anggaran 89,62% dengan demikian persentase tingkat efisiensi 230,38% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.
- c) Indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana dengan persentase capaian kinerja 176,59%, persentase penyerapan anggaran 93,22% dengan demikian persentase tingkat efisiensi 83,37% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.
- d) Indikator kinerja Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan persentase capaian kinerja 65,21%, persentase penyerapan anggaran 61,28% dengan demikian persentase tingkat efisiensi 3,93% yang berarti cukup efisien dalam menggunakan sumberdaya namun belum efektif dalam pencapaian kinerja dan penggunaan alokasi sumberdaya.

Sedangkan sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD dengan Indikator kinerja Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya dengan persentase capaian kinerja 102,48% dan Persentase penyebaran informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD persentase capaian kinerja 126%, persentase penyerapan anggaran 83,40% dengan demikian persentase tingkat efisiensi masing-masing 19,08% dan 42,60% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.

Rasio efisiensi belanja Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebesar 82,62% yang diperoleh dari realisasi belanja Rp.6.306.241.216 dibagi anggaran belanja Rp. 7.632.896.121 di kali 100. Berdasarkan tabel tingkat efektifitas keuangan, maka Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dikatakan **Cukup efektif**.

**Tabel 30. Rasio Efisiensi Belanja Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD TA. 2023**

Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi	keterangan
7.632.896.121	6.306.241.216	82,62%	Cukup efektif

*Sumber: Data diolah 2023*

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat dalam pencapaian kinerjanya juga didukung Sumberdaya Manusia sebanyak 34 orang dengan rincian jumlah pegawai ASN sebanyak 12 orang termasuk didalamnya kepala bagian, Kepala sub bagian dan jabatan fungsional umum dan Pegawai tidak tetap (PTT) berjumlah 22 orang termasuk didalamnya petugas kebersihan dan penjaga malam.

### **3.1 Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian**

Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian adalah Jabatan Esselon IV yang mengampu 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja dari Kepala bagian Umum dan Hubungan Masyarakat. Adapun Sasaran dan indikator kinerja dimaksud sebagai berikut:

#### **Sasaran**

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi.

#### **Indikator Kinerja sasaran/program:**

- a) Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib;
  - Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani
- b) Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD;
  - Jumlah tenaga ahli yang disediakan
- c) Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
  - Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi
  - Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi
  - Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya

Adapun analisis capaian kinerja persasaran strategis Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Perbandingan Realisasi Dengan Target**

Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dengan capaian indikator kinerja sebagaimana penjelasan berikut.

Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib pada tahun 2023 mencapai capaian kinerja 105,06%. Adapun persentase capaian kinerja diperoleh dari pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian berupa 2.698 dokumen dibagi target 2.568 dokumen dikali 100% sehingga diperoleh nilai 105,06%.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD mencapai kinerja 320%. Indikator kinerja Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD adalah jumlah tenaga ahli DPRD 16 orang dengan bagi target 5 orang dengan persentase capaian kinerja 320%.

Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia mencapai capaian kinerja 65,21%. Indikator kinerja Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia terdiri dari:

1. Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi 23 orang dibagi target 15 orang dengan persentase capaian kinerja 153,33%.
2. Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi 74 orang dibagi 175 orang dengan persentase capaian kinerja 42,29%.
3. Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya nihil realisasi dibagi 35 orang dengan persentase capaian kinerja nihil.

Untuk lebih jelasnya, keseluruhan capaian indikator kinerja Esselon IV Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 31. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon IV Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	<b>1 Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib</b>	<b>100%</b>	<b>105,06%</b>	<b>105,06%</b>
	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2568 dokumen	2698 dokumen	105,06
	<b>2 Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>320%</b>	<b>320%</b>
	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 org	16 org	320
	<b>3 Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia</b>	<b>100%</b>	<b>65,21%</b>	<b>65,21%</b>
	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 org	23 org	153,33
	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 org	74 org	42,29
	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 org	-	0,00
<b>RERATA CAPAIAN</b>				<b>163,22%</b>

Sumber: data diolah 2023

### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Capaian Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022, satu capaian indikator kinerja menurun, yaitu persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib pada tahun 2023 mencapai 105,06%, naik 4,83% dari tahun 2022 (100,23%). Hal ini terjadi karena Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani pada tahun 2023 bertambah dibandingkan jumlah di tahun 2022.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD tahun 2022 dan tahun 2023 memiliki realisasi yang sama yaitu 320% dimana di target 5 orang dengan realisasi 16 orang tenaga ahli.

Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia hanya mencapai 65,21% menurun 2,16% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 67,37%. Penurunan capaian disebabkan karena Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya nihil, sehingga menyebabkan capaian rendah.

Untuk lebih jelasnya, perbandingan capaian indikator kinerja Esselon IV Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Kasubag Tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	target	Realisasi	
			Th.2022 (n-1)	Th.2023 (n)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	<b>1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib</b>	100%	100,23%	105,06%
	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2568 dokumen	2574 dokumen	2698 dokumen
	<b>2. persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD</b>	100%	320%	320%
	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 org	16 org	16 org
	<b>3. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia</b>	100%	67,37%	65,21%
	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 org	16 org	23 org
	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 org	117 org	74 org
	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 org	32 org	0 org
<b>RERATA CAPAIAN</b>			<b>162,53%</b>	<b>163,22%</b>

Sumber : data diolah 2023

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Akhir Periode Renstra

Capaian Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dibandingkan dengan Target Akhir Renstra yaitu dari 3 capaian indikator kinerja tahun 2023, 1 (satu) indikator dengan tingkat kemajuan bernilai minus, dan 2 indikator yang tingkat kemajuannya bernilai plus.

Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib pada tahun 2023 mencapai 105,06%, dengan tingkat kemajuan 5,06 % dibandingkan dengan target Akhir Renstra 100%. Hal ini didukung oleh realisasi indikator kinerja program Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani 2.698 dokumen dengan tingkat kemajuan 130 dokumen dibandingkan dengan target akhir renstra 2.568 dokumen. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja memenuhi dan melampaui target akhir renstra.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD dengan capaian kinerja 320% dengan tingkat kemajuan 220% dibandingkan dengan target Akhir Renstra 100%. Hal ini didukung oleh realisasi indikator kinerja program Jumlah tenaga ahli yang disediakan 16 orang dengan tingkat kemajuan 11 orang dibandingkan dengan target akhir renstra 5 orang. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja telah memenuhi dan melampaui target akhir renstra.

Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan capaian 65,21% dengan tingkat kemajuan -34,79% dibandingkan dengan target akhir renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja belum memenuhi target akhir renstra. Adapun realisasi indikator kinerja program yang mendukung sebagai berikut:

1. Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi 23 orang dengan tingkat kemajuan 8 orang dibandingkan dengan target akhir renstra 15 orang;
2. Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi 74 orang dengan tingkat kemajuan -101 orang dibandingkan dengan target akhir renstra 175 orang;

3. Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi 0 orang dengan tingkat kemajuan -35 orang. dibandingkan dengan target akhir renstra 35 orang

Untuk lebih jelasnya, perbandingan capaian indikator Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode Renstra Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	<b>1 Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib</b>	<b>100%</b>	<b>105,06%</b>	<b>5,06%</b>
	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2568 dokumen	2698 dokumen	130 dokumen
	<b>2 Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>320,00%</b>	<b>220%</b>
	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 org	16 org	11 org
	<b>3 Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia</b>	<b>100%</b>	<b>65,21%</b>	<b>-34,79%</b>
	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 org	23 org	8 org
	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 org	74 org	-101 org
	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 org	0 org	-35 org

Sumber : data diolah 2023

Adapun perbandingan realisasi target kinerja tujuan/sasaran kinerja Subbag Tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 dengan Capaian target 2023 terhadap target akhir renstra (%) sebagaimana di jelaskan dalam tabel berikut:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Tabel 34. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Subbag Tatausaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 Dengan Capaian Target 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)**

Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Capaian target 2023 terhadap target akhir renstra (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	<b>Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,70%	94,04%	100,23%	105,06	105,06
	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2568 dokumen	2568 dokumen	2568 dokumen	2568 dokumen	2568 dokumen	2639 dokumen	2432 dokumen	2415 dokumen	2574 dokumen	2698 dokumen	105,06%
	<b>Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	320%	320%	320	320
	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	3 orang	4 orang	16 orang	16 orang	16 orang	320%
	<b>Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia</b>	100%	100%	100%	100%	100%	89,00%	80,00%	66,29%	67,37%	65,21%	65,21%
	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	11 orang	12 orang	15 orang	11 orang	23 orang	153,33%
	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 orang	175 orang	175 orang	175 orang	175 orang	210 orang	33 orang	57 orang	117 orang	74 orang	42,29%
	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	33 orang	0 orang	32 orang	32 orang	0 orang	0%

Sumber: Data diolah 2023

#### **4. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Keberhasilan subbag Tatausaha dan kepegawaian untuk kinerja 2023 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan. Sasaran I yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dengan 3 indikator kinerja yang jelas dan terukur. Adapun penjelasan hasil analisis sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan terjadi karena jumlah dokumen administrasi dan kepegawaian yang terlayani meningkat.
2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD sama dengan tahun 2022. Pada tahun 2023 telah tersedia 8 (delapan) orang Tenaga ahli Alat kelengkapan dewan (AKD) dan 8 (delapan) orang Tenaga ahli fraksi.
3. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada tahun 2023 masih rendah dan bahkan turun dibandingkan tahun 2022. Hal ini terjadi karena kegiatan medical check up untuk anggota DPRD tidak dapat terlaksana. Hal ini menjadi perhatian untuk bagian Umum dan Hubungan masyarakat agar lebih memperhatikan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan agar bisa berkesesuaian dengan kegiatan dan jadwal anggota DPRD.

## 5. Analisis Program Penunjang

Subbagian Tatausaha dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan dari 2 program dengan total anggaran Rp.5.385.595.601.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan/Material
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  4. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
    - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
  1. Peningkatan Kapasitas DPRD
    - Pendalaman Tugas DPRD
    - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
    - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Seluruh program/kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas ditujukan untuk mencapai 1 sasaran dan 4 indikator sebagaimana tercantum dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja indikator tersebut sebesar Rp.5.385.595.601.

Subbagian Tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.5.385.595.601, terealisasi sebesar Rp.4.264.536.792 atau 79,18%. Dari ketiga indikator kinerja dan 5 indikator kinerja program diperoleh rerata persentase capaian kinerja 81,71%. Dengan demikian dilihat dari persentase efisiensi sebesar 2,54%

**Tabel 35. Alokasi Persasaran Pembangunan Esselon IV Subbag Tatausaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	<b>1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib</b>	<b>2.510.599.601</b>	<b>4,13%</b>
		Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.510.599.601	4,13%
		<b>2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD</b>	<b>660.000.000</b>	<b>1,09%</b>
		Jumlah tenaga ahli yang disediakan	660.000.000	1,09%
		<b>4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia</b>	<b>2.214.996.000</b>	<b>3,64%</b>
		Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	294.000.000	0,48%
		Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	1.777.000.000	2,92%
		Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	143.996.000	0,24%
<b>JUMLAH</b>			<b>5.385.595.601</b>	<b>8,86%</b>

Sumber: data diolah 2023

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran indikator kinerja program dan persentase alokasi anggaran program dari anggaran total masing-masing sebagai berikut:

1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib terdiri dari indikator kinerja program Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani dengan alokasi anggaran Rp.2.510.599.601 dengan persentase anggaran total 4,13% mendukung capaian kinerja dengan realisasi 105,06% dan dapat dikatakan efisien dalam pencapaian kinerja.
2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD terdiri dari indikator kinerja program Jumlah tenaga ahli yang disediakan dengan alokasi anggaran Rp. 660.000.000 dengan persentase anggaran total 1,09%, mendukung capaian kinerja dengan realisasi 320% dan dapat dikatakan sangat efisien dalam pencapaian kinerja.
3. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia terdiri dari indikator kinerja program sebagai berikut:
  - a. Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi dengan alokasi anggaran Rp 294.000.000, dengan persentase anggaran total 0,48%,mendukung capaian kinerja dengan realisasi153,33% dan dapat dikatakan efisien dalam pencapaian kinerja.
  - b. Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi dengan alokasi anggaran Rp.1.777.000.000 dengan persentase anggaran total 2,92% mendukung capaian kinerja dengan realisasi 42,29% dan dapat dikatakan kurang efisien dalam pencapaian kinerja.
  - c. Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya dengan alokasi anggaran Rp.143.996.000 dengan persentase anggaran total 0,24% mendukung capaian kinerja dengan realisasi nihil dan dapat dikatakan sangat tidak efisien dalam pencapaian kinerja.

Berikut tabel analisis penggunaan program/kegiatan atau sumberdaya yang menunjang pencapaian kinerja untuk tahun anggaran 2023 di subbagian tatausaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**Tabel 36. Analisis Program (Sumberdaya) yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Subbagian Tatausaha dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			capaian (%)	nama Program	Keuangan		
		satuan	target	realisasi			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	<b>Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib</b>	%	100%	105,06	105,06	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota</b>	2.510.599.601	2.315.633.758	92,23%
	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	dokumen	2568	2698	105,06%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	2.510.599.601	2.315.633.758	92,23%
	<b>Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD</b>	%	100%	320	320	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	660.000.000	591.500.000	89,62%
	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	orang	5	16	320%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	660.000.000	591.500.000	89,62%
	<b>Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia</b>	%	100%	65,2063492	65,21	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota</b>	2.214.996.000	1.357.403.034	61,28%
	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	orang	15	23	153,33%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	294.000.000	242.394.797	82,45%
	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	orang	175	74	42,29%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1.777.000.000	1.115.008.237	62,75%
	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	orang	35	0	0,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	143.996.000	-	0,00%

Sumber: Data diolah 2023

## 6. Analisis Pemanfaatan Sumberdaya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk tahun anggaran 2023 terhadap pencapaian target pada tabel berikut:

**Tabel 37. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian target di Subbagian Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	<b>1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib</b>	<b>105,06</b>	<b>92,23</b>	<b>12,83</b>
		Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	105,06	92,23	12,83
		<b>2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD</b>	<b>320,00</b>	<b>89,62</b>	<b>230,38</b>
		Jumlah tenaga ahli yang disediakan	320	89,62	230,38
		<b>3. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia</b>	<b>65,21</b>	<b>61,28</b>	<b>3,92</b>
		Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	153,33	82,45	70,89
		Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	42,29	62,75	-20,49
		Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	0,00	0,00	0,00

**Sumber: data diolah 2023**

Keterangan:

Capaian Kinerja : Realisasi indikator/target x 100%

Penyerapan anggaran: Realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator/pagu anggaran x 100%

Tingkat efisiensi : capaian kinerja-penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Subbagian tatausaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian baik yang terlihat dari pencapaian 2 indikator diatas 100% dan 1 indikator dibawah 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi yaitu Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD,

Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terdapat satu indikator yang menunjukkan kurang efisiensi (efisiensi terendah) yaitu Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Indikator ini capaian kinerjanya tidak mencapai target, demikian juga dari sisi anggaran. Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran dianggap kurang optimal.

Indikator kinerja program pada indikator Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi memiliki nilai efisiensi minus. Hal ini terjadi karena biaya petugas pendamping bimtek dari sekretariat digabung di biaya perjalanan dinas pendalaman tugas DPRD sehingga mempengaruhi perbandingan output kegiatan dengan output anggaran. Selain itu, indikator kinerja program Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya tidak terlaksana baik dari segi capaian kinerja maupun dari kinerja anggaran.

Subbagian tatausaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran diketahui efisiensi penggunaan anggaran (sumberdaya) terhadap pencapaian target kinerja sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dengan indikator kinerja program Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani memiliki persentase capaian kinerja 105,06%, persentase penyerapan anggaran 92,23% dengan persentase tingkat efisiensi 12,83% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.

- b) Indikator kinerja Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD dengan indikator kinerja program Jumlah tenaga ahli yang disediakan dengan persentase capaian kinerja 320%, persentase penyerapan anggaran 89,62% dengan demikian persentase tingkat efisiensi 230,38% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.
- c) Indikator kinerja Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia didukung indikator kinerja program Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi, Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi dan Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan dengan persentase capaian kinerja 65,21%, persentase penyerapan anggaran 61,28% dengan demikian persentase tingkat efisiensi 3,93% yang berarti cukup efisien dalam menggunakan sumberdaya namun belum efektif dalam pencapaian kinerja dan penggunaan alokasi sumberdaya.

Untuk lebih jelasnya Efisiensi penggunaan Sumberdaya pada Eselon IV subbagian tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 38. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Esselon IV subbagian tatausaha dan kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan sasaran dan indikator kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	105,06	92,23	12,83
		2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	320,00	89,62	230,38
		3. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	65,21	61,28	3,92

Rasio efisensi belanja sub bagian Tatausaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebesar 81,71% yang diperoleh dari realisasi belanja Rp.4.264.536.792 di bagi anggaran belanja Rp. 5.385.595.601 di kali 100. Berdasarkan tabel tingkat efektifitas keuangan, maka sub bagian Tatausaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dikatakan **Cukup Efektif**.

**Tabel 39. Rasio Efisensi Belanja Sub bagian Tatausaha dan Kepegaawaian DPRD Sekretariat DPRD TA. 2023**

Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisensi	keterangan
5.385.595.601	4.264.536.792	81,71%	Cukup efektif

*Sumber: Data diolah 2023*

sub bagian Tatausaha dan Kepegawaian dalam pencapaian kinerjanya juga didukung Sumberdaya Manusia sebanyak 8 orang dengan rincian jumlah pegawai ASN sebanyak 4 orang termasuk didalamnya Kepala sub bagian dan jabatan fungsional umum dan Pegawai tidak tetap (PTT) berjumlah 4 orang.

#### 4. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan adalah Jabatan Esselon III yang mengampu 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Adapun Sasaran dan indikator kinerja dimaksud sebagai berikut:

**Sasaran**

Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.

**Indikator Kinerja :**

1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD;

Adapun analisis capaian kinerja persasaran strategis Bagian Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

**1) Perbandingan Realisasi dengan Target**

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dengan capaian indikator kinerja BB (79,3) atau 100% dari target BB pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, keseluruhan capaian indikator kinerja Kepala bagian keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 40. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon III (Bagian Keuangan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (sangat Baik)	BB (79,3%)	100%

Sumber: data diolah 2023

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dengan capaian indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dari segi nilai turun 0,2 point, namun dari segi pencapaian target nilai BB telah terpenuhi, karena nilai 79,3 masih dalam rentang nilai BB (70-80) dengan katagori pencapaian **sangat Baik**.

Untuk lebih jelasnya, perbandingan capaian indikator kinerja eselon III Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Eselon III Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	target	Realisasi %	
			Th.2022 (n-1)	Th.2023 (n)
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (sangat Baik)	BB 79,5	BB 79,3

*Sumber : data diolah 2023*

Realisasi nilai SAKIP Tahun 2023 sekretariat DPRD Kabupaten Dibandingkan dengan Nilai SAKIP Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut 67,52, dibandingkan dengan realisasi nilai SAKIP Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut 79,3 masih diatas nilai Kabupaten. Namun bila dibandingkan dengan Nilai SAKIP Propinsi Kalimantan Selatan 2023 sebesar 81,21, maka nilai SAKIP Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut masih bawah propinsi 1,91 point. Berikut ini perbandingan nilai SAKIP Sekretariat DPRD dengan Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut dan beberapa kabupaten lainnya.

**Tabel 42. Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III Kabag Keuangan Tahun 2023 dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan beberapa Kabupaten**

Indikator kinerja	Realisasi			
	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Prov. Kalimantan Selatan
Nilai SAKIP Tahun 2023	66,04	68,10	67,52	81,21

*Sumber: data diperoleh dari rekapitulasi Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023*

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dengan capaian indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai 100%, sebagaimana target nilai SAKIP BB telah terpenuhi, walaupun terjadi penurunan nilai sebesar 0,2 point dibandingkan tahun sebelumnya, namun rentang nilai SAKIP masih dalam rentang nilai BB.

Perbandingan Nilai SAKIP tiga Tahun terakhir 2021 ssd. 2023 dengan nilai akhir renstra, maka Target Akhir Renstra sudah terpenuhi dan nilai semakin meningkat Untuk lebih jelasnya perbandingan capaian indikator kinerja Esselon III kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 43. Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III (Bagian Keuangan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dan target akhir Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Akhir RENSTRA	
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	C
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	BB	BB (77,89)	BB	BB	BB (79,5)	BB	BB	BB (79,3)	BB	BB	BB

#### 4) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan tabel Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon III (Bagian Keuangan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- Tercapai capaian kinerja nilai SAKIP dengan nilai BB, dengan demikian persentase realisasi terhadap target 100%, maka target tahun 2023 tercapai
- Dibandingkan realisasi dengan tahun 2022, berdasarkan target BB maka target sama-sama terpenuhi. Namun dari segi nilai terjadi penurunan sebesar 0,2 point.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran berhasil tercapai.
- Peningkatan / penurunan capaian kinerja disebabkan oleh:
  - a) Dari segi pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian target kinerja belum dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan pencapaian kinerja.
  - b) Dari segi Pelaporan kinerja, belum menginformasikan penggunaan sumberdaya pada setiap pencapaian target kinerja, pelaporan kinerja juga belum menyajikan efisiensi penggunaan anggaran dikaitkan dengan pencapaian target kinerja.
  - c) Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, agar ditingkatkan kualitas SDM yang memadai dengan menyertakan Tim penyusun mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP.

### **5) Analisis Program Penunjang**

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan total anggaran Rp.28.141.963.211. Adapun program dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  3. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
    - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Seluruh program/kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan sebagaimana tercantum dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja indikator tersebut sebesar Rp.28.141.963.211 dengan realisasi Rp. 25.320.292.628 (89,98%).

Lebih jelasnya alokasi persasaran pembangunan untuk eselon III (bagian Keuangan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada tabel berikut.

**Tabel 44. Alokasi Persasaran Pembangunan Esselon III (Bagian Keuangan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>% Anggaran</b>
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	28.141.963.211	46%

*Sumber: data diolah 2023*

Untuk analisis penggunaan program/kegiatan atau sumberdaya yang menunjang pencapaian kinerja untuk tahun anggaran 2023 di bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut, dimana indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD didukung anggaran sebesar Rp. 28.141.963.211 dengan persentase anggaran Total OPD 46%, mendukung capaian kinerja dengan realisasi 100% dan dapat dikatakan efisien dalam pencapaian kinerja .

Berikut tabel analisis penggunaan program/kegiatan atau sumberdaya yang menunjang pencapaian kinerja untuk tahun anggaran 2023 di bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 45. Analisis Program (Sumberdaya) yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Bagian Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			capaian (%)	nama Program	Keuangan		
		satuan	target	realisasi			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	nilai	BB	BB (79,3)	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	22.551.352.156	20.361.393.625	90,29

*Sumber: data diolah 2023*

## 6) Analisis Pemanfaatan Sumberdaya

Berikut disampaikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya untuk tahun anggaran 2023 terhadap pencapaian target pada tabel berikut:

**Tabel 46. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Pencapaian Target Di Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	100	89,98	10,02

**Sumber: data diolah 2023**

Keterangan:

Capaian Kinerja : Realisasi indikator/target x 100%

Penyerapan anggaran: Realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator/pagu anggaran x 100%

Tingkat efisiensi : capaian kinerja-penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bagian keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator 100% dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 pada sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dengan persentase capaian 100%, persentase penyerapan anggaran 89,98% dengan persentase tingkat efisiensi 10,02% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.

Rasio efisiensi belanja Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebesar 89,98% yang diperoleh dari realisasi belanja Rp.25.322.142.628 dibagi anggaran belanja Rp 28.141.963.211 di kali 100. Berdasarkan tabel tingkat efektifitas keuangan, maka Bagian keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dikatakan **Cukup efektif**.

**Tabel 47. Rasio Efisiensi Belanja Bagian Keuangan Sekretariat DPRD TA. 2023**

<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>	<b>keterangan</b>
28.141.963.211	25.322.142.628	89,98%	Cukup Efektif

*Sumber: Data diolah 2023*

Bagian keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di dukung Sumberdaya manusia sebanyak 16 orang yang terdiri dari 10 orang ASN termasuk Kepala Bagian, Kasubag, pejabat Fungsional dan JFU serta 6 orang PTT. Kedepannya diharapkan semua jabatan yang ada dalam peta jabatan di bagian keuangan dapat terpenuhi sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja pada sub bagian tertentu.

#### 4.1 Kasubbag Perencanaan dan Anggaran

Kasubbag Perencanaan dan anggaran adalah jabatan eselon IV yang mengampu 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja dari Kepala bagian Keuangan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dimaksud sebagai berikut:

##### **Sasaran**

Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan

##### **Indikator Kinerja sasaran/program:**

- a) Nilai SAKIP Sekretariat DPRD;
  - Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

Adapun analisis capaian kinerja persasaran strategis Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1) Perbandingan Realisasi dengan Target**

Realisasi indikator kinerja kasubbag Perencanaan dan anggaran tahun 2023 yaitu Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD terealisasi 6 dokumen dari target 6 dokumen, tercapai kinerja 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 48 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon IV Sub bagian Perencanaan dan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	1 Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (sangat Baik)	BB 79,3%	100%
	- Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100

**Sumber: data diolah 2023**

**2) Perbandingan Realisasi Kinerja**

Persentase realisasi indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada perbedaan realisasi. Pada tahun 2022 terealisasi 7 dokumen dari target 6 dokumen (116,7%) sedangkan pada tahun 2023 terealisasi target 6 dokumen dan target 6 dokumen. Realisasi 2023 sama dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 yaitu 6 dokumen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 49. Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon IV Kasubbag Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Indikator kinerja	target	Realisasi %	
		Th.2022 (n-1)	Th.2023 (n)
Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6 dokumen	116,7	100

*Sumber : data diolah 2023*

**3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Akhir Periode Renstra**

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tahun 2023 mencapai 100% dari target sebanding dengan target akhir renstra . Adapun lebih jelasnya , perbandingan capaian indikator kinerja Esselon IV Kasubbag Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 50. perbandingan capaian indikator kinerja Esselon IV Kasubbag Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Akhir RENSTRA	
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	C
Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	dokumen	6	6	100	6	7	116,67	6	6	100	6	100

*Sumber: data diolah 2023*

#### 4) Analisis peningkatan dan penurunan kinerja

Berdasarkan tabel Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon IV Kasubbag Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- Tercapai capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 6 dokumen dengan demikian persentase realisasi terhadap target 100%, maka target tahun 2023 tercapai.
- Dibandingkan realisasi dengan tahun 2022, terjadi penurunan realisasi sebesar 16,7%.
- Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran berhasil tercapai.
- Peningkatan / penurunan capaian kinerja disebabkan oleh dokumen perencanaan yang tersedia di 2023 6 dokumen yaitu Dokumen Renja 2024, dokumen renja perubahan 2023, DPA 2023 dan DPA perubahan 2023, Penetapan Kinerja (PK) 2023, Rencana Anggaran Kas (RAK) 2023, RKA 2023 dan RKA Perubahan 2023, dan RPD 2024-2026. Sedangkan tahun 2022 ada 7 dokumen termasuk didalamnya rencana aksi anggaran 2023.

#### 5) Analisis Program penunjang

Subbagian Perencanaan dan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 39.715.449. Adapun program dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

program/kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas ditujukan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara

langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja indikator Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 6 dokumen tersebut sebesar Rp.39.715.449 atau 0,07% dari total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023.

**Tabel 51. Alokasi Persasaran Pembangunan Esselon IV Subbag Perencanaan dan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran	39.715.449	0,07%

*Sumber: data diolah 2023*

Dengan anggaran sebesar Rp.39.715.449, terealisasi Rp.24.903.000 dengan persentase keuangan 62,70% dengan persentase capaian indikator kinerja 100%, maka dengan demikian dilihat dari persentase efisiensi sebesar 37,30%.

Berikut tabel analisis penggunaan program/kegiatan atau sumberdaya yang menunjang pencapaian kinerja untuk tahun anggaran 2023 di subbagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 52. Analisis Program (Sumberdaya) yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Subbagian Perencanaan dan Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Tahun 2023			capaian (%)	Nama Program	Keuangan		
	satuan	target	realisasi			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran	dokumen	6	6	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota	39.715.449	24.903.000	62,70

*Sumber: data diolah 2023*

**6. Analisis Pemanfaatan Sumberdaya**

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk tahun anggaran 2023 terhadap perencanaan target pada tabel berikut:

**Tabel 53. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian target di Subbagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran	100%	62,70%	37,30%

**Sumber: data diolah 2023**

Keterangan:

- Capaian Kinerja : Realisasi indikator/target x 100%
- Penyerapan anggaran : Realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator/pagu anggaran x 100%
- Tingkat efisiensi : capaian kinerja-penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel tersebut diatas, subbagian perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian baik yang terlihat dari pencapaian indikator kinerja 100% dengan persentase penyerapan anggaran 62,70% dengan tingkat efisiensi 37,30% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya dalam mencapai capaian kinerja.

Rasio efisiensi belanja sebesar 62,70%, berdasarkan tabel efektifitas keuangan berada dalam range efektifitas 60%-79% maka Sub bagian perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dikatakan ***kurang efektif***.

**Tabel 54. Rasio Efisiensi Belanja Subbagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD TA. 2023**

Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi	keterangan
39.715.449	24.903.000	62,70%	Kurang Efektif

**Sumber: Data diolah 2023**

## 5. Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD adalah Jabatan Esselon III yang mengampu 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Adapun Sasaran dan indikator kinerja dimaksud sebagai berikut:

### **Sasaran**

Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD.

### **Indikator Kinerja :**

1. Persentase rapat yang difasilitasi;
2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda
3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi
4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan

Adapun analisis capaian kinerja persasaran strategis Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1) Perbandingan Realisasi dengan Target**

Sasaran Strategis Meningkatkan fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD dengan capaian indikator kinerja sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Persentase rapat yang difasilitasi pada tahun 2023 mencapai capaian kinerja 111,96%. Persentase Indikator kinerja ini diperoleh dari rata-rata dari persentase capaian indikator Jumlah Rapat yang difasilitasi (114,12%) ditambah Jumlah hering/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi (100%), dan Jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan (121,77%) dibagi 3 diperoleh nilai 114,12%. Adapun persentase capaian pemenuhan sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(\text{Jumlah Rapat yang difasilitasi/target}) + (\text{Jumlah hering/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi/target}) + (\text{Jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan/target})}{3} \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{[(291/255) + (4/4) + (1773/1456)]}{3} \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = 111,96$$

b. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda

Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda mencapai capaian kinerja 83,33%. Indikator kinerja terdiri dari jumlah rata-rata persentase capaian indikator Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi (66,67%), ditambah Jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu (100%) dibagi 2 diperoleh nilai 83,33%. Adapun persentase capaian pemenuhan Sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini :

$$\% \text{Capaian} = \frac{(\text{Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi /Target}) + (\text{Jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu /target})}{2} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{[(10/15) + (3/3)]}{2} \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = 83,33$$

c. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi

Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi mencapai capaian kinerja 66,67%. Persentase capaian kinerja adalah jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi (4) dibagi target (6) dikali 100, diperoleh nilai 66,67%. Sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{4}{6} \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = 66,67$$

d. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan

Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan mencapai capaian kinerja 100%. Persentase capaian kinerja adalah jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan (3 kali) dibagi target (3 kali) diperoleh nilai 100%. Sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan pada capaian sasaran dibawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = 100$$

Untuk lebih jelasnya, keseluruhan capaian indikator kinerja Kepala bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 55. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon III (Bagian fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	100	111,96	111,96
	2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	100	83,33	83,33
	3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100	66,67	66,67
	4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100	100,00	100,00
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>90,49</b>

*Sumber: data diolah 2023*

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dari 4 (empat) indikator kinerja 3 indikator meningkat dan 1 indikator menurun. Yaitu capaian indikator persentase rapat yang difasilitasi meningkat 4,96% dibandingkan tahun 2022, persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda meningkat 16,33%, persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi menurun 0,33% dan persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan sama dengan tahun 2022. Namun secara keseluruhan nilai capaian meningkat ditahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya, perbandingan capaian indikator kinerja eselon III Bagian Fasilitasi dan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja Eselon III Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	target	Realisasi %	
			Th.2022 (n-1)	Th.2023 (n)
Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	100%	107%	111,96
	2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	100%	67%	83,33
	3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	67%	66,67
	4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100,00

**Sumber : data diolah 2023**

perbandingan capaian indikator kinerja eselon III Bagian Fasilitasi dan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021-2023 sebagai berikut:

**Tabel 57. Perbandingan Realisasi Kinerja Esselon III Bagian Fasilitasi dan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Akhir RENSTRA	
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	C
Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	Persen	100	131,76	131,76	100	106,67	106,67	100	111,96	111,96	100	111,96
	2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	Persen	100	71,05	71,05	100	66,67	66,67	100	83,33	83,33	100	83,33
	3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	Persen	100	100	100,00	100	67	67,00	100	66,67	66,67	100	66,67
	4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan capaian indikator kinerja eselon III Kepala bagian Fasilitasi dan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode Renstra Eselon III Fasilitasi dan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat kemajuan
Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	100%	111,96%	11,96%
	2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	100%	83,33%	-16,67%
	3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	66,67%	-33,33%
	4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100,%	0 %

*Sumber: Data diolah 2023*

Dari tabel tersebut diatas, capaian kinerja 2023 dibandingkan target akhir renstra ternyata masih ada 2 indikator yang dibawah target renstra yaitu Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda dan Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi.

Persentase rapat yang difasilitasi mencapai capaian kinerja 111,96% dengan tingkat kemajuan 11,96% dibandingkan dengan target akhir renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja telah memenuhi an melampaui target akhir renstra.

Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda mencapai capaian kinerja 83,33% dengan tingkat kemajuan -16,67% dibandingkan target akhir renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja tidak memenuhi target akhir renstra.

Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi mencapai capaian kinerja 66,67% dengan tingkat kemajuan -33,33% dibandingkan target akhir renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja tidak memenuhi target akhir renstra.

Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan mencapai capaian kinerja 100% dengan tingkat kemajuan 0% dibandingkan dengan target akhir renstra 100%. Ini menyatakan bahwa indikator kinerja telah memenuhi target akhir renstra.

Adapun perbandingan realisasi target kinerja tujuan/sasaran kinerja bagian fasilitasi dan tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 dengan Capaian target 2023 terhadap target akhir renstra (%) sebagaimana di jelaskan dalam tabel berikut

**Tabel 59. Perbandingan Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi dan Tugas DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023 Dengan Capaian Target 2023 Terhadap Target Akhir Renstra (%)**

Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Capaian target 2023 terhadap target akhir renstra (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97,25%	131,76%	106,67%	111,96	111,96
	Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	127%	100%	71,05%	66,67%	83,33	83,33
	Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%	67%	66,67	66,67
	Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00

Sumber : data diolah 2023

#### 4) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan tabel Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Esselon III Fasilitasi dan Tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- a) Sasaran Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD terdiri dari 4 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:
  - Persentasi Rapat yang difasilitasi tercapai 111,96% dengan demikian persentase realiasi terhadap target 100%, maka target tahun 2023 tercapai dan melampaui target.
  - Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda tercapai 83,33% dengan demikian persentase realiasi terhadap target 100%, maka target tahun 2023 belum tercapai .
  - Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi tercapai 66,67% dengan demikian persentase realiasi terhadap target 100%, maka target tahun 2023 belum tercapai.
  - Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan tercapai 100% dengan demikian persentase realiasi terhadap target 100%, maka target tahun 2023 tercapai.
- b) Dibandingkan realisasi dengan tahun 2022, ada kenaikan dan penurunan capaian indikator sebagai berikut:
  - Persentasi Rapat yang difasilitasi terdapat kenaikan 4,96%
  - Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda terdapat kenaikan 16,33%.
  - Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi menurun 0,33%.
  - Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan sama/tetap.
- c) Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dari rerata persentase ke-4 indikator kinerja (111,96%+83,33%+67%+100%) dibagi 4 diperoleh nilai 90,49% diproyeksikan sasaran tahun 2023 belum tercapai.

- d) Peningkatan / penurunan capaian kinerja disebabkan oleh:
  - a) Pada saat penjadwalan bahan acara oleh Badan Musyawarah tergantung kesiapan materi dari Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD dan adanya perbedaan persepsi dalam pemahaman atas setiap pembahasan materi sehingga mundurnya pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan pembahasan pansus. Hal ini sangat mempengaruhi capaian fasilitasi pembahasan raperda.
  - b) Perubahan kondisi atau kebutuhan yang mendorong perlunya koordinasi dan konsultasi mengakibatkan terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ada.
  - c) Keterlambatan dalam penyelesaian pembahasan raperda.

#### **5) Analisis Program Penunjang**

Bagian Fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran Rp.25.037.868.838. Adapun program dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1. Layanan Administrasi DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
    - Fasilitasi Fraksi DPRD
    - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- b. Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
  - 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
    - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
    - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
    - Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan
  - 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
    - Pembahasan APBD

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - Pelaksanaan Reses
5. Fasilitasi Tugas DPRD
  - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Seluruh program/kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas ditujukan untuk mencapai sasaran Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD sebagaimana tercantum dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut periode 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja indikator tersebut sebesar Rp.25.037.868.838 dengan realisasi Rp.21.702.320.501 (86,68%).

Lebih jelasnya alokasi persasaran pembangunan untuk eselon III bagian fasilitasi tugas dan fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada tabel berikut.

**Tabel 60. Alokasi Persasaran Pembangunan Eselon III (Bagian fasilitasi tugas dan fungsi DPRD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	19.290.188.219	32%
		2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	4.590.030.542	8%
		3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	88.426.991	0,1%
		4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	1.069.223.086	1,8%
<b>JUMLAH</b>			<b>25.037.868.838</b>	<b>41,2%</b>

*Sumber: data diolah 2023*

Untuk analisis penggunaan program/kegiatan atau sumberdaya yang menunjang pencapaian kinerja untuk tahun anggaran 2023 di bagian fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan alokasi anggaran indikator kinerja dan persentase alokasi anggaran dari anggaran total mendukung capaian kinerja indikator kinerja sebagai berikut sebagai berikut:

- a) Persentasi Rapat yang difasilitasi didukung dengan anggaran sebesar Rp.19.290.188.219 dengan persentase anggaran total 32%, realisasi anggaran Rp.17.151.532.303 (88,91%) telah mendukung capaian kinerja dengan realisasi 111,96%.
- b) Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.590.030.542 dengan persentase anggaran total 8%, realisasi anggaran Rp 3.736.653.598 (81,41%) telah mendukung capaian kinerja dengan realisasi 81,41%.
- c) Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi didukung dengan anggaran sebesar Rp 88.426.991 dengan persentase anggaran total 0,1% realisasi anggaran Rp 45.959.000 (51,97%) telah mendukung capaian kinerja dengan realisasi 66,67%.
- d) Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.069.223.086 dengan persentase anggaran total 1,8% realisasi anggaran Rp 768.175.600 (71,84%) telah mendukung capaian kinerja dengan realisasi 100%.

Berikut tabel analisis penggunaan program/kegiatan atau sumberdaya yang menunjang pencapaian kinerja untuk tahun anggaran 2023 di bagian fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 61. Analisis Program (Sumberdaya) Yang Menunjang Capaian Indikator Kinerja Bagian Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			capaian (%)	nama Program	Keuangan		
		satuan	target	realisasi			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentase rapat yang difasilitasi	persen	100	111,96	111,96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	19.290.188.219	17.151.532.303	88,91
	Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	persen	100	83,33	83,33	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.590.030.542	3.736.653.598	81,41
	Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	persen	100	66,67	66,67	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	88.426.991	45.959.000	51,97
	Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	persen	100	100	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1.069.223.086	768.175.600	71,84

Sumber: data diolah 2023

## 6) Analisis Pemanfaatan Sumberdaya

Berikut disampaikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya untuk tahun anggaran 2023 terhadap pencapaian target pada tabel berikut:

**Tabel 62. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Terhadap Pencapaian Target Di Bagian Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 persasaran indikator**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	111,96	88,91	23,05
	2. Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	83,33	81,41	1,92
	3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	66,67	51,97	14,70
	4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100,00	71,84	28,16
<b>RATA-RATA</b>		<b>90,49</b>	<b>73,53</b>	<b>16,96</b>

**Sumber: data diolah 2023**

Keterangan:

Capaian Kinerja : Realisasi indikator/target x 100%  
 Penyerapan anggaran: Realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator/pagu anggaran x 100%  
 Tingkat efisiensi : capaian kinerja-penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bagian fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator yang mencapai 100% dan lebih dari 100%, walaupun masih ada indikator kinerja dibawah target tetapi tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya untuk tahun anggaran 2023 terhadap pencapaian target Bagian fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 pada sasaran Meningkatkan fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD sebagai berikut:

- a) Persentasi Rapat yang difasilitasi dengan persentase capaian kinerja 111,96 %, persentase penyerapan anggaran 88,91% dengan persentase tingkat efisiensi 23,05% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.
- b) Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda dengan persentase capaian kinerja 83,33%, persentase penyerapan anggaran 81,41% dengan persentase tingkat efisiensi 1,92% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.
- c) Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi dengan persentase capaian kinerja 66,67%, persentase penyerapan anggaran 51,97 % dengan persentase tingkat efisiensi 14,70% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.
- d) Persentase kegiatan Reses yang dengan persentase capaian kinerja 100%, persentase penyerapan anggaran 71,84% dengan persentase tingkat efisiensi 28,16% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya.

Rasio efisiensi belanja Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebesar 86,68% yang diperoleh dari realisasi belanja Rp. 21.702.320.501 dibagi anggaran belanja Rp 25.037.868.838 di kali 100. Berdasarkan tabel tingkat efektifitas keuangan, maka Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dikatakan ***Cukup efektif***.

**Tabel 63. Rasio Efisiensi Belanja bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD TA. 2023**

Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi	keterangan
25.037.868.838	21.702.320.501	86,68%	Cukup efektif

**Sumber: Data diolah 2023**

**B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

**1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.51.257.055.256. Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran anggaran belanja sebesar Rp.60.812.728.170. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari realisasi belanja sebesar Rp 53.328.644.345.- (87,69%). Adapun secara rinci dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 64. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>% 2023</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>60.812.728.170</b>	<b>53.328.644.345</b>	<b>87,69</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.830.376.472</b>	<b>52.412.994.345</b>	<b>87,6</b>
Belanja Pegawai	27.920.158.254	25.134.733.483	90,02
Belanja Barang dan Jasa	31.910.218.218	27.278.260.862	85,48
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>982.351.698</b>	<b>915.650.000</b>	<b>93,21</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	815.851.698	750.650.000	92,01
Belanja Modal Aset Lainnya	166.500.000	165.000.000	99,1

### **2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program**

Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah meningkatnya Kinerja layanan DPRD. Adapun Program yang mendukung tujuan adalah 1). Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.52.085.418.905, telah direalisasikan sebesar Rp. 46.618.982.150 dengan persentase keuangan 89,50%. 2). Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran Rp.8.727.309.265 , telah direalisasikan Rp 6.709.662.195 dengan persentase keuangan 76,88%. Total jumlah anggaran dari 2 program tersebut adalah Rp. 60.812.728.170 telah direalisasikan Rp.53.328.644.345 (87,69%).

Untuk mendukung tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut ada 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran I Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian didukung oleh 2 program yaitu 1). Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 4.653.267.475, telah direalisasikan sebesar Rp. 4.147.157.219 dengan persentase keuangan 89,12%. 2). Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran Rp. 2.437.000.000, telah direalisasikan Rp 1.706.508.237 dengan persentase keuangan 70,02%. Total jumlah anggaran dari 2 program tersebut adalah Rp. 7.090.267.475 telah direalisasikan Rp. 5.853.665.456 (82,56%).

Sasaran II Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD didukung Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran Rp. 542.628.646, telah direalisasikan Rp 452.575.760 dengan persentase keuangan 83,40%.

Sasaran III Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan didukung Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp.28.141.963.211, telah direalisasikan Rp 25.320.292.628 dengan persentase keuangan 89,97%.

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

---

Sasaran IV Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD didukung oleh 2 program yaitu 1). Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.19.290.188.219, telah direalisasikan sebesar Rp. 17.151.532.303 dengan persentase keuangan 88,91%. 2). Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran Rp 5.747.680.619, telah direalisasikan Rp4.550.578.198 dengan persentase keuangan 79,17%. Total jumlah anggaran dari 2 program tersebut adalah Rp. 25.037.868.838 telah direalisasikan Rp.21.702.110.501 (86,68%).

Untuk lebih jelasnya rincian tujuan/sasaran strategis, anggaran dan realisasi program pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

**Tabel 65. Anggaran dan realisasi menurut tujuan/sasaran dan program kegiatan penunjang Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No	Sasaran	Program			
		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	<b>Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD</b>	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	52.085.418.905	46.618.982.150	89,50
		b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	8.727.309.265	6.709.662.195	76,88
		<b>Jumlah</b>	<b>60.812.728.170</b>	<b>53.328.644.345</b>	<b>87,69</b>
	1 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	4.653.267.475	4.147.157.219	89,12
		b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2.437.000.000	1.706.508.237	70,02
		<b>Jumlah</b>	<b>7.090.267.475</b>	<b>5.853.665.456</b>	<b>82,56</b>
	2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	542.628.646	452.575.760	83,40
		<b>Jumlah</b>	<b>542.628.646</b>	<b>452.575.760</b>	<b>83,40</b>
	3 Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	28.141.963.211	25.320.292.628	89,97
		<b>Jumlah</b>	<b>28.141.963.211</b>	<b>25.320.292.628</b>	<b>89,97</b>
	4 Meningkatkan fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	19.290.188.219	17.151.532.303	88,91
		b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	5.747.680.619	4.550.578.198	79,17
		<b>Jumlah</b>	<b>25.037.868.838</b>	<b>21.702.110.501</b>	<b>86,68</b>

Sumber: Data diolah 2023

### **3. Perbandingan Rata-Rata Realisasi Kinerja dengan Rata-Rata Realisasi Keuangan**

Dibandingkan dengan rata-rata persentase capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 terhadap capaian 4 sasaran strategis adalah 143,85% dengan persentase realisasi keuangan 87,69% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian dengan persentase capaian kinerja 166,71% dan persentase penyerapan anggaran 82,56%, dengan demikian Persentase tingkat efisiensi 84,15% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya/anggaran.
2. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD dengan persentase capaian kinerja 114,24% dan persentase penyerapan anggaran 83,40%, dengan demikian Persentase tingkat efisiensi 30,84% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya/anggaran.
3. Sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dengan persentase capaian kinerja 100% dan persentase penyerapan anggaran 89,97%, dengan demikian Persentase tingkat efisiensi 10,03% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya/anggaran.
4. Sasaran Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD dengan persentase capaian kinerja 90,49% dan persentase penyerapan anggaran 86,68%, dengan demikian Persentase tingkat efisiensi 3,81% yang berarti efisien dalam menggunakan sumberdaya/anggaran.

Untuk lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 66. Perbandingan Capaian Kinerja Dan Capaian Keuangan Dan Efisiensi Sumberdaya Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023**

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	166,71	82,56	84,15
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	114,24	83,40	30,84
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	100	89,97	10,03
Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	90,49	86,68	3,81

*Sumber: data diolah 2023*

#### 4. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 dibandingkan tahun 2022, jumlah program dan kegiatan masih sama yaitu 2 program dan 15 kegiatan. Jumlah sub kegiatan pada tahun 2022 35 sub kegiatan dan pada tahun 2023 37 sub kegiatan.

Dari jumlah anggaran, tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu dari Rp.63.394.799.817 menjadi Rp.60.812.728.170 di tahun 2023. Namun dari jumlah realisasi, terjadi peningkatan pada tahun 2023 yaitu Rp.53.328.644.345, sedangkan tahun 2022 realisasi sebesar Rp.50.101.531.416.

Untuk lebih jelasnya perbandingan program dan kegiatan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat dengan jelas dalam tabel berikut.

**Tabel 67. Perbandingan Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan 2023**

TAHUN 2022		TAHUN 2023	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	b. -		b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	a. <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		a. <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>
	b. <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		b. <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>
	c. <i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>		c. -
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	a. -		a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	c. -		c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	e. -		e. Penyediaan Bahan/Material
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	a. -		a. Pengadaan Mebel
	b. -		b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	c. <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>		c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2022		TAHUN 2023	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a. <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>		a. <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
	b. <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		b. -
	c. <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>		c. <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>		a. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
	b. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>		b. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
	c. <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>		c. <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
	d. <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>		d. <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
	e. <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>		e. -
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>
	a. <i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>		a. <i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>
	b. <i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>		b. <i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>
	c. <i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>		c. <i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>
	a. <i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>		a. <i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>
	b. <i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>		b. <i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>
	a. <i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>		a. <i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>
	b. <i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>		b. <i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>
	c. <i>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>		c. <i>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>
	d. <i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>		d. -
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>
	a. <i>Pembahasan APBD</i>		a. <i>Pembahasan APBD</i>

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2022		TAHUN 2023	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>
	a. Pengawasan Penggunaan Anggaran		a. Pengawasan Penggunaan Anggaran
TAHUN 2022		TAHUN 2023	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>
	a. Pendalaman Tugas DPRD		a. Pendalaman Tugas DPRD
	b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan		b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
	c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>
	a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		a. -
	b. -		b. Pelaksanaan Reses
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>
	a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
<b>2 Program</b>	<b>15 Kegiatan dan 35 sub kegiatan</b>	<b>2 Program</b>	<b>15 Kegiatan dan 37 sub kegiatan</b>
<b>Total Anggaran</b>		<b>Total Anggaran</b>	
Rp. 63.394.799.817.-		Rp. 60.812.728.170.-	
<b>Realisasi</b>		<b>Realisasi</b>	
Rp. 50.101.531.416.-		Rp. 53.328.644.345.-	

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap sasaran tujuan meningkatnya layanan sekretariat DPRD untuk menunjang urusan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD yaitu tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 103,96% dari target.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran tujuan meningkatnya layanan sekretariat DPRD untuk menunjang urusan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dicerminkan dari capaian indikator sasaran yang terselesaikan tepat waktu dan indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD di tentukan oleh beberapa factor antara lain anggaran, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kerjasama semua pihak dan partisipasi semua pihak terkait.

### B. Strategi Peningkatan Kinerja

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2023 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang direkomendasikan untuk dilakukan sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten;
4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon

- III, eselon IV dan individu pegawai;
5. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada indikator indeks kepuasan;
  6. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan rapat-rapat DPRD dan pembahasan raperda.
  7. Menyediakan tenaga ahli DPRD, baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama tenaga ahli Fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD, sehingga upaya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dapat tercapai.
  8. Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya manusia Sekretariat DPRD, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi terhadap bidang tugas baik DPRD maupun Sekretariat DPRD. Misalnya melalui kegiatan workshop, bimtek , seminar, lokakarya, kunjungan kerja.

**LAMPIRAN**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR :  
TANGGAL :

**Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD**

Kabupaten : Tanah Laut

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;  
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;  
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;  
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD)	Sekretariat DPRD

**SAJINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFRIAL, S.H., MH**  
NIP.19750903 199903 2 005

**BUPATI TANAH LAUT,**  
**Ttd**

**H. SUKAMTA**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**SEKRETARIAT DPRD**

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAMSIR RAHMAN

Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

SYAMSIR RAHMAN

Pihak Pertama,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si  
NIP. 19680304 199803 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	77,11

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.715.124
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.410.895.931
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	351.054.000
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.427.889.736
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.653.463
		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.695.753.576
		7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.273.875
		8 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	23.111.994.981
		9 Layanan Administrasi DPRD	1.180.039.441
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.504.086.816
		2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	85.943.726
		3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	88.426.991
		4 Peningkatan Kapasitas DPRD	2.979.628.646

		5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.069.223.086
		6	Fasilitasi Tugas DPRD	18.110.148.778
Jumlah				60.812.728.170

Pj.Bupati Tanah Laut,



SYAMSIR RAHMAN

Pelaihari, Oktober 2023  
Sekretaris DPRD,



Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si  
NIP. 19680304 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENNY WAHYUDHI, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Humas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

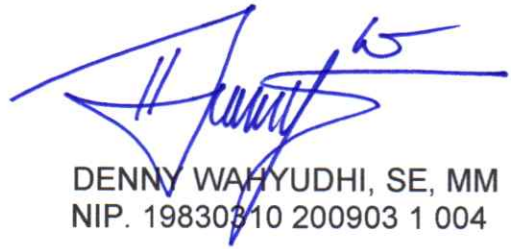
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si  
NIP. 19680304 199803 1 009

  
DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1 Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100	%
		2 Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100	%
		3 Persentasi pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100	%
		4 Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100	%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	1 Persentasi kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100	%
		2 Persentasi Penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100	%

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>351.054.000</b>
		- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.054.000
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	294.000.000
		<b>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.427.889.736</b>
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.458.372
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	698.404.379
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.881.785
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.760.400
		- Penyediaan Bahan/Material	10.000.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	624.384.800		

		<b>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>105.653.463</b>
		- Pengadaan Mebel	77.977.500
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.907.418
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.768.545
		<b>4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.695.753.576</b>
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.000.000
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.394.753.576
		<b>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>512.273.875</b>
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.435.250
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.370.000
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.478.625
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000
		<b>6. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>560.642.825</b>
		- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	416.646.825
		- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	143.996.000
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>1. Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.979.628.646</b>
		- Pendalaman Tugas DPRD	1.777.000.000
		- Publikasi dan Dokumentasi Dewan	542.628.646
		- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	352.000.000
		- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	308.000.000

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,



Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si  
NIP. 19680304 199803 1 009

Pihak Pertama,



DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVE NOOR SALAM, SH

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DENNY WAHYUDHI, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Humas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 004



NOVE NOOR SALAM, SH  
NIP. 19861123 201502 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan Kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.568	Dokumen (surat/berkas)
2	Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	15	Orang
3	Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Anggota DPRD	Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi	175	Orang/kali
4	Melaksanakan Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi Pemeriksaan Kesehatannya	35	Orang
5	Melaksanakan Fasilitasi pemenuhan tenaga Ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5	Orang

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 004

  
NOVE NOOR SALAM, SH  
NIP. 19861123 201502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD YANUAR, ST

Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DENNY WAHYUDHI, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Humas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

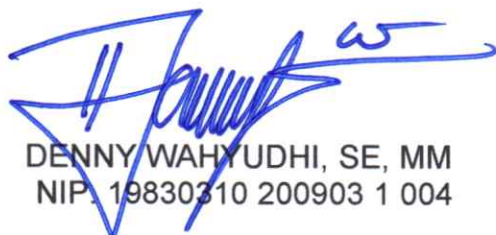
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 004



AHMAD YANUAR, ST  
NIP. 19660102 199303 1 008

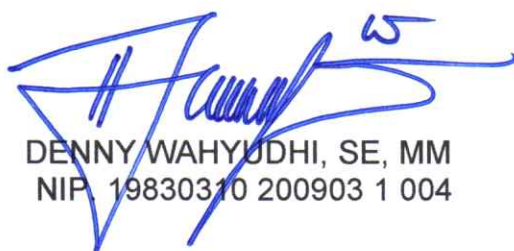
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

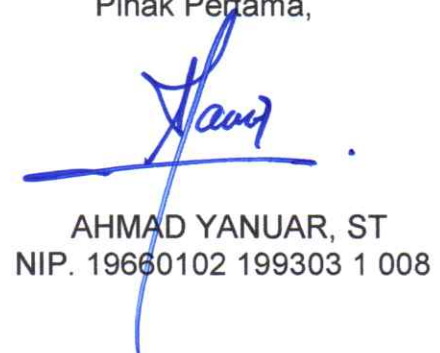
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>			
1	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf	
2	Menyediakan rekomendasi kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf	
3	Melakukan advokasi kebijakan	Jumlah laporan advokasi kebijakan	5 laporan	
<b>B</b>	<b>KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNGJAWAB TUGAS DAN FUNGSI RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN</b>			
1	Melaksanakan Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	36	Jenis
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	7	unit

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 004

  
AHMAD YANUAR, ST  
NIP. 19660102 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD REZA FAHLEVI, S.I.KOM

Jabatan : Analis Publikasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DENNY WAHYUDHI , SE, MM

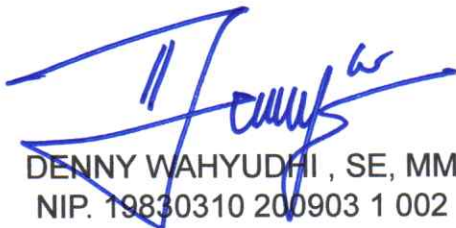
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
DENNY WAHYUDHI , SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002


Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

  
MUHAMMAD REZA FAHLEVI, S.I.KOM  
NIP. 19891223 201903 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja	180	Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Publikasi dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen hasil analisa	144	Dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Publikasi dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah laporan hasil penelitian	1	Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	12	Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	6	Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	12	Laporan

Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

  
DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Analis Publikasi

  
MUHAMMAD REZA FAHLEVI, S.I.KOM  
NIP. 19891223 201903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY SISWOYO, A.Md

Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

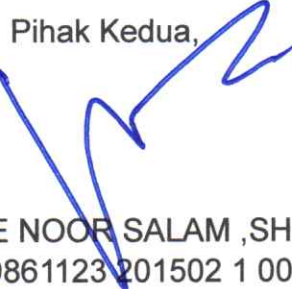
Nama : NOVE NOOR SALAM ,SH


Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
NOVE NOOR SALAM ,SH  
NIP. 19861123 201502 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,  
  
EDY SISWOYO, A.Md  
NIP. 19821106 201502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan teknologi informasi	1 Dokumen
2	Memantau teknologi informasi sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah kegiatan pemantauan Teknologi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya	240 Kegiatan
3	Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil pengendalian program	85 Kegiatan
4	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah pelaksanaan program yang dikoordinasikan	350 Kegiatan
5	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan berkala yang disusun	12 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	12 Laporan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawatan

NOVE NOOR SALAM, SH  
NIP. 19861123 201502 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Pengelola Teknologi Informasi

EDY SISWOYO, A.Md  
NIP. 19821106 201502 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp. (0512) 21863 Fax. (0512) 21009

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENDANG SUKAISIH, S.I.Kom

Jabatan : Analis Protokol

Selaku disebut **Pihak Pertama**

Nama : DENNY WAHYUDHI, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Maret 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

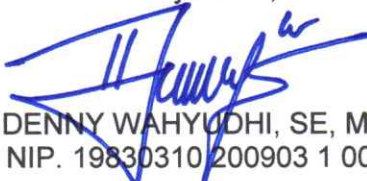
  
ENDANG SUKAISIH, S.I.Kom  
NIP. 19790513 200701 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

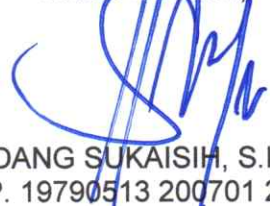
NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja	120 Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan protokol dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen hasil analisa	120 Dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan protocol dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah laporan hasil penelitian	120 Laporan
4	Mengadakan laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	120 Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	50 Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	120 Laporan

Pelaihari, Maret 2023

Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat,

  
DENNY WAHYUDI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

Analisis Protokol,

  
ENDANG SUKAISIH, S.I.Kom  
NIP. 19790513 200701 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp. (0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERRYANSYAH

Jabatan : Pramu Bakti

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NOVE NOOR SALAM ,SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NOVE NOOR SALAM ,SH  
NIP. 19861123 201502 1 002

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Pertama,

HERRYANSYAH  
NIP. 19761106 200801 1 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah tugas yang peralatannya yang disiapkan	450	Kali
2	Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah tugas yang kebutuhannya disiapkan	360	Kali
3	Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Jumlah kegiatan pembersihan peralatan	240	Kali
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan perawatan alat	240	Kali
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas	Jumlah laporan kegiatan	12	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah laporan tugas kedinasan lain	12	Laporan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan  
Kepegawaian

NOVE NOOR SALAM, SH  
NIP. 19861123 201502 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Pramu Bakti

HERRYANSYAH  
NIP. 19761106 200801 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NURRAHIM

Jabatan : Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DENNY WAHYUDHI , SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
DENNY WAHYUDHI , SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

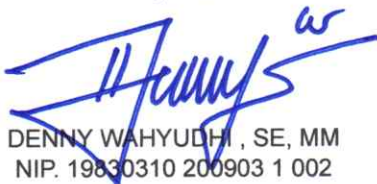
Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

  
MUHAMMAD NURRAHIM  
NIP. 19750307 200604 1 015

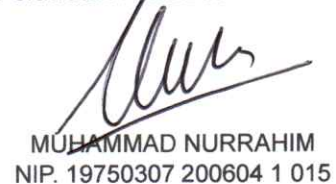
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor yang disortir	150	Kegiatan
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor yang diberi lembar pengantar	150	Kegiatan
3	Mengelompokkan administrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor yang dikelompokkan	250	Kegiatan
4	Mendokumentasikan administrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor yang didokumentasikan	250	Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	12	Laporan

Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

  
DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor

  
MUHAMMAD NURRAHIM  
NIP. 19750307 200604 1 015



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp. (0512) 21863 Fax. (0512) 21009

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RENI ANGRAINI, S.Ak

Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

Selaku disebut **Pihak Pertama**

Nama : DENNY WAHYUDHI, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Maret 2023

Pihak Kedua,

  
DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

Pihak Pertama,

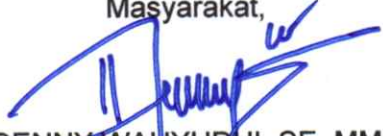
  
RENI ANGRAINI, S.Ak  
NIP. 19840613 201001 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

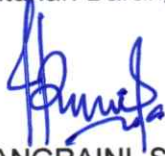
NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data Kebutuhan Barang Inventaris sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan Kebutuhan Barang Inventaris	Jumlah dokumen bahan data Kebutuhan Barang Inventaris yang diterima dan diperiksa	90 Dokumen
2	Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data Kebutuhan Barang Inventaris sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah dokumen hasil pengklasifikasikan bahan dan data Kebutuhan Barang Inventaris	90 Dokumen
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Kebutuhan Barang Inventaris sesuai prosedur dalam rangka penyusunan Kebutuhan Barang Inventaris	Jumlah dokumen kajian karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Kebutuhan Barang Inventaris	90 Dokumen
4	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	20 Laporan
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan tugas kedinasan lain	90 Kegiatan

Pelaihari, Maret 2023

Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat,

  
DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris,

  
RENI ANGRAINI, S.Ak  
NIP. 19840613 201001 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARAH HASNA

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NOVE NOOR SALAM ,SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NOVE NOOR SALAM ,SH  
NIP. 19861123201502 1 002

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Pertama,

SARAH HASNA  
NIP. 19750718 199703 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	200	Kegiatan
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	240	Kegiatan
3	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	48	Kegiatan
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	12	Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	-	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	12	Laporan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan  
Kepegawaian



NOVE NOOR SALAM, SH  
NIP. 19861128 201502 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Pengadministrasi Umum



SARAH HASNA  
NIP. 19750718 199703 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSILO A.Md

Jabatan : Ajudan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

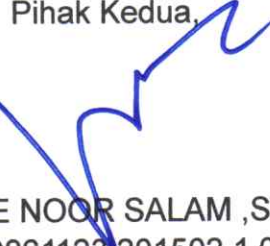
Nama : NOVE NOOR SALAM ,SH


Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
NOVE NOOR SALAM ,SH  
NIP. 19861123201502 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,  
  
SUSILO A.Md  
NIP. 19760328 201001 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan	Jumlah dokumen ke pimpinan	350 Dokumen
2	Menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya	Jumlah tamu yang difasilitasi	150 Orang
3	Menyusun acara kegiatan pimpinan sesuai dengan rencana kegiatan dan petunjuknya dalam buku agenda dan papan kegiatan sebagai informasi dan jadwal kegiatan	Jumlah dokumen acara kegiatan pimpinan	75 Dokumen
4	Menghubungi dan menginformasikan kepada unit dan instansi terkait tentang acara dan kegiatan pimpinan melalui surat, telepon, faksimili untuk bahan informasi kepada pimpinan atau menteri	Jumlah acara dan kegiatan yang dikoordinasikan	50 Kegiatan
5	Membuat notulen atau risalah rapat, mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun	Jumlah notulen atau risalah rapat	150 Dokumen
6	Menyusun konsep surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan	Jumlah konsep surat balasan	15 Dokumen
7	Menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan	Jumlah data atau bahan kegiatan pimpinan yang disiapkan dan diarsipkan	150 Dokumen
8	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban dan bahan masukan atasan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	75 Laporan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

NOVE NOOR SALAM, SH  
NIP. 19861123 201502 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Ajudan

SUSILO A.Md  
NIP. 19760328 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UDIA NATA

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DENNY WAHYUDHI , SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
DENNY WAHYUDHI , SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002


Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

  
UDIA NATA  
NIP. 19770602 201001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	2000	Kegiatan
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	240	Kegiatan
3	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	48	Kegiatan
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	12	Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	12	Laporan

Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

  
DENNY WAHYUDHI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Pengadministrasi Umum

  
UDIA NATA  
NIP. 19770602 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIANSYAH

Jabatan : Pengemudi VIP

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : DENNY WAHYUDHI , SE, MM

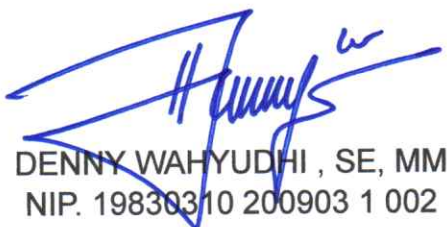
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
DENNY WAHYUDHI , SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

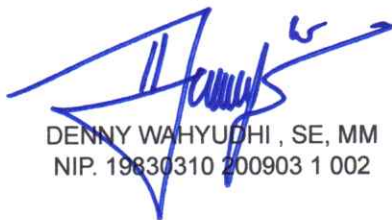
Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

  
YULIANSYAH  
NIP. 19760704 200701 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik	Jumlah laporan pemeriksaan kerusakan kelengkapan kendaraan	12	Laporan
2	Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin	Jumlah kegiatan memanaskan mesin	200	Kali
3	Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih	Jumlah kegiatan perawatan kendaraan	120	Kali
4	Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat	jumlah kegiatan mengemudi kendaraan	60	Kali
5	Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasi secara layak	Jumlah kegiatan perbaikan kerusakan kecil	3	Kali
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12	Laporan
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	12	Laporan

Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat



DENNY WAHYUDI, SE, MM  
NIP. 19830310 200903 1 002

Pelaihari, Januari 2023  
Pengemudi VIP



YULIANSYAH  
NIP. 19760704 200701 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMPERANSYAH, S.KM, MS

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si  
NIP. 19680304 199803 1 009

AMPERANSYAH, S.KM, MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	Sangat Baik

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>179.715.124</b>
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.715.449
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.999.675
		<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.410.895.931</b>
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.368.806.098
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.089.833
		<b>3. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>22.551.352.156</b>
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.551.352.156		

Pihak Kedua,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si  
NIP. 19680304 199803 1 009

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Pertama,

AMPERANSYAH, S.KM, MS  
NIP. 19660430 199012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P.

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AMPERANSYAH, S.KM, MS

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

AMPERANSYAH, S.KM, MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pihak Pertama,

ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P.  
NIP. 19750401 201001 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6	dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39.715.449</b>
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.715.449

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,



AMPERANSYAH, S.KM, MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pihak Pertama,



ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P.  
NIP. 19750401 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI JUANA, S.Pi

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AMPERANSYAH, S.KM, MS

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

AMPERANSYAH, S.KM, MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pihak Pertama,

SRI JUANA, S.Pi  
NIP. 19800118 200501 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>			
1	Analisis kinerja anggaran belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan analisis kinerja anggaran belanja	1 laporan	
2	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada	1 laporan	
3	Sosialisasi analisis kinerja anggaran belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	Jumlah kegiatan sosialisasi analisis kinerja anggaran belanja	1 kegiatan	
<b>B</b>	<b>KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNGJAWAB TUGAS DAN FUNGSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN</b>			
1	Melaksanakan Penyusunan Laporan kinerja dan laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	1 Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	7	Laporan
2	Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Akuntansi SKPD	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	1.930	dok

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>139.999.675</b>
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.999.675

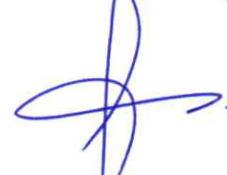
Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,



**AMPERANSYAH, S.KM, MS**  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pihak Pertama,



**SRI JUANA, S.Pi**  
NIP. 19800118 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BINTARTI, SE

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AMPERANSYAH, S.KM, MS

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AMPERANSYAH, S.KM, MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

BINTARTI, SE  
NIP. 19730415 200701 2 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>			
1	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan	Jumlah Laporan	12 laporan	
2	Menyediakan informasi keuangan	Jumlah Laporan	1 laporan	
3	Memverifikasi dan menspesifikasikan informasi keuangan	Jumlah Laporan	12 laporan	
<b>B</b>	<b>KINERJA TAMBAHAN TUGAS DAN FUNGSI PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI</b>			
1	Melaksanakan penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan SKPD	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1.930	Dokumen
		2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	60	Dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.410.895.931</b>
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.368.806.098
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.089.833
		<b>2. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>22.551.352.156</b>
		- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.551.352.156

Pihak Kedua,



AMPERANSYAH, S.KM, MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pelaihari, Oktober 2023  
Pihak Pertama,



BINTARTI, SE  
NIP. 19730415 200701 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelahari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD KURNIA SYA'BANI

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AMPERANSYAH S.KM. MS

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AMPERANSYAH S.KM. MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pelahiran Januari 2023  
Pihak Pertama,

AKHMAD KURNIA SYA'BANI  
NIP. 19730921 200501 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

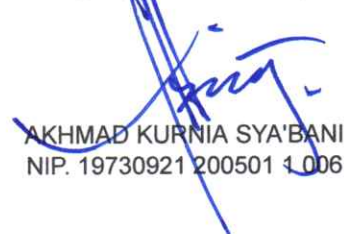
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi keuangan yang disortir	240	Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi keuangan yang diberi lembar pengantar	240	Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi Keuangan atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi keuangan yang dikelompokkan	240	Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah dokumen hasil dokumentasi administrasi keuangan	240	Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	240	Laporan

Kepala Bagian Keuangan



AMPERANSYAH S.K.M. MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pelatih, Januari 2023  
Pengadministrasi Keuangan



AKHMAD KURNIA SYA'BANI  
NIP. 19730921 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA MARDIANA, A.Md.Kom

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AMPERANSYAH S.KM. MS

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AMPERANSYAH S.KM. MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

LIA MARDIANA, A.Md.Kom  
NIP. 19840319 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah dokumen pengelolaan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan	2000	Berkas
2	Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	Jumlah surat permintaan pembayaran ke KPKN yang diajukan	500	Berkas
3	Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah surat perintah membayar uang SPM Giro yang diurus	36	Berkas
4	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah pembayaran atas tagihan yang dilaksanakan	2000	Berkas
5	Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah permintaan uang muka yang dilayani	-	-
6	Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah formulir daftar penerimaan dan pengeluaran uang yang disusun	2000	Berkas
7	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan yang dibuat	18	Laporan
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	50	Kali

Kepala Bagian Keuangan



AMPERANSYAH S.K.M. MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pelaihari, Januari 2023  
Bendahara



LIA MARDIANA, A.Md.Kom  
NIP. 19840319 200901 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAID AKHMAD

Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P  
NIP. 19750401 201001 1 010

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

SAID AKHMAD  
NIP. 19670410 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang disortir	12	Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang diberi lembar pengantar	20	Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi perencanaan dan program atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang dikelompokkan	3	Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang didokumentasikan	6	Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	12	Laporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P  
NIP. 19750401 201001 1 010

Pelaihari, Januari 2023  
Pengadministrasi Perencanaan dan Program

SAID AKHMAD  
NIP. 19670410 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI KHOIRUL LI'UMAH, SE

Jabatan : Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AMPERANSYAH S.KM. MS

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AMPERANSYAH S.KM. MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

SITI KHOIRUL LI'UMAH, SE  
NIP. 19790630 200604 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

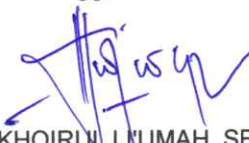
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja	12	Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen hasil analisa	12	Dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah laporan hasil penelitian	12	Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	12	Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	12	Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	650	Laporan

Kepala Bagian Keuangan



AMPERANSYAH S.K.M. MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pelaihari, Januari 2023  
Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan  
Anggaran



SITI KHOIRUL L'UMAH, SE  
NIP. 19790630 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIYADI, S.KOM

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P  
NIP. 19750401 201001 1 010

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

SUPRIYADI, S.KOM  
NIP. 19880315 201903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen bahan data Program Anggaran dan Pelaporan yang diterima dan diperiksa	12	Dokumen
2	Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah dokumen hasil pengklasifikasian bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan	2	Dokumen
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Program Anggaran dan Pelaporan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil kajian karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Program Anggaran dan Pelaporan	2	Dokumen
4	Menyusun konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah dokumen konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	2	Dokumen
5	Mendiskusikan konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah kegiatan diskusi konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan dengan pejabat yang berwenang	6	Kegiatan
6	Menyusun kembali Program Anggaran dan Pelaporan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen Program Anggaran dan Pelaporan hasil perbaikan dari diskusi	6	Dokumen
7	Mengevaluasi proses penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah laporan hasil evaluasi proses penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	6	Laporan
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	12	Laporan
9	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan tugas kedinasan lain	12	Laporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan  
Anggaran

ZIKRI FAHMA, SE, M.A.P  
NIP. 19750401 201001 1 010

Pelaihari, Januari 2023  
Penyusun Program Anggaran dan  
Pelaporan

SUPRIYADI, S.KOM  
NIP. 19880315 201903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUNI

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AMPERANSYAH S.KM. MS

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AMPERANSYAH S.KM. MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

WAHYUNI  
NIP. 19710702 200701 2 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	30	Berkas
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	30	Berkas
3	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	30	Berkas
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	30	Berkas
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30	Berkas
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	750	Berkas

Kepala Bagian Keuangan

AMPERANSYAH S.K.M. MS  
NIP. 19660430 199012 1 001

Pelaihari, Januari 2023  
Pengadministrasi Umum

WAHYUNI

NIP. 19710702 200701 2 015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si  
NIP. 19680304 199803 1 009

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Pertama

ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

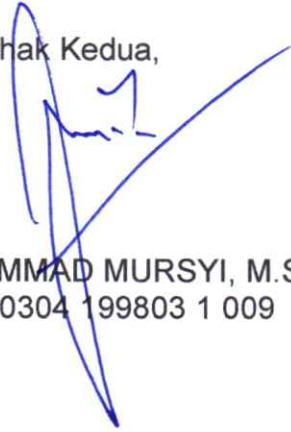
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1 Persentasi rapat yang difasilitasi	100	%
		2 Persentasi fasilitasi pembahasan rancangan Perda	100	%
		3 Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100	%
		4 Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100	%

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1. Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1.180.039.441</b>
		- Fasilitasi Fraksi DPRD	50.140.448
		- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.129.898.993
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.504.086.816</b>
		- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50.701.100
		- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.443.599.212
		- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.786.504
		<b>2. Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>85.943.726</b>
		- Pembahasan APBD	85.943.726
		<b>3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>88.426.991</b>
		- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	88.426.991
		<b>4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.069.223.086</b>
		- Pelaksanaan Reses	1.069.223.086
		<b>5. Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>18.110.148.778</b>
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.110.148.778		

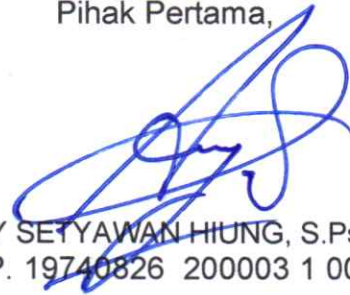
Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,



Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si  
NIP. 19680304 199803 1 009

Pihak Pertama,



ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRIAN NAFARIE, SH, MH

Jabatan : Perisalah Legislatif Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pihak Pertama,

FAHRIAN NAFARIE, SH. MH  
NIP. 19810116 201101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>			
1	merencanakan pembuatan validasi risalah	Validasi risalah	15 dokumen	
2	memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat	Validasi risalah	15 dokumen	
3	menyusun catatan rapat berbahasa Indonesia	Risalah rapat	15 dokumen	
4	merencanakan penyusunan buku himpunan risalah dalam satu pokok pembahasan	Perencanaan himpunan risalah dalam satu pokok pembahasan	15 dokumen	
5	mengelompokkan risalah rapat resmi ke dalam satu pokok bahasan	Dokumen himpunan risalah rapat	15 dokumen	
6	menyusun daftar urutan risalah rapat resmi dari kelompok risalah rapat berdasarkan waktu kegiatan	Dokumen himpunan risalah rapat	15 dokumen	
7	menyusun buku himpunan risalah rapat	himpunan risalah rapat tercetak dalam bentuk buku	15 dokumen	
<b>B</b>	<b>KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNGJAWAB TUGAS DAN FUNGSI FASILITASI KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
1	Melaksanakan Fasilitasi Pembahasan Raperda	Jumlah fasilitasi Pembahasan Raperda yang difasilitasi	15	Raperda

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.504.086.816</b>
		- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50.701.100
		- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.443.599.212
		- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.786.504

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,



ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pihak Pertama,



FAHRIAN NAFARIE, SH. MH  
NIP. 19810116 201101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONA ROSTI ANGGITA, ST, M.Ling.

Jabatan : Analis Legislasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

  
DONA ROSTI ANGGITA, ST, M.Ling.  
NIP. 19780228 201010 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

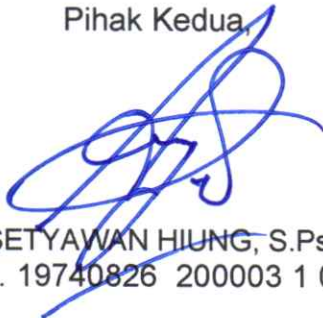
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>			
1	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Jumlah Kegiatan	4 kali	
	Merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan	Jumlah Kegiatan	2 kali	
	Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP	Jumlah Kegiatan	160 dokumen	
	Menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Kegiatan	160 dokumen	
	Memfasilitasi reses DPRD	Jumlah Kegiatan	3 kali	
<b>B</b>	<b>KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNGJAWAB TUGAS DAN FUNGSI FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD</b>			
1	Melaksanakan Fasilitasi hearing dan penyerapan Aspirasi	1 Jumlah Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama yang difasilitasi	4	kali
		2 Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang dilaksanakan	3	kali
2	Melaksanakan Fasilitasi layanan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	1 Jumlah Fasilitasi Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat waktu	3	dokumen
		2 jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	6	dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>1. Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>85.943.726</b>
		- Pembahasan APBD	85.943.726
		<b>2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>88.426.991</b>
		- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	88.426.991
		<b>3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.069.223.086</b>
		- Pelaksanaan Reses	1.069.223.086

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,



ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pihak Pertama,



DONA ROSTI ANGGITA, ST, M.Ling.  
NIP. 19780228 201010 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSTIA FEBRIAN S.M

Jabatan : Analis Legislasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pihak Pertama,

YOSTIA FEBRIAN S.M  
NIP. 19840226 201010 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>			
1	Penyusunan risalah rapat dan dokumen kelengkapan risalah rapat	Jumlah dokumen	12 dokumen	
2	Penyusunan himpunan risalah rapat	Jumlah dokumen	3 dokumen	
<b>B</b>	<b>KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNGJAWAB TUGAS DAN FUNGSI FASILITASI TUGAS - TUGAS DPRD</b>			
1	Melaksanakan Fasilitasi rapat - rapat DPRD	1 Jumlah Rapat yang difasilitasi	255	Rapat
2	Melaksanakan pelayanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Jumlah Pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan	1.456	orang / kali

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1. Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1.180.039.441</b>
		- Fasilitasi Fraksi DPRD	50.140.448
		- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.129.898.993
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>4. Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>18.110.148.778</b>
		- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.110.148.778

Pelaihari, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

  
YOSTIA FEBRIAN S.M  
NIP. 19840226 201010 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD TIRMIDZI NUR, SH

Jabatan : Analis Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Pertama,

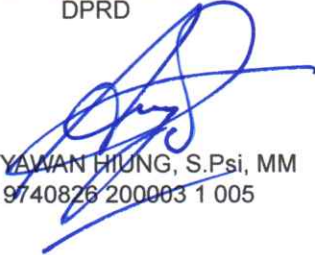
AHMAD TIRMIDZI NUR, SH  
NIP. 19931229 202203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;	Jumlah dokumen bahan kerja yang dikumpulkan	30	Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah pengelolaan hukum sesuai dengan prosedur agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Jumlah dokumen hasil analisa yang sesuai dengan pengelolaan hukum	12	Dokumen
3	Mengadakan penelitian hukum berdasarkan permasalahan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan ;	Jumlah laporan hasil penelitian berdasarkan permasalahan pengelolaan hukum	12	Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada pimpinan unit	25	Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit ;	Jumlah dokumen saran yang disampaikan kepada pimpinan unit	15	Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan	50	Laporan

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD

ARY SETYAWAN HILUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005



Pelaihari, Januari 2023  
Analisis Hukum

AHMAD TIRMIDZI NUR, SH  
NIP. 19931229 202203 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAIHAKI

Jabatan : Pengadministrasi Rapat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

  
BAIHAKI  
NIP. 19741126 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi Rapat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi Rapat yang disortir	150	Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi Rapat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi Rapat yang diberi lembar pengantar	180	Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi Rapat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi Rapat yang dikelompokkan	150	Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi Rapat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi Rapat yang didokumentasikan	100	Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	34	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	80	Laporan

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Pengadministrasi Rapat

  
BAIHAKI  
NIP. 19741126 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIDA DEA UTAMI, SH

Jabatan : Analis Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005


Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

FARIDA DEA UTAMI, SH  
NIP. 19980510 202203 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;	Jumlah dokumen bahan kerja yang dikumpulkan	30	Dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah pengelolaan hukum sesuai dengan prosedur agar memperlancar pelaksanaan tugas;	Jumlah dokumen hasil analisa yang sesuai dengan pengelolaan hukum	12	Dokumen
3	Mengadakan penelitian hukum berdasarkan permasalahan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan ;	Jumlah laporan hasil penelitian berdasarkan permasalahan pengelolaan hukum	12	Laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada pimpinan unit	25	Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit ;	Jumlah dokumen saran yang disampaikan kepada pimpinan unit	15	Dokumen
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan	50	Laporan

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Analisis Hukum

  
FARIDA DEA UTAMI, SH  
NIP. 19980510 202203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMSINAH

Jabatan : Pranata Jamuan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

HAMSINAH  
NIP. 19730303 200701 2 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Mengumpulkan bahan jamuan	Jumlah bahan jamuan	150	Dokumen
2	Mengolah bahan jamuan menjadi materi	Jumlah materi yang diolah	150	Dokumen
3	Melaksanakan pelayanan kepada jamuan	Jumlah kegiatan pelayanan kepada jamuan	150	Kali
4	Mengevaluasi hasil kerja	Jumlah laporan evaluasi hasil kerja	12	Laporan
5	Melaporkan pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas	12	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan	150	Laporan

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Pranata Jamuan

  
HAMSINAH  
NIP. 19730303 200701 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAELAH

Jabatan : Pranata Jamuan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005


Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

  
RAELAH  
NIP. 19800808 201001 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Mengumpulkan bahan jamuan	Jumlah bahan jamuan	200	Dokumen
2	Mengolah bahan jamuan menjadi materi	Jumlah materi yang diolah	200	Dokumen
3	Melaksanakan pelayanan kepada jamuan	Jumlah kegiatan pelayanan kepada jamuan	200	Kali
4	Mengevaluasi hasil kerja	Jumlah laporan evaluasi hasil kerja	12	Laporan
5	Melaporkan pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas	12	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan	200	Laporan

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD

  
ARY SETYAWAN HILUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Pranata Jamuan

  
RAELAH  
NIP. 19800808 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDIYANTO, A.Md.Kom

Jabatan : Notulis Rapat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Pertama,

RUDIYANTO, A.Md.Kom  
NIP. 19840226 200801 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Mengumpulkan notulen hasil rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen notulen hasil rapat yang dikumpulkan	100	Dokumen
2	Menganalisis permasalahan yang ada dan menentukan jenis masalah yang harus ditangani sesuai dengan situasi dan kondisi agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen hasil analisa permasalahan	10	Dokumen
3	Menyusun resume notulen hasil rapat sesuai prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen resume notulen hasil rapat yang disusun	80	Dokumen
4	Membuat kesimpulan dari hasil resume notulen rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen kesimpulan dari hasil resume notulen rapat yang dibuat	60	Dokumen
5	Menyerahkan hasil notulen rapat dan kesimpulan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen hasil notulen rapat yang diserahkan kepada pimpinan	20	Dokumen
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada pimpinan unit	10	Laporan
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan	150	Laporan

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD

ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelatihan, Januari 2023  
Notulis Rapat

RUDIYANTO, A.Md.Kom  
NIP. 19840226 200801 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISWANTO, A.Md.Kom

Jabatan : Notulis Rapat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

  
SISWANTO, A.Md.Kom  
NIP. 19830101 200701 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Mengumpulkan notulen hasil rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen notulen hasil rapat yang dikumpulkan	95	Dokumen
2	Menganalisis permasalahan yang ada dan menentukan jenis masalah yang harus ditangani sesuai dengan situasi dan kondisi agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen hasil analisa permasalahan	15	Dokumen
3	Menyusun resume notulen hasil rapat sesuai prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen resume notulen hasil rapat yang disusun	150	Dokumen
4	Membuat kesimpulan dari hasil resume notulen rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen kesimpulan dari hasil resume notulen rapat yang dibuat	80	Dokumen
5	Menyerahkan hasil notulen rapat dan kesimpulan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;	Jumlah dokumen hasil notulen rapat yang diserahkan kepada pimpinan	24	Dokumen
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada pimpinan unit	12	Laporan
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan	150	Laporan

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Notulis Rapat

  
SISWANTO, A.Md.Kom  
NIP. 19830101 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814  
Telp.(0512) 21863 Fax. (0512) 21009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBARI

Jabatan : Pengadministrasi Rapat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Pihak Pertama,

SUBARI  
NIP. 19651220 200701 1 011


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	
	1	2	3	
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi Rapat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi Rapat yang disortir	150	Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi Rapat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi Rapat yang diberi lembar pengantar	180	Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi Rapat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi Rapat yang dikelompokkan	150	Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi Rapat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi Rapat yang didokumentasikan	100	Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	34	Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	80	Laporan

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi  
DPRD

  
ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM  
NIP. 19740826 200003 1 005

Pelaihari, Januari 2023  
Pengadministrasi Rapat

  
SUBARI  
NIP. 19651220 200701 1 011

**POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**  
 Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021

<b>SASARAN</b>
Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD
<b>INDIKATOR</b>
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap layanan Sekretariat DPRD.

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
Sasaran	Indikator
1) Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian.	
2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan	
3) Persentase pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib.	
4) Persentase Pemenuhan tenaga ahli DPRD	
5) Persentase pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	
6) Persentase Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	
7) Persentase Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	
8) Persentase penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	

KEPALA BAGIAN KEUANGAN	
Sasaran	Indikator :
1) Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	
2) Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	

KEPALA BAGIAN FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
Sasaran	Indikator
1) Meningkatnya fasilitas dalam rangka menunjang kinerja DPRD	
2) Persentase Rapat yang difasilitasi	
3) Persentase Fasilitas Pembahasan rancangan Perda	
4) Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	
5) Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	

Sasaran	Sasaran	Sasaran
1) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan Kepegawaian	1) Melaksanakan Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan	1) Melaksanakan Penyediaan informasi / pemberitaan DPRD
2) Melaksanakan Fasilitas Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	2) Melaksanakan Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	2) Melaksanakan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan
3) Melaksanakan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD		
4) Melaksanakan Fasilitas pemenuhan tenaga Ahli DPRD		

Sasaran	Sasaran	Sasaran
1) Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan Anggaran SKPD	1) Melaksanakan penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan SKPD	1) Melaksanakan Penyusunan Laporan kinerja dan laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan
		2) Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Akuntansi SKPD

Sasaran	Sasaran	Sasaran
1) Melaksanakan Fasilitas rapat - rapat DPRD	1) Melaksanakan Fasilitas Kasubag Fasilitas Legislatif Daerah	1) Melaksanakan Fasilitas hearing dan penyerapan Aspirasi
2) Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		2) Melaksanakan Fasilitas layanan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	1 Jumlah rapat yang difasilitasi	1 Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1 Jumlah Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama yang difasilitasi
2 Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	2 Jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	2 Jumlah Kegiatan Rees anggota DPRD yang dilaksanakan
3 Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi				3 Jumlah Fasilitas Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat
4 Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi Pemeriksaaan Kesehatannya				4 Jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi
5 Jumlah tenaga ahli yang disediakan				

Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	1 Jumlah dokumen yang difasilitasi	1 Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1 Jumlah Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama yang difasilitasi
	2 Jumlah pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	2 Jumlah Kegiatan Rees anggota DPRD yang dilaksanakan
				3 Jumlah Fasilitas Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat
				4 Jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi

Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	1 Jumlah rapat yang difasilitasi	1 Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	1 Jumlah Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama yang difasilitasi
2 Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	2 Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	2 Jumlah Kegiatan Rees anggota DPRD yang dilaksanakan
3 Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi		3 Jumlah kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi		3 Jumlah Fasilitas Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat
4 Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi Pemeriksaaan Kesehatannya				4 Jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi
5 Jumlah tenaga ahli yang disediakan				

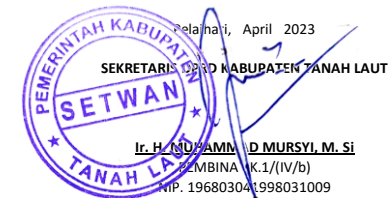


**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2023**  
**TRIWULAN I**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>31.308.926.302,00</b>	<b>33.975.270.127,00</b>	<b>42,93%</b>	<b>13.442.089.291,00</b>	<b>21,05%</b>		<b>6.644.971.425,00</b>			
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>179.715.124,00</b>	<b>179.715.124,00</b>	<b>76,78%</b>	<b>137.978.867,00</b>	<b>34,04%</b>		<b>61.175.009,00</b>			
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.715.449,00	39.715.449,00	47,84%	19.000.000,00	4,64%	0,00%	1.842.000,00	4,64%	Tidak Ada	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.999.675,00	139.999.675,00	84,99%	118.978.867,00	42,38%	0,12%	59.333.009,00	42,38%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.410.895.931,00</b>	<b>5.410.895.931,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>5.376.806.098,00</b>	<b>15,31%</b>		<b>828.682.816,00</b>			
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.368.806.098,00	5.368.806.098,00	100,00%	5.368.806.098,00	15,28%	1,60%	820.557.816,00	15,28%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.089.833,00	42.089.833,00	19,01%	8.000.000,00	19,30%	0,02%	8.125.000,00	19,30%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>169.974.000,00</b>	<b>351.054.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.974.000,00</b>	<b>61,84%</b>		<b>104.459.731,00</b>			
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.974.000,00	57.054.000,00	100,00%	25.974.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Keterlambatan proses PBJ	dijadwalkan kembali proses PBJ di triwulan II
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144.000.000,00	294.000.000,00	100,00%	144.000.000,00	73,00%	0,21%	104.459.731,00	72,54%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>303.865.461,00</b>	<b>1.427.889.736,00</b>	<b>45,46%</b>	<b>138.152.061,00</b>	<b>33,60%</b>		<b>102.684.926,00</b>			
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.059.490,00	47.458.372,00	100,00%	6.059.490,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	anggaran yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan	diusulkan penambahan pagu di perubahan anggaran 2023 sesuai dengan kebutuhan
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.413.770,00	698.404.379,00	100,00%	39.413.770,00	32,00%	0,02%	12.475.000,00	31,65%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.847.001,00	29.881.785,00	100,00%	9.847.001,00		0,00%	0,00	0,00%	anggaran yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan	diusulkan penambahan pagu di perubahan anggaran 2023 sesuai dengan kebutuhan
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.760.400,00	17.760.400,00	50,00%	8.880.200,00	75,00%	0,03%	13.264.400,00	74,69%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.784.800,00	624.384.800,00	32,04%	73.951.600,00	33,00%	0,15%	76.945.526,00	33,34%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.907.418,00</b>	<b>105.653.463,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.907.418,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>			
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	77.977.500,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.907.418,00	7.907.418,00	100,00%	7.907.418,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Keterlambatan proses PBJ	dijadwalkan kembali proses PBJ di triwulan II
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	19.768.545,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.190.566.196,00</b>	<b>1.695.753.576,00</b>	<b>31,73%</b>	<b>377.725.228,00</b>	<b>24,34%</b>		<b>289.820.779,00</b>			
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.000.000,00	301.000.000,00	25,92%	70.250.000,00	25,20%	0,13%	68.279.819,00	25,20%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.566.196,00	1.394.753.576,00	33,44%	307.475.228,00	24,09%	0,43%	221.540.960,00	24,09%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>402.305.250,00</b>	<b>512.273.875,00</b>	<b>55,70%</b>	<b>224.100.000,00</b>	<b>13,23%</b>		<b>53.234.800,00</b>			
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.435.250,00	186.435.250,00	67,32%	100.600.000,00	16,83%	0,05%	25.145.800,00	16,83%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.370.000,00	188.370.000,00	31,32%	59.000.000,00	4,21%	0,02%	7.939.000,00	4,21%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.500.000,00	127.478.625,00	100,00%	64.500.000,00	31,24%	0,04%	20.150.000,00	31,24%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	9.990.000,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>22.888.607.481,00</b>	<b>23.111.994.981,00</b>	<b>29,62%</b>	<b>6.780.498.793,00</b>	<b>22,48%</b>		<b>5.147.187.364,00</b>			
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.551.352.156,00	22.551.352.156,00	28,57%	6.443.243.468,00	22,82%	10,04%	5.147.187.364,00	22,82%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	193.259.325,00	416.646.825,00	100,00%	193.259.325,00		0,00%	0,00	0,00%	Keterlambatan proses PBJ	dijadwalkan kembali proses PBJ di triwulan II
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	143.996.000,00	143.996.000,00	100,00%	143.996.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Keterlambatan proses PBJ	dijadwalkan kembali
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>755.089.441,00</b>	<b>1.180.039.441,00</b>	<b>30,32%</b>	<b>228.946.826,00</b>	<b>0,40%</b>		<b>57.726.000,00</b>			
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	50.140.448,00	50.140.448,00	30,00%	15.042.132,00	6,07%	0,01%	3.044.000,00	6,07%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	704.948.993,00	1.129.898.993,00	30,34%	213.904.694,00	0,00%	0,00%	54.682.000,00	7,76%	Tidak Ada	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>19.948.128.954,00</b>	<b>26.837.458.043,00</b>	<b>30,80%</b>	<b>6.143.496.079,00</b>	<b>23,55%</b>		<b>4.412.981.280,00</b>			
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.204.086.816,00</b>	<b>4.504.086.816,00</b>	<b>30,16%</b>	<b>1.267.669.576,00</b>	<b>29,19%</b>		<b>1.227.285.861,00</b>			
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50.701.100,00	50.701.100,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Keterlambatan penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan	melengkapi dokumen pendukung dan menyesuaikan jadwal Bamus
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.143.599.212,00	4.443.599.212,00	30,36%	1.257.883.072,00	29,62%	2,39%	1.227.285.861,00	29,62%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.786.504,00	9.786.504,00	100,00%	9.786.504,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	masih dalam proses persiapan pelaksanaan	melengkapi dokumen pendukung kegiatan
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>85.943.726,00</b>	<b>85.943.726,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>25.783.113,00</b>	<b>6,80%</b>		<b>5.840.000,00</b>			
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	85.943.726,00	85.943.726,00	30,00%	25.783.113,00	6,80%	0,01%	5.840.000,00	6,80%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>88.426.991,00</b>	<b>88.426.991,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>26.528.097,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>			
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	88.426.991,00	88.426.991,00	30,00%	26.528.097,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	masih dalam proses persiapan pelaksanaan	melengkapi dokumen pendukung kegiatan
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.957.820.741,00</b>	<b>2.979.628.646,00</b>	<b>34,08%</b>	<b>1.008.070.741,00</b>	<b>21,50%</b>		<b>352.514.668,00</b>			
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.777.000.000,00	1.777.000.000,00	25,00%	444.250.000,00	10,16%	0,35%	180.474.668,00	10,16%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	460.820.741,00	542.628.646,00	83,29%	383.820.741,00	13,79%	0,12%	63.540.000,00	13,79%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	384.000.000,00	352.000.000,00	25,00%	96.000.000,00	14,58%	0,11%	56.000.000,00	14,58%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000,00	308.000.000,00	25,00%	84.000.000,00	100,00%	0,66%	52.500.000,00	15,63%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>956.680.582,00</b>	<b>1.069.223.086,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>318.893.525,00</b>	<b>20,24%</b>		<b>193.619.500,00</b>			
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	956.680.582,00	1.069.223.086,00	33,33%	318.893.525,00	20,24%	0,38%	193.619.500,00	20,24%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>11.655.170.098,00</b>	<b>18.110.148.778,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>3.496.551.027,00</b>	<b>22,60%</b>		<b>2.633.721.251,00</b>			
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.655.170.098,00	18.110.148.778,00	30,00%	3.496.551.027,00	22,60%	5,14%	2.633.721.251,00	22,60%	Tidak Ada	
		<b>51.257.055.256</b>	<b>60.812.728.170</b>	<b>38,21%</b>	<b>19.585.585.370</b>		<b>22,02%</b>	<b>11.057.952.705</b>	<b>21,57%</b>		

cc



**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2023**  
**TRIWULAN II**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>31.308.926.302,00</b>	<b>33.975.270.127,00</b>	66,19%	20.724.247.677,00	53,20%		16.029.709.601,00			
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>179.715.124,00</b>	<b>179.715.124,00</b>	86,77%	155.946.424,00	49,37%		82.619.175,00			
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.715.449,00	39.715.449,00	76,80%	30.500.000,00	26,00%	0,02%	6.272.000,00	15,79%	Tidak Ada	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.999.675,00	139.999.675,00	89,60%	125.446.424,00	56,00%	0,15%	76.347.175,00	54,53%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.410.895.931,00</b>	<b>5.410.895.931,00</b>	99,60%	5.389.374.355,00	51,83%		2.576.995.787,00			
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.368.806.098,00	5.368.806.098,00	100,00%	5.368.806.098,00	51,90%	5,44%	2.562.878.787,00	47,74%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.089.833,00	42.089.833,00	48,87%	20.568.257,00	42,50%	0,03%	14.117.000,00	33,54%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>169.974.000,00</b>	<b>351.054.000,00</b>	100,00%	169.974.000,00	77,13%		127.859.731,00			
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.974.000,00	57.054.000,00	100,00%	25.974.000,00	100,00%	0,05%	23.400.000,00	90,09%	Tidak Ada	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144.000.000,00	294.000.000,00	100,00%	144.000.000,00	73,00%	0,21%	104.459.731,00	72,54%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>303.865.461,00</b>	<b>1.427.889.736,00</b>	69,05%	209.823.861,00	56,67%		167.356.926,00			
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.059.490,00	47.458.372,00	100,00%	6.059.490,00	100,00%	0,01%	5.440.000,00	89,78%	anggaran yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan	diusulkan penambahan pagu di perubahan anggaran 2023 sesuai dengan kebutuhan
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.413.770,00	698.404.379,00	100,00%	39.413.770,00	95,00%	0,07%	34.619.000,00	87,83%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.847.001,00	29.881.785,00	100,00%	9.847.001,00		0,00%	0,00	0,00%	anggaran yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan	diusulkan penambahan pagu di perubahan anggaran 2023 sesuai dengan kebutuhan
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	17.760.400,00	17.760.400,00	100,00%	17.760.400,00	75,00%	0,03%	13.264.400,00	74,69%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.784.800,00	624.384.800,00	59,25%	136.743.200,00	50,00%	0,23%	114.033.526,00	49,41%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.907.418,00</b>	<b>105.653.463,00</b>	100,00%	7.907.418,00	100,00%		6.855.000,00			
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	77.977.500,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.907.418,00	7.907.418,00	100,00%	7.907.418,00	100,00%	0,02%	6.855.000,00	86,69%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	19.768.545,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.190.566.196,00</b>	<b>1.695.753.576,00</b>	63,28%	753.450.456,00	49,25%		586.133.760,00			
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.000.000,00	301.000.000,00	51,11%	138.500.000,00	50,12%	0,26%	135.821.820,00	50,12%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.566.196,00	1.394.753.576,00	66,87%	614.950.456,00	49,00%	0,88%	450.311.940,00	48,97%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>402.305.250,00</b>	<b>512.273.875,00</b>	82,51%	331.935.250,00	42,56%		148.860.600,00			
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.435.250,00	186.435.250,00	100,00%	149.435.250,00	41,00%	0,12%	51.023.800,00	34,14%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.370.000,00	188.370.000,00	62,64%	118.000.000,00	38,00%	0,14%	69.356.800,00	36,82%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.500.000,00	127.478.625,00	100,00%	64.500.000,00	59,50%	0,07%	28.480.000,00	44,16%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	9.990.000,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>22.888.607.481,00</b>	<b>23.111.994.981,00</b>	57,77%	13.223.742.261,00	54,19%		12.072.812.622,00			
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.551.352.156,00	22.551.352.156,00	57,14%	12.886.486.936,00	55,00%	24,20%	12.072.812.622,00	53,53%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	193.259.325,00	416.646.825,00	100,00%	193.259.325,00		0,00%	0,00	0,00%	Keterlambatan proses PBJ	dijadwalkan kembali proses PBJ di triwulan III
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	143.996.000,00	143.996.000,00	100,00%	143.996.000,00		0,00%	0,00	0,00%	tidak terlaksana sesuai jadwal	komunikasi intensif dengan pimpinan/anggota dewan terkait perubahan/penyesuaian jadwal medical check up
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>755.089.441,00</b>	<b>1.180.039.441,00</b>	63,85%	482.093.652,00	38,58%		260.216.000,00			
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	50.140.448,00	50.140.448,00	60,00%	30.084.264,00	10,75%	0,01%	4.049.000,00	8,08%	keterlambatan menyampaikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan rapat fraksi	koordinasi dengan fraksi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban untuk proses pembayaran
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	704.948.993,00	1.129.898.993,00	64,12%	452.009.388,00	40,56%	0,56%	256.167.000,00	36,34%	Tidak Ada	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>19.948.128.954,00</b>	<b>26.837.458.043,00</b>	60,49%	12.065.702.941,00	46,47%		8.832.451.126,00			
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.204.086.816,00</b>	<b>4.504.086.816,00</b>	60,35%	2.536.870.676,00	52,33%		2.162.126.779,00			
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50.701.100,00	50.701.100,00	60,55%	30.701.100,00		0,00%	0,00	0,00%	Keterlambatan penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan	melengkapi dokumen pendukung dan menyesuaikan jadwal Bamus
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.143.599.212,00	4.443.599.212,00	60,25%	2.496.383.072,00	53,00%	4,28%	2.158.540.779,00	52,09%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.786.504,00	9.786.504,00	100,00%	9.786.504,00	38,20%	0,01%	3.586.000,00	36,64%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>85.943.726,00</b>	<b>85.943.726,00</b>	60,00%	51.566.226,00	16,67%		10.566.000,00			
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	85.943.726,00	85.943.726,00	60,00%	51.566.226,00	16,67%	0,03%	10.566.000,00	12,29%	serapan keuangan rendah	masih dalam proses persiapan dan kegiatan pembahasan APBD sesuai jadwal BAMUS
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>88.426.991,00</b>	<b>88.426.991,00</b>	60,00%	53.056.194,00	17,67%		14.310.400,00			
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	88.426.991,00	88.426.991,00	60,00%	53.056.194,00	17,67%	0,03%	14.310.400,00	16,18%	serapan keuangan rendah	masih dalam proses pelaksanaan kegiatan, melengkapi dokumen pendukung kegiatan dan menyesuaikan jadwal anggota dewan
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.957.820.741,00</b>	<b>2.979.628.646,00</b>	60,63%	1.793.320.741,00	37,91%		771.850.431,00			
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.777.000.000,00	1.777.000.000,00	50,00%	888.500.000,00	25,00%	0,87%	307.269.431,00	17,29%	realisasi keuangan rendah	menyesuaikan jadwal anggota dewan
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	460.820.741,00	542.628.646,00	100,00%	460.820.741,00	43,20%	0,39%	188.081.000,00	40,81%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	384.000.000,00	352.000.000,00	50,00%	192.000.000,00	37,00%	0,28%	140.000.000,00	36,46%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000,00	308.000.000,00	75,00%	252.000.000,00	100,00%	0,66%	136.500.000,00	40,63%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>956.680.582,00</b>	<b>1.069.223.086,00</b>	66,67%	637.787.050,00	48,46%		431.498.900,00			
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	956.680.582,00	1.069.223.086,00	66,67%	637.787.050,00	48,46%	0,90%	431.498.900,00	45,10%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>11.655.170.098,00</b>	<b>18.110.148.778,00</b>	60,00%	6.993.102.054,00	46,80%		5.442.098.616,00			
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.655.170.098,00	18.110.148.778,00	60,00%	6.993.102.054,00	46,80%	10,64%	5.442.098.616,00	46,69%	Tidak Ada	
		<b>51.257.055.256</b>	<b>60.812.728.170</b>	<b>63,97%</b>	<b>32.789.950.618</b>		<b>50,58%</b>	<b>24.862.160.727</b>	<b>48,50%</b>		

cc



**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN  
Tahun Anggaran 2023  
TRIWULAN III  
SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>31.308.926.302,00</b>	<b>33.975.270.127,00</b>	84,00%	26.298.381.375,00	73,13%		22.887.145.474,00			
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>179.715.124,00</b>	<b>179.715.124,00</b>	98,13%	176.351.779,00	73,27%		131.678.145,00			
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.715.449,00	39.715.449,00	99,08%	39.349.881,00	49,09%	0,04%	19.496.600,00	49,09%	Tidak Ada	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.999.675,00	139.999.675,00	97,86%	137.001.898,00	80,13%	0,22%	112.181.545,00	80,13%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.410.895.931,00</b>	<b>5.410.895.931,00</b>	100,00%	5.410.895.931,00	67,89%		3.673.669.574,00			
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.368.806.098,00	5.368.806.098,00	100,00%	5.368.806.098,00	67,92%	7,11%	3.646.580.574,00	67,92%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.089.833,00	42.089.833,00	100,00%	42.089.833,00	64,36%	0,05%	27.089.000,00	64,36%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>169.974.000,00</b>	<b>351.054.000,00</b>	100,00%	169.974.000,00	77,13%		127.859.731,00			
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.974.000,00	57.054.000,00	100,00%	25.974.000,00	100,00%	0,05%	23.400.000,00	90,09%	Tidak Ada	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144.000.000,00	294.000.000,00	100,00%	144.000.000,00	73,00%	0,21%	104.459.731,00	72,54%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>303.865.461,00</b>	<b>1.427.889.736,00</b>	89,72%	272.615.461,00	73,80%		220.747.476,00			
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.059.490,00	47.458.372,00	100,00%	6.059.490,00	100,00%	0,01%	5.440.000,00	89,78%	anggaran yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan	diusulkan penambahan pagu di perubahan anggaran 2023 sesuai dengan kebutuhan
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.413.770,00	698.404.379,00	100,00%	39.413.770,00	95,00%	0,07%	34.619.000,00	87,83%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.847.001,00	29.881.785,00	100,00%	9.847.001,00		0,00%	0,00	0,00%	anggaran yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan	diusulkan penambahan pagu di perubahan anggaran 2023 sesuai dengan kebutuhan
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.760.400,00	17.760.400,00	100,00%	17.760.400,00	75,00%	0,03%	13.264.400,00	74,69%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.784.800,00	624.384.800,00	86,46%	199.534.800,00	72,55%	0,33%	167.424.076,00	72,55%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.907.418,00</b>	<b>105.653.463,00</b>	100,00%	7.907.418,00	100,00%		6.855.000,00			
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	77.977.500,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.907.418,00	7.907.418,00	100,00%	7.907.418,00	100,00%	0,02%	6.855.000,00	86,69%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	19.768.545,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.190.566.196,00</b>	<b>1.695.753.576,00</b>	94,43%	1.124.316.196,00	76,22%		907.375.031,00			
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.000.000,00	301.000.000,00	75,55%	204.750.000,00	79,49%	0,42%	215.408.191,00	79,49%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.566.196,00	1.394.753.576,00	100,00%	919.566.196,00	75,25%	1,35%	691.966.840,00	75,25%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>402.305.250,00</b>	<b>512.273.875,00</b>	97,76%	393.305.250,00	67,86%		272.793.600,00			
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.435.250,00	186.435.250,00	100,00%	149.435.250,00	69,58%	0,20%	103.977.300,00	69,58%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.370.000,00	188.370.000,00	95,22%	179.370.000,00	69,35%	0,25%	130.636.300,00	69,35%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.500.000,00	127.478.625,00	100,00%	64.500.000,00	59,50%	0,07%	38.180.000,00	59,19%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
				(%)	(Rp)			Rp	%		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	9.990.000,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>22.888.607.481,00</b>	<b>23.111.994.981,00</b>	78,89%	18.056.174.862,00	74,15%		16.970.812.917,00			
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.551.352.156,00	22.551.352.156,00	78,57%	17.718.919.537,00	74,52%	32,79%	16.804.562.917,00	74,52%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	193.259.325,00	416.646.825,00	100,00%	193.259.325,00	86,02%	0,32%	166.250.000,00	86,02%	pemenuhan hak anggota DPRD terhadap pakaian dinas dan atribut DPRD	mengusulkan penambahan pakaian dinas dan atributnya di anggaran perubahan 2023
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	143.996.000,00	143.996.000,00	100,00%	143.996.000,00		0,00%	0,00	0,00%	tidak terlaksana sesuai jadwal	komunikasi intensif dengan pimpinan/anggota dewan terkait perubahan/penyesuaian jadwal medical check up
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>755.089.441,00</b>	<b>1.180.039.441,00</b>	90,96%	686.840.478,00	76,20%		575.354.000,00			
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	50.140.448,00	50.140.448,00	90,00%	45.126.396,00	12,17%	0,01%	6.102.000,00	12,17%	keterlambatan menyampaikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan rapat fraksi	koordinasi dengan fraksi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban untuk proses pembayaran
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	704.948.993,00	1.129.898.993,00	91,03%	641.714.082,00	80,75%	1,11%	569.252.000,00	80,75%	Tidak Ada	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>19.948.128.954,00</b>	<b>26.837.458.043,00</b>	88,89%	17.731.124.850,00	72,30%		14.278.646.173,00			
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.204.086.816,00</b>	<b>4.504.086.816,00</b>	90,25%	3.794.286.816,00	64,48%		2.710.759.203,00			
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50.701.100,00	50.701.100,00	90,14%	45.701.100,00		0,00%	0,00	0,00%	Keterlambatan penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan	melengkapi dokumen pendukung dan menyesuaikan jadwal Bamus
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.143.599.212,00	4.443.599.212,00	90,23%	3.738.799.212,00	65,22%	5,27%	2.702.417.603,00	65,22%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.786.504,00	9.786.504,00	100,00%	9.786.504,00	85,24%	0,02%	8.341.600,00	85,24%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>85.943.726,00</b>	<b>85.943.726,00</b>	90,00%	77.349.339,00	36,27%		31.167.600,00			
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	85.943.726,00	85.943.726,00	90,00%	77.349.339,00	36,27%	0,06%	31.167.600,00	36,27%	serapan keuangan rendah	masih dalam proses persiapan dan kegiatan pembahasan APBD sesuai jadwal BAMUS
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>88.426.991,00</b>	<b>88.426.991,00</b>	90,00%	79.584.291,00	34,79%		30.762.600,00			
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	88.426.991,00	88.426.991,00	90,00%	79.584.291,00	34,79%	0,06%	30.762.600,00	34,79%	serapan keuangan rendah	masih dalam proses pelaksanaan kegiatan, melengkapi dokumen pendukung kegiatan dan menyesuaikan jadwal anggota dewan
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.957.820.741,00</b>	<b>2.979.628.646,00</b>	78,89%	2.333.570.741,00	45,10%		1.218.527.165,00			
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.777.000.000,00	1.777.000.000,00	75,00%	1.332.750.000,00	27,77%	0,96%	493.475.165,00	27,77%	realisasi keuangan rendah	menyesuaikan jadwal anggota dewan
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	460.820.741,00	542.628.646,00	100,00%	460.820.741,00	60,88%	0,55%	280.552.000,00	60,88%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	384.000.000,00	352.000.000,00	75,00%	288.000.000,00	58,33%	0,44%	224.000.000,00	58,33%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000,00	308.000.000,00	75,00%	252.000.000,00	100,00%	0,66%	220.500.000,00	65,63%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>956.680.582,00</b>	<b>1.069.223.086,00</b>	100,00%	956.680.582,00	48,46%		435.779.300,00			
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	956.680.582,00	1.069.223.086,00	100,00%	956.680.582,00	48,46%	0,90%	435.779.300,00	45,55%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>11.655.170.098,00</b>	<b>18.110.148.778,00</b>	90,00%	10.489.653.081,00	84,53%		9.851.650.305,00			
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.655.170.098,00	18.110.148.778,00	90,00%	10.489.653.081,00	84,53%	19,22%	9.851.650.305,00	84,53%	Tidak Ada	
		<b>51.257.055.256</b>	<b>60.812.728.170</b>	<b>85,90%</b>	<b>44.029.506.225</b>		<b>72,81%</b>	<b>37.165.791.647</b>	<b>72,51%</b>		

cc



**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2023**  
**TRIWULAN IV**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>31.308.926.302,00</b>	<b>33.975.270.127,00</b>	100,00%	33.975.270.127,00	98,34%		30.519.768.847,00			
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>179.715.124,00</b>	<b>179.715.124,00</b>	100,00%	179.715.124,00	100,00%		150.546.145,00			
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.715.449,00	39.715.449,00	100,00%	39.715.449,00	100,00%	0,07%	24.903.000,00	62,70%	serapan keuangan rendah	komitmen pelaksana kegiatan agar lebih ditingkatkan dalam melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sehingga capaian realisasi lebih maksimal
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.999.675,00	139.999.675,00	100,00%	139.999.675,00	100,00%	0,23%	125.643.145,00	89,75%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.410.895.931,00</b>	<b>5.410.895.931,00</b>	100,00%	5.410.895.931,00	100,00%		4.808.352.858,00			
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.368.806.098,00	5.368.806.098,00	100,00%	5.368.806.098,00	100,00%	8,83%	4.773.339.858,00	88,91%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.089.833,00	42.089.833,00	100,00%	42.089.833,00	100,00%	0,07%	35.013.000,00	83,19%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>169.974.000,00</b>	<b>351.054.000,00</b>	100,00%	351.054.000,00	80,40%		293.094.797,00			
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.974.000,00	57.054.000,00	100,00%	57.054.000,00	100,00%	0,09%	50.700.000,00	88,86%	Tidak Ada	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144.000.000,00	294.000.000,00	100,00%	294.000.000,00	76,60%	0,37%	242.394.797,00	82,45%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>303.865.461,00</b>	<b>1.427.889.736,00</b>	100,00%	1.427.889.736,00	88,00%		1.331.593.998,00			
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.059.490,00	47.458.372,00	100,00%	47.458.372,00	100,00%	0,08%	42.370.000,00	89,28%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.413.770,00	698.404.379,00	100,00%	698.404.379,00	100,00%	1,15%	647.124.000,00	92,66%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.847.001,00	29.881.785,00	100,00%	29.881.785,00	100,00%	0,05%	25.290.000,00	84,63%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.760.400,00	17.760.400,00	100,00%	17.760.400,00	100,00%	0,03%	6.745.000,00	37,98%	serapan keuangan rendah	komitmen pelaksana kegiatan agar lebih ditingkatkan dalam melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sehingga capaian realisasi lebih maksimal
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	0,02%	10.000.000,00	100,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.784.800,00	624.384.800,00	100,00%	624.384.800,00	72,55%	0,74%	600.064.998,00	96,10%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.907.418,00</b>	<b>105.653.463,00</b>	100,00%	105.653.463,00	100,00%		94.555.000,00			
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	77.977.500,00	100,00%	77.977.500,00	100,00%	0,13%	70.000.000,00	89,77%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.907.418,00	7.907.418,00	100,00%	7.907.418,00	100,00%	0,01%	6.855.000,00	86,69%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	19.768.545,00	100,00%	19.768.545,00	100,00%	0,03%	17.700.000,00	89,54%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.190.566.196,00</b>	<b>1.695.753.576,00</b>	100,00%	1.695.753.576,00	100,00%		1.590.562.324,00			
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.000.000,00	301.000.000,00	100,00%	301.000.000,00	100,00%	0,49%	296.438.564,00	98,48%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.566.196,00	1.394.753.576,00	100,00%	1.394.753.576,00	100,00%	2,29%	1.294.123.760,00	92,79%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>402.305.250,00</b>	<b>512.273.875,00</b>	100,00%	512.273.875,00	100,00%		473.351.100,00			

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.435.250,00	186.435.250,00	100,00%	186.435.250,00	100,00%	0,31%	185.140.300,00	99,31%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.370.000,00	188.370.000,00	100,00%	188.370.000,00	100,00%	0,31%	185.156.300,00	98,29%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.500.000,00	127.478.625,00	100,00%	127.478.625,00	100,00%	0,21%	94.054.500,00	73,78%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	9.990.000,00	100,00%	9.990.000,00	100,00%	0,02%	9.000.000,00	90,09%	Tidak Ada	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>22.888.607.481,00</b>	<b>23.111.994.981,00</b>	100,00%	23.111.994.981,00	99,12%		20.725.393.625,00			
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.551.352.156,00	22.551.352.156,00	100,00%	22.551.352.156,00	100,00%	37,08%	20.361.393.625,00	90,29%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	193.259.325,00	416.646.825,00	100,00%	416.646.825,00	86,02%	0,59%	364.000.000,00	87,36%	pemenuhan hak anggota DPRD terhadap pakaian dinas dan atribut DPRD	mengusulkan penambahan pakaian dinas dan atributnya di anggaran perubahan 2023
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	143.996.000,00	143.996.000,00	100,00%	143.996.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	tidak terlaksana	komunikasi intensif dengan pimpinan/anggota dewan terkait jadwal medical check up untuk tahun berikutnya
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>755.089.441,00</b>	<b>1.180.039.441,00</b>	100,00%	1.180.039.441,00	89,74%		1.052.319.000,00			
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	50.140.448,00	50.140.448,00	100,00%	50.140.448,00	91,66%	0,08%	42.849.000,00	85,46%	keterlambatan menyampaikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan rapat fraksi	koordinasi dengan fraksi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban untuk proses pembayaran
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	704.948.993,00	1.129.898.993,00	100,00%	1.129.898.993,00	89,66%	1,67%	1.009.470.000,00	89,34%	Tidak Ada	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>19.948.128.954,00</b>	<b>26.837.458.043,00</b>	100,00%	26.837.458.043,00	91,18%		22.808.875.498,00			
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.204.086.816,00</b>	<b>4.504.086.816,00</b>	100,00%	4.504.086.816,00	67,02%		3.674.766.598,00			
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	50.701.100,00	50.701.100,00	100,00%	50.701.100,00	100,00%	0,08%	33.350.000,00	65,78%	serapan keuangan rendah	komitmen pelaksana kegiatan agar lebih ditingkatkan dalam melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sehingga capaian realisasi lebih maksimal
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.143.599.212,00	4.443.599.212,00	100,00%	4.443.599.212,00	66,60%	4,87%	3.633.074.998,00	81,76%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.786.504,00	9.786.504,00	100,00%	9.786.504,00	85,24%	0,01%	8.341.600,00	85,24%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>85.943.726,00</b>	<b>85.943.726,00</b>	100,00%	85.943.726,00	100,00%		61.887.000,00			
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	85.943.726,00	85.943.726,00	100,00%	85.943.726,00	100,00%	0,14%	61.887.000,00	72,01%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>88.426.991,00</b>	<b>88.426.991,00</b>	100,00%	88.426.991,00	50,00%		45.959.000,00			
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	88.426.991,00	88.426.991,00	100,00%	88.426.991,00	50,00%	0,07%	45.959.000,00	51,97%	serapan keuangan rendah	komitmen pelaksana kegiatan agar lebih ditingkatkan dalam melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sehingga capaian realisasi lebih maksimal
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.957.820.741,00</b>	<b>2.979.628.646,00</b>	100,00%	2.979.628.646,00	71,88%		2.159.083.997,00			
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.777.000.000,00	1.777.000.000,00	100,00%	1.777.000.000,00	52,85%	1,54%	1.115.008.237,00	62,75%	realisasi keuangan rendah	menyesuaikan jadwal anggota dewan
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	460.820.741,00	542.628.646,00	100,00%	542.628.646,00	100,00%	0,89%	452.575.760,00	83,40%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	384.000.000,00	352.000.000,00	100,00%	352.000.000,00	100,00%	0,58%	297.500.000,00	84,52%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000,00	308.000.000,00	100,00%	308.000.000,00	100,00%	0,51%	294.000.000,00	95,45%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>956.680.582,00</b>	<b>1.069.223.086,00</b>	100,00%	1.069.223.086,00	100,00%		767.966.000,00			
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	956.680.582,00	1.069.223.086,00	100,00%	1.069.223.086,00	100,00%	1,76%	767.966.000,00	71,82%	Tidak Ada	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>11.655.170.098,00</b>	<b>18.110.148.778,00</b>	100,00%	18.110.148.778,00	100,00%		16.099.212.903,00			

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.655.170.098,00	18.110.148.778,00	100,00%	18.110.148.778,00	100,00%	29,78%	16.099.212.903,00	88,90%	Tidak Ada	
		<b>51.257.055.256</b>	<b>60.812.728.170</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.812.728.170</b>		<b>95,18%</b>	<b>53.328.644.345</b>	<b>87,69%</b>		

cc



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023  
TRIMULAN IV  
Sekretariat DPRD

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
<b>Semua Bidang</b>																											
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						33.975.270.127		6.638.452.025		9.384.738.176		6.857.435.873		7.639.142.773		30.519.768.847		89,83%		30.519.768.847		0,00%	Sekretariat DPRD		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas (%)	0,00	-	0,00	-	100	179.715.124	-	61.175.009	-	21.444.169	73	49.058.970	100	18.868.000	100	150.546.145	100,00%	83,77%	100,00	150.546.145	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun (%)	0,00	-	0,00	-	7	39.715.449	4	1.842.000	4	4.430.000	5	13.224.600	7	5.406.400	7	24.903.000	100,00%	62,70%	7,00	24.903.000	0,00%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun (%)	0,00	-	0,00	-	3	139.999.675	2	59.333.009	3	17.014.169	3	35.834.370	3	13.641.600	3	125.643.145	100,00%	89,75%	3,00	125.643.145	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%)	0,00	-	0,00	-	100	5.410.895.931	-	828.682.816	-	1.748.312.971	68	1.096.673.787	100	1.134.683.294	100	4.808.352.858	100,00%	88,86%	100,00	4.808.352.858	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (bulan)	0,00	-	0,00	-	36	5.368.806.098	36	820.557.816	36	1.742.320.971	36	1.083.701.787	36	1.126.759.294	36	4.773.339.858	100,00%	88,91%	36,00	4.773.339.858	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun (dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	42.089.833	2	8.125.000	2	5.992.000	5	12.972.000	5	7.924.000	5	35.013.000	100,00%	83,19%	5,00	35.013.000	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu (%)	0,00	-	0,00	-	100	351.054.000	-	104.459.731	-	23.400.000	77	-	88	165.235.066	88	293.094.797	88,33%	83,49%	88,33	293.094.797	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Ahbut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Ahbut Kelengkapannya (set)	0,00	-	0,00	-	2	57.054.000	-	-	1	23.400.000	1	-	2	27.300.000	2	50.700.000	100,00%	88,86%	2,00	50.700.000	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0,00	-	0,00	-	30	294.000.000	11	104.459.731	11	-	11	-	23	137.935.066	23	242.394.797	76,67%	82,45%	23,00	242.394.797	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.427.889.736	-	96.165.526	-	64.672.000	74	53.390.550	100	1.117.365.922	100	1.331.593.998	100,00%	93,26%	100,00	1.331.593.998	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (unit)	0,00	-	0,00	-	1	47.458.372	-	-	1	5.440.000	1	-	1	36.930.000	1	42.370.000	100,00%	89,28%	1,00	42.370.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (unit)	0,00	-	0,00	-	13	698.404.379	-	12.475.000	-	22.144.000	-	-	13	612.505.000	13	647.124.000	100,00%	92,66%	13,00	647.124.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (unit)	0,00	-	0,00	-	3	29.881.795	-	-	-	-	-	-	3	25.290.000	3	25.290.000	100,00%	84,63%	3,00	25.290.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (unit)	0,00	-	0,00	-	2	17.760.400	1	6.745.000	1	-	2	-	2	-	2	6.745.000	100,00%	37,98%	2,00	6.745.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan (unit)	0,00	-	0,00	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%	1,00	10.000.000	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	0,00	-	0,00	-	123	624.384.800	25	76.945.526	45	37.088.000	73	53.390.550	132	432.640.922	132	600.064.998	107,32%	96,10%	132,00	600.064.998	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu (%)	0,00	-	0,00	-	100	105.653.463	-	-	-	6.855.000	100	-	100	87.700.000	100	94.555.000	100,00%	89,50%	100,00	94.555.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan (unit)	0,00	-	0,00	-	10	77.977.500	-	-	-	-	-	-	10	70.000.000	10	70.000.000	100,00%	89,77%	10,00	70.000.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	0,00	-	0,00	-	1	7.907.418	-	-	-	6.855.000	1	-	1	-	1	6.855.000	100,00%	86,69%	1,00	6.855.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	0,00	-	0,00	-	3	19.768.545	-	-	-	-	-	-	3	17.700.000	3	17.700.000	100,00%	89,54%	3,00	17.700.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.695.753.576	-	289.820.779	-	296.312.981	76	321.241.271	100	683.187.293	100	1.590.562.324	100,00%	93,80%	100,00	1.590.562.324	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	301.000.000	2	68.279.819	6	67.542.001	9	79.586.371	12	81.030.373	12	296.438.564	100,00%	98,48%	12,00	296.438.564	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	1.394.753.576	3	221.540.960	6	228.770.980	9	241.654.900	12	602.156.920	12	1.294.123.760	100,00%	92,79%	12,00	1.294.123.760	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	0,00	-	0,00	-	100	512.273.875	-	53.234.800	-	95.625.800	68	123.933.000	-	200.557.500	-	473.351.100	0,00%	92,40%	0,00	473.351.100	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara (unit)	0,00	-	0,00	-	4	186.435.250	1	25.145.800	1	25.878.000	3	52.953.500	4	81.163.000	4	185.140.300	100,00%	99,31%	4,00	185.140.300	0,00%	0,00%		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (terpelihara*) (unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	0,00	0,00	11	188.370.000	7.939.000	9	61.417.800	9	61.279.500	11	54.520.000	11	185.156.300	100,00%	98,29%	11,00	185.156.300	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	0,00	0,00	6	127.478.625	20.150.000	2	8.330.000	3	9.700.000	6	55.874.500	6	94.054.500	100,00%	73,78%	6,00	94.054.500	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara*) (unit)	0,00	0,00	1	9.990.000	-	-	-	-	-	1	9.000.000	1	9.000.000	100,00%	90,09%	1,00	9.000.000	0,00%	0,00%
		Layanan Keuangan dan Kesehatan DPRD	Prosentasi pemenuhan Hak Administrasi dan Keuangan Anggota DPRD (100%)	0,00	0,00	100	23.111.994.981	5.147.187.364	6	6.925.625.268	60	4.898.000.296	67	3.754.580.708	67	20.725.393.625	66,67%	89,67%	66,67	20.725.393.625	0,00%	0,00%
		Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan DPRD (Tahun)	0,00	0,00	35	22.551.352.156	5.147.187.364	35	6.925.625.268	35	4.731.750.296	35	3.556.830.708	35	20.361.393.625	100,00%	90,29%	35,00	20.361.393.625	0,00%	0,00%
		Penyediaan Pakain Dinas dan Akibat DPRD	Tersedianya Akibat Pakain Dinas untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya Pakain Baik Tradisional untuk DPRD, Tersedianya PSH untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSL untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSR untuk DPRD dan Sekwan (Jenis dan Slei)	0,00	0,00	4	416.646.825	-	-	-	1	166.250.000	4	197.750.000	4	364.000.000	100,00%	87,36%	4,00	364.000.000	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD (Orang)	0,00	0,00	35	143.996.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Layanan Administrasi DPRD	Prosentasi pemenuhan Terlaksananya kegiatan Basis dan kegiatan rapat DPRD (100%)	0,00	0,00	100	1.180.039.441	57.726.000	202.490.000	76	315.138.000	91	476.965.000	91	1.052.319.000	90,67%	89,18%	90,67	1.052.319.000	0,00%	0,00%	
		Facilitas Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Facilitas Fraksi DPRD (Laporan)	0,00	0,00	24	50.140.448	3.044.000	7	1.005.000	17	2.053.000	22	36.747.000	22	42.849.000	91,67%	85,46%	22,00	42.849.000	0,00%	0,00%
		Facilitas Rapat Koordinasi dan Koordinasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi (Kali)	0,00	0,00	300	1.129.898.993	54.682.000	65	201.485.000	74	313.085.000	269	440.218.000	269	1.009.470.000	89,67%	89,34%	269,00	1.009.470.000	0,00%	0,00%
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,15%				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi		
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																				
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					26.837.458.043	4.412.981.280	4.419.469.846	5.446.195.047		8.530.229.325		22.808.875.498		84,99%			22.808.875.498	0,00%		Sekretariat DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentasi pemenuhan Terlaksananya Proses dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk Kemajuan Daerah (100%)	0,00	0,00	100	4.504.086.816	1.227.285.861	934.840.918	64	548.632.424	78	964.007.395	78	3.674.766.598	77,78%	81,59%	77,78	3.674.766.598	0,00%	0,00%	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penerbitan Surat Perimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Tahun)	0,00	0,00	1	50.701.100	-	-	-	-	1	33.350.000	1	33.350.000	100,00%	65,78%	1,00	33.350.000	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah (Raperdas)	0,00	0,00	15	4.443.599.212	1.227.285.861	931.254.918	2	543.876.824	10	930.657.395	10	3.633.074.998	66,67%	81,76%	10,00	3.633.074.998	0,00%	0,00%	
		Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terbayarnya Tenaga Ahli Kajian Perundang-Undangan (Tahun)	0,00	0,00	15	9.786.504	-	3.586.000	2	4.755.600	10	-	10	8.341.600	66,67%	85,24%	10,00	8.341.600	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentasi pemenuhan Terlaksananya Proses dan Mekanisme Pembahasan Kebijakan Anggaran smpa dengan Pertanggungjawaban APBD (100%)	0,00	0,00	100	85.943.726	5.840.000	4.726.000	36	20.601.600	100	30.719.400	100	61.887.000	100,00%	72,01%	100,00	61.887.000	0,00%	0,00%	
		Pembahasan APBD	Tersedianya Bahan Pembahasan APBD (Buku)	0,00	0,00	3	85.943.726	5.840.000	4.726.000	2	20.601.600	4	30.719.400	4	61.887.000	133,33%	72,01%	4,00	61.887.000	0,00%	0,00%	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentasi pemenuhan Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD (100%)	0,00	0,00	100	88.426.991	-	14.310.400	35	16.452.200	50	15.196.400	50	45.959.000	50,00%	51,97%	50,00	45.959.000	0,00%	0,00%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum (Kecamatan)	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kecamatan)	0,00	0,00	6	88.426.991	-	14.310.400	2	16.452.200	3	15.196.400	3	45.959.000	50,00%	51,97%	3,00	45.959.000	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentasi pemenuhan a kualitas Kinerja DPRD secara Profesional dan Tindakan yang mewakili Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut (100%)	0,00	0,00	100	2.979.628.646	352.514.668	419.335.763	45	446.676.734	92	940.556.832	92	2.159.083.997	92,23%	72,46%	92,23	2.159.083.997	0,00%	0,00%	
		Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Kegiatan Belajar DPRD (Kali)	0,00	0,00	140	1.777.000.000	180.474.668	126.794.763	72	186.205.734	74	621.533.072	74	1.115.008.237	52,86%	62,75%	74,00	1.115.008.237	0,00%	0,00%	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Tahun)	0,00	0,00	305	542.628.646	63.540.000	124.541.000	300	92.471.000	354	172.023.760	354	452.575.760	116,07%	83,40%	354,00	452.575.760	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (Tahun)	0,00	0,00	8	352.000.000	56.000.000	84.000.000	8	84.000.000	8	84.000.000	8	297.500.000	100,00%	84,52%	8,00	297.500.000	0,00%	0,00%	

		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbawanya Tenaga Ahli Fraksi DPRD Terperuhnya Tenaga Ahli Fraksi DPRD (Tahun/Cicil)	0,00				8	308.000.000	8	52.500.000	8	84.000.000	8	84.000.000	8	73.500.000	8	294.000.000	100,00%	95,45%	8,00	294.000.000	0,00%	0,00%		
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Proses pemenuhan Proses dan Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (100%)	0,00				100	1.069.223.086	1	193.619.500	33	237.879.400	67	4.280.400	100	332.186.700	100	767.966.000	100,00%	71,82%	100,00	767.966.000	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Reses	Terfasilitasinya Kegiatan Reses Anggota DPRD (Kali)	0,00				3	1.069.223.086	1	193.619.500	2	237.879.400	2	4.280.400	3	332.186.700	3	767.966.000	100,00%	71,82%	3,00	767.966.000	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya tugas pokok dan Fungsi DPRD (100%)	0,00				100	18.110.148.778	-	2.633.721.251	-	2.808.377.365	85	4.409.551.689	100	6.247.562.598	100	16.099.212.903	100,00%	88,90%	100,00	16.099.212.903	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terperuhnya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk menunjang kinerja DPRD (Tahun)	0,00				400	18.110.148.778	148	2.633.721.251	321	2.808.377.365	368	4.409.551.689	417	6.247.562.598	417	16.099.212.903	104,25%	88,90%	417,00	16.099.212.903	0,00%	0,00%		



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21863

### K E P U T U S A N

#### SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 4.b/SET.DPRD/2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

#### SEKRETARIS DPRD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT.

KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 4 Januari 2022.




Sekretaris DPRD  
Kabupaten Tanah Laut,

**LUFFIATI UYUN. M. Pd**  
NIP. 19620622 1987 2 002

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut  
 Nomor : Nomor 05 Tahun 2022  
 Tanggal : 4 Januari 2022

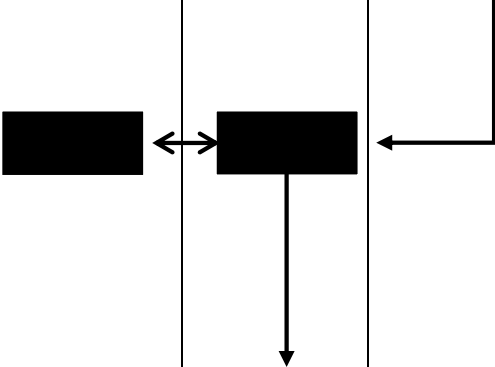
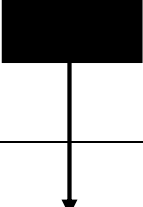
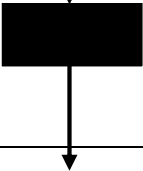

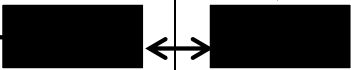

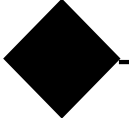

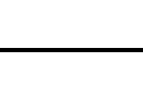

**A. INFORMASI PROSEDUR**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b> <b>SEKRETARIAT DPRD</b></p>	Nomor SOP	
	Tgl pembuatan sebelum disahkan	
	Tgl ujicoba	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dasar Hukum	Pengendalian	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim Penyusunan Lakip terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf Pendukung</li> <li>Kualifikasi anggota tim penyusunan Lakip adalah mempunyai kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk aplikasi Komputer</li> <li>Peningkatan kompetensi tim penyusun LAKIP</li> <li>Hasil penyusunan Lakip adalah berupa laporan Lakip SKPD yang menjadi bahan laporan penyampaian pertanggung jawaban SKPD</li> </ol>	
Identifikasi Risiko	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan pengetahuan tim penyusun</li> <li>Peraturan yang selalu berubah (dinamis)</li> <li>Tidak lengkapnya data yang diperlukan</li> </ol>		

**B.URAIAN PROSEDUR**

Uraian Prosedur		Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kabag Keuangan	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembantuan rancangan SK Penyusun Lakip SKPD					Draf Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Rancangan SK lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota Tim Penyusun Lakip SKPD	
2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD ke Sekretaris					Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Draf Surat Keputusan tim Penyusun Lakip	
3	Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD oleh Sekretaris					Draf SK tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	SK Tim Penyusun Lakip SKPD ditandatangani Sekretaris	
4	Penyusunan Agenda Kerja Tim Lakip SKPD dan Pengumpulan Data/Informasi					Jadwal/agenda kerja dan matrik (checklist) materi/bahan penyusunan Lakip	1 hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data /informasi bahan penyusunan Lakip	
5	Perumusan Rancangan Lakip SKPD					Data dan informasi (tupoksi, struktur tata laksana, kepegawaian).renstra, IKU, RKT, RKA, Lakip thn sebelumnya dan info lainnya	7 hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja, potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isi-isu strategis Teridentifikasi program /kegiatan yang berorasi hasil	



6	Analisis					Gambaran tupokasi,SDM,kinerja dan keuangan SKPD,isu-isu strategis,visi misi tujuan/sasaran pelayanan jangka menengah,program/kegiatan/indikator kinerja/lelompok sasaran dan pendanaan indikatif	7 hari	Teridentifikasi tingkat,capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isu-isu strategis,Teridentifikasi program/kegiatan yang beroreantasi hasil	
7	Penyajian Rancangan Lakip SKPD					Draf rancangan Lakip SKPD sesuai hasil analitis	1 hari	Tersusunnya naskah rancangan Lakip SKPD	
8	Perumusan rancangan akhir Lakip SKPD					Naskah Rancangan Lakip SKPD	3 Hari	Penjelasan rancangan Lakip SKPD(visi misi ,keselerasantujuan,sasaran,strategi,kebijakan, program dan kegiatan) dan pemenuhan target kinerja dan keuangan.	
9	Penyajian Rancangan Akhir Lakip SKPD					Rancangan Lakip SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelerasan	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Sekretris	
10	Penetapan Lakip SKPD					Lakip yang tersusun secara sistematis	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Sekretaris, dan dilakukan penggandaan dokumen oleh Sekretariat	